



SEMBUH Para pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19 bersiap meninggalkan Rumah Lawan Covid-19 di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (8/2). Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan memulangkan sebanyak 26 pasien yang sebelumnya melakukan isolasi dan pengobatan selama 14 hari di Rumah Lawan Covid-19 milik Pemkot Tangsel.

BOR RS Turun Tipis

Jumlah kasus di Jakarta dan Bali melambung tinggi melebihi gelombang kedua tahun lalu.

■ DIAN FATH RISALAH,
ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

JAKARTA—Keterisian tempat rawat atau *bed occupancy rate* (BOR) untuk pasien Covid-19 secara nasional dilaporkan berkurang per Selasa (8/2). Meski tidak signifikan, menurunnya BOR dinilai sebagai indikasi positif dari langkah memfokuskan rumah sakit (RS) untuk merawat pasien yang mengalami gejala sedang, berat, hingga kritis.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, BOR rumah sakit per kemarin tercatat 23,86 persen atau turun tipis dari 24,77 persen pada Senin (7/2). Kemkes mengimbau pasien tanpa gejala (OTG) atau pasien bergejala ringan untuk menjalani isolasi mandiri karena peluang sembuhnya sangat besar.

"Kita bisa terus meringankan beban rumah sakit dan tenaga kesehatan agar efektif menangani pasien bergejala sedang, berat, kritis, dan yang memiliki komorbiditas. Dengan mengimbau pasien OTG dan bergejala ringan untuk isolasi mandiri dan isolasi terpusat, mengurangi hingga 70 persen beban rumah sakit," kata Nadia, Selasa (8/2).

Kemarin, kasus positif Covid-19 di Indonesia kembali melonjak dengan angka konfirmasi positif sebanyak 37.492 orang. Sementara itu, Senin (7/2), kasus positif tercatat sebanyak 26.121 orang. Dari 83 kasus kematian yang tercatat pada Selasa (8/2), DKI "menyumbang" hampir

setengahnya atau 40 kasus. Kasus aktif atau orang yang kini sedang dalam proses penyembuhan telah mencapai sebanyak 233.062 orang.

Nadia menambahkan, kondisi beberapa wilayah di Pulau Jawa-Bali saat ini terus dipantau. Gambaran terkini, data konfirmasi kasus omikron menunjukkan sudah melebihi puncak gelombang kasus varian delta di beberapa daerah, seperti DKI Jakarta, Banten, dan Bali. Kendati begitu, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit belum menyamai puncak kasus delta pada Juli-Agustus 2021.

Pada Senin (6/2), kasus harian di



DKI Jakarta sebanyak 15,825 kasus baru, melebihi puncak kasus delta yang mencapai 14.619 kasus. Kendati demikian, pasien yang dirawat di rumah sakit karena omikron berjumlah 9.364 atau setengah dari 18.824 pasien yang dirawat di puncak gelombang kedua akibat varian delta pada 2021.

Begitu juga dengan Banten yang mencatatkan konfirmasi 4.885 kasus. Angka itu lebih tinggi dari catatan kasus harian saat gelombang varian delta, yaitu 3.994 kasus. Namun, pasien yang dirawat di RS berjumlah 966 orang, jauh lebih rendah dari jumlah pasien yang dirawat saat puncak gelombang delta, yaitu 4.268 orang.

Bali mencatatkan sebanyak 2.031 kasus, sedikit lebih tinggi dari puncak delta yang sebanyak 1.910 kasus. Namun, pasien yang dirawat sebanyak 948 orang, jauh lebih sedikit dari puncak delta, yaitu 2.263 kasus.

Turunnya BOR juga terjadi di DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan, BOR di Ibu Kota mengalami penurunan. Riza mengakui, BOR di DKI sempat mencapai 63 persen. BOR kini telah turun sedikit menjadi 60 persen meski pemprov belum menambah kapasitas tempat rawat. "Dari tempat tidur yang terpasang 5.913 itu, terpakai 3.554," kata Riza.

Khusus untuk ICU, hingga kini terpakai sekitar 36 persen. Dari 850 yang ada, saat ini terpakai 310 tempat. Dibandingkan dengan Juni-Juli tahun lalu, kenaikan ini juga bisa dibilang masih jauh. "Waktu itu, ICU mencapai 1.500 (yang terpakai). Jadi, (sekarang) tidak usah khawatir," ujar dia.

Kementerian Dalam Negeri (Ke-

mendagri) mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat aktivasi posko di tingkat desa dan kelurahan sampai RW/RT. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Saifrizal Zam mengatakan, aktivasi posko tersebut untuk memudahkan masyarakat yang tanpa gejala maupun bergejala ringan ketika akan melakukan isolasi mandiri atau terpusat di tempat yang telah disediakan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pada gelombang varian omikron ini terdapat dua provinsi yang jumlah kasusnya telah melambung tinggi dibandingkan dengan saat gelombang kedua varian delta pada tahun lalu. Kedua provinsi tersebut adalah Jakarta dan Bali.

"Di DKI sendiri ada dua kabupaten/kota sekitarnya yang sudah naik juga, yaitu Tangerang Selatan dan Depok. Sudah lebih tinggi dari puncaknya delta yang kemarin di bulan Juli," kata Budi.

Budi juga mengingatkan masyarakat agar tidak panik dan mengurangi mobilitas ketika terjadi lonjakan kasus Covid-19. Dengan begitu, pandemi dapat segera diatasi. Jika langkah itu terus dilakukan masyarakat, Budi yakin peningkatan kasus Covid-19 bisa segera ditekan. "Stay saja di rumah. Insya Allah, nanti di akhir Februari kita bisa mengatasi pandemi," kata dia.

■ *Keberlanjutan media nasional yang jelas pertanggungjawaban informasinya.*

Dengan demikian, kata dia, keberlanjutan media nasional pun akan dapat terus dipertahankan. Saat ini, kata Mahfud, penyusunan regulasi tersebut telah berada di tahapan mempertimbangkan "baju hukum" atau bentuk regulasi di antara menjadi peraturan turunan dari Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Pers, atau menjadi rancangan undang-undang tersendiri. "Kalau ingin menjadi rancangan undang-

Pemerintah Cari Bentuk Aturan Publisher Rights

■ RONGGO ASTUNGKORO

JAKARTA—Pemerintah menyatakan akan mengkaji bentuk aturan untuk mengakomodasi draf usulan regulasi *publisher rights* atau hak penerbit yang telah disampaikan Dewan Pers. Kajian itu bahkan disebut dilakukan atas instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan sudah menerima naskah usulan regulasi *publisher rights* dari Dewan Pers. "Dan pemerintah atas perintah Presiden Jokowi sedang merumuskan dan menyusun regulasi yang mengatur hubungan antara penerbit dan platform digital," kata Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci dalam Konferensi Media Massa Hari Pers Nasional (HPN) 2022 bertajuk "Membangun Model Media Masa Berkelanjutan" yang diselenggarakan secara hibrida dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (8/2).

Mahfud menjelaskan, ada beberapa aturan yang akan dimuat dalam regulasi itu. Beberapa aturan terkait dengan pemberian subsidi atau pengurangan pajak bagi media massa, kejelasan pajak yang wajib dibayar platform digital, serta ketentuan bagi iklan-iklan pembangunan untuk disalurkan pada media nasional yang jelas pertanggungjawaban informasinya.

Dengan demikian, kata dia, keberlanjutan media nasional di Indonesia pun akan dapat terus dipertahankan. Saat ini, kata Mahfud, penyusunan regulasi tersebut telah berada di tahapan mempertimbangkan "baju hukum" atau bentuk regulasi di antara menjadi peraturan turunan dari Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Pers, atau menjadi rancangan undang-undang tersendiri. "Kalau ingin menjadi rancangan undang-

Bersambung ke hlm 7 kol 1-6

REHAT

Golkar: Elektabilitas tinggi artinya jangan sombong
Elektabilitas rendah juga jangan ngotot

Kasus Arteria disetop, tapi pelapor dituntut polisi
Supaya takut?

Pedagang Kesulitan Akses Minyak



Pasokan minyak goreng sesuai HET dijanjikan lancar pekan depan.

■ SYARIAH&FINANSIAL HLM 10

REPUBLIKA ONLINE



Kerumunan di Tempat Hiburan Malam Diantisipasi

PMJ menyegel satu tempat hiburan malam karena melanggar prokes.

■ LAWAN COVID-19 HLM 12

DPR Minta Umrah Dievaluasi

Pembukaan embarkasi umrah selain Jakarta sedang diupayakan.

■ KHAZANAH HLM 16

Marquez Cs Siap Jajal Sirkuit Mandalika

■ EKO SUPRIYADI,
DIAN FATH RISALAH

LOMBOK—Setelah dibelot di Sepang, Malaysia, tes pramusim MotoGP 2022 akan berlangsung di Pertamina Mandalika Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 11-13 Februari mendatang. Sebanyak 24 pembalap dari 12 tim balap MotoGP dipasokkan siap tampil dalam tes pramusim tersebut, sebagian di antaranya sudah tiba di Lombok.

Dari seluruh pembalap yang dipastikan mengikuti tes pramusim, terdapat sejumlah nama pembalap MotoGP terbaik, seperti juara MotoGP 2021 Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha MotoGP, Marc Marquez dari

Repsol Honda Team, serta Francesco Bagnaia dan Jack Miller dari Ducati Lenovo Team. Selain itu ada juga Joan Mir dari Team Suzuki Ecstar, Johann Zarco dari Pramac Racing, dan Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing.

Tujuh pembalap tersebut merupakan pembalap dengan poin tertinggi selama musim MotoGP 2021. Marc Marquez dan adiknya, Alex Marquez, serta Quartararo sudah tiba di Indonesia. Marquez pun langsung memamerkan swafoto dengan latar belakang tulisan MotoGP di Bandara

Bandara Lombok Samudra Ratusan Peserta MotoGP

Hlm-7 Zainuddin Abdul Majid (BIZAM). Kabar tibanya Marquez di Indonesia juga disampaikan akun Twitter MotoGP. "Marc Marquez sudah tiba di Indonesia. Sangat



● Sejumlah tim balap MotoGP tiba di Bandara Internasional Lombok di Praya, Lombok Tengah, NTB, Senin (7/2).

menyenangkan melihat juara dunia delapan kali itu tiba jelang tes Mandalika," demikian pernyataan MotoGP dalam akun Twitter resmi mereka, Selasa (8/2).

Berbeda dengan Marquez

yang ditunggu awak media di bandara, kedatangan Quartararo lebih senyap dari sambutan dan pengawalan. MotoGP Official Test

Bersambung ke hlm 7 kol 1-6

KILAS

Kasus Korupsi Helikopter AW101, KPK Digugat Praperadilan

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digugat praperadilan oleh pihak bernama Jhon Irfan Kenway terkait kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AW-101. Gugatan tersebut diajukan Jhon Irfan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.DIK-44/01/06-2017 tanggal 16 Juni 2017 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian dikutip dari SIPP PN Jakarta Selatan, Selasa (8/2).

Ada beberapa petiti yang diajukan oleh pemohon. Jhon meminta hakim menyatakan status tersangkanya tidak sah karena status itu sudah melampaui waktu dua tahun dan tersangka penyelenggara negara sudah dihentikan penyidikannya.

Selain itu, Jhon juga meminta hakim membatalkan pemblokiran aset yang sudah dilakukan, termasuk milik ibu kandungnya. Dia juga meminta hakim mencabut pemblokiran uang negara Rp 139,43 miliar yang berada di rekening PT Diratama Jaya Mandiri.

"Untuk dan tetap dikuasai oleh pemegang kas TNI Angkatan Udara," tulis gugatan tersebut.

Kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AW-101 dibongkar lewat kerja sama antara Puspomo TNI di era Panglima Jendral Gatot Nurmantyo dengan KPK.

Pada Februari 2016, setelah menekan kontrak dengan TNI AU, PT Diratama Jaya menaikkan nilai jualnya menjadi Rp 738 miliar. Diyakini, ada potensi kerugian negara sebesar Rp 220 miliar dalam pengadaan helikopter AW-101 tersebut.

■ Rizkyan adiyudha ed andri saubani

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Mandar dan KRI Teluk Peny

JAKARTA — DPR RI memberi persetujuan terkait penjualan barang milik negara berupa kapal eks KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Peny 513. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (8/2).

Apakah terhadap laporan Komisi I DPR RI atas penjualan barang milik negara berupa kapal eks KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Peny 513 pada Kementerian Pertahanan dan tersebut dapat disetujui? tanya Wakil Ketua DPR Sufrmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.

"Selanjutnya, persetujuan rapat paripurna dewan terhadap laporan Komisi I DPR RI tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Anton Sukartono, dalam laporannya menyebutkan, berdasarkan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR tanggal 13 Januari 2022 Komisi I DPR ditugasi untuk membahas persetujuan penjualan dua kapal perang milik Indonesia tersebut. Komisi I DPR RI kemudian menindaklanjuti pengusutan tersebut dengan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Keuangan (Menkeu), dan KSAL pada 27 Januari 2022.

Setelah mendengarkan dan melakukan penemuan dalam sesi tanya jawab, Komisi I DPR memutuskan menyetujui usulan penjualan kapal eks KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Peny 513 pada Kementerian Pertahanan sesuai dengan surat Presiden RI Nomor R-52/Pres/10/2021 perihal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara," jelas Anton. ■ febrianto adi saputro ed andri saubani



THOLOU BAWA/REPUBLIKA

PENYELIDIKAN FORMULA E Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kiri) berjalan usai menjadi pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/2). Prasetyo Edi diperiksa untuk penyelidikan mengenai anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penyelenggaraan balap mobil Formula E.

■ RIZKYAN ADIYUDHA

JAKARTA — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendampingi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (8/2). Kedatangan

Prasetyo ke Gedung Merah Putih KPK guna memberikan keterangan terkait Formula E.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu membawa satu bundle dokumen mulai dari Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Ang-

garan (KUA PPAS) RAPBD sampai APBD. Dia telah menyerahkan dokumen tersebut kepada penyidik KPK.

Dia berharap, dokumen itu dapat membantu tim KPK RI untuk mendalami proses penyelenggaraan anggaran korupsi penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut. Prasetyo juga menjelaskan proses penyelenggaraan Formula E, mulai dari usulan, pembahasan, sampai pengesahan anggaran. Kemudian, bagaimana pembayaran commitment fee sebesar Rp 560 miliar yang dilakukan sebelum perda APBD disahkan.

Prasetyo menjalani pemeriksaan sekitar tujuh jam. Dia mengaku, dikonfirmasi penyidik KPK seputar masalah terkait penganggaran anggaran balap mobil listrik tersebut. "Pemeriksaan soal penganggaran masalah Formula E. Jadi, ada anggaran yang sebelum menjadi Perda APBD itu sudah

ijon ke Bank DKI senilai Rp 180 miliar," kata Prasetyo.

Prasetyo menyebutkan, ijon yang dilakukan Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta keliru. Dia mengatakan, pinjaman uang Rp 180 miliar dilakukan Pemprov DKI sebelum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disahkan DPRD.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan Pemprov DKI tidak diketahui DPRD DKI Jakarta. Dia mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memberi informasi apa pun kepada legislatif.

"Dalam perundang-undangan setelah menjadi Perda, APBD baru bisa dilakukan. Ini kan enggak, tanpa konfirmasi kita, dia langsung berbuat sendiri. Saya juga tidak diberi tahu Pak Gubernur, dan dia membuat commitment fee yang pertama itu," kata dia.

Saya dijanjikan imbalan Rp 10 juta. Bilangnya uang terima kasih.

ada surat tagihan dari petugas pajak, dia bingung mengapa ada tagihan yang harus dibayarkannya walau tak melakukan transaksi yang disebutkan. Ia lantas mengklarifikasinya ke pihak Benny. Benny lalu membayar tagihan tersebut. "Saya diminta datang ke kantor Pak Benny untuk urus pajak. Pak Benny

suruh stafnya untuk hitung dan dibayarkan (tagihan pajak)," ujar Agus. Agus juga baru mengetahui bahwa sudah ada nomor Single Investor Identification (SID) atas namanya. SID merupakan kode tunggal dan khusus yang digunakan untuk pemohon dan atau pihak lain berdasarkan perjanjian yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek.

"Saudara saksi pernah buka rekening efek sendiri?" tanya tim JPU. "Enggak pernah. Tapi ada nomor SID-nya," jawab Agus. "Pak Benny pernah sampaikan gunakan identitas Anda untuk pembukaan rekening?" tanya tim penasihat hukum Benny. "Hanya bilang untuk bantu usaha Pak

ketua DPRD DKI Jakarta merupakan hal biasa. Menurut Riza, semua proses anggaran dibahas Pemprov DKI bersama DPRD, sehingga dalam pemeriksaan ini legislatif akan memberikan fakta dan data kepada penyidik KPK. Riza menegaskan, Pemprov DKI juga berupaya maksimal dalam hal perencanaan dan penggunaan anggaran agar sesuai peraturan. Hasilnya, DKI Jakarta empat kali mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pertanggungjawaban keuangan daerah. Mudah-mudahan ke depan tahun 2022 ini dapat kelima kalinya. Itu menunjukkan, DKI memiliki komitmen dan dapat membuktikan, mengimplementasikan bentuk pelaporan penggunaan dan perencanaan anggaran dengan baik," kata Riza.

■ ed bali ramadhan

UNGKAP KASUS

Petugas bersenjata berjaga di dekat dua tersangka yang dihadirkan saat konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di kantor BNN Provinsi Bali, Denpasar, Bali, Selasa (8/2). BNN Provinsi Bali melakukan pengungkapan kasus dengan menangkap tiga orang yang berperan sebagai bandar dan kurir serta mengamanakan barang bukti berupa sabu dengan jumlah total 1,04,69 kg.



NYOMAN HENDRA WIDYADANTARA

Tokoh Nasional Galang Petisi Tolak IKN

Petisi penolakan IKN digalang lewat change.org oleh 45 tokoh nasional.

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO, DESSY SUCIATI SAPUTRI

JAKARTA — Penolakan terhadap rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan terus bermunculan. Kali ini, penolakan tersebut muncul lewat petisi berjudul 'Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibu Kota Negara'.

Petisi tersebut diinisiasi oleh sebanyak 45 tokoh dan digalang melalui situs change.org. Dalam keterangannya, para inisiator menilai, pemindahan ibu kota tersebut tidak tepat di tengah situasi pandemi.

"Apalagi, kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan ibu kota negara. Terlebih, saat ini, pemerintah harus fokus menanggapi varian baru omikron yang membutuhkan dana besar dari APBN dan PEN," bunyi keterangan petisi tersebut.

Selain itu, para inisiator juga mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan dengan baik rencana pemindahan ibu kota negara. Sebab, saat ini, Indonesia memiliki utang luar negeri yang besar, defisit APBN besar di atas tiga persen, dan pendapatan negara yang turun.

"Adalah sangat bijak bila Presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut. Sementara, infrastruktur dasar lainnya di beberapa daerah masih buruk, sekolah rusak telantar, dan beberapa jembatan desa terabaikan tidak terpelihara," bunyi petisi tersebut.

Selain itu, para inisiator juga mengangap proyek pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru tidak akan memberi manfaat bagi rakyat secara keseluruhan. Bahkan, cenderung hanya menguntungkan segelintir orang. Karena itu, mereka menganggap, pemindahan ibu kota negara merupakan bentuk kebijakan yang tidak berpihak kepada publik secara luas melainkan hanya kepada penyelenggara proyek pembangunan tersebut.

Selain itu, penyusunan naskah akademik tentang pembangunan ibu kota negara baru juga dinilai tidak disusun secara komprehensif dan partisipatif, terutama dampak lingkungan dan daya dukung pembiasaan serta keadaan geologi dan situasi strategis di tengah pandemi. Sedangkan, lokasi yang dipilih berpotensi menghapus pertanggungjawaban kerusakan yang disebabkan para pengelola tambang batu bara. "Tercatat, ada sebanyak 73,584

hektare konsesi tambang batu bara di wilayah IKN yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanyaan besar publik adalah benarkah kepentingan pemindahan ibu kota baru adalah untuk kepentingan publik," tulis petisi tersebut.

"Kami memandang, saat ini bukanlah waktu yang tepat memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kami mengagaskan segenap anak bangsa yang peduli akan masa depan bangsa dan kedaulatan bangsa untuk menandatangani di change.org," bunyi akhir petisi itu.

Hingga berita ini ditulis, tercatat sudah hampir 18 ribu yang menandatangani petisi tersebut. Adapun, sejumlah inisiator petisi tersebut, antara lain, mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muodaddas, pakar ekonomi Faisal Basri, mantan ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, hingga guru besar UIN Syarif Hidayatullah Azymardani Azza.

Salah satu penandatangan petisi, Din Syamsuddin, mengatakan, bakal mengajukan gugatan terhadap UU IKN. Gugatan akan ia ajukan setelah UU IKN resmi ditandatangani Presiden.

"Menunggu UU diundangkan (ditandatangani Presiden dan masuk ke Lembaran Negara)," kata Din kepada *Republika*, Selasa (8/2).

Den mengemukakan, dirinya juga ikut menekan petisi penolakan pemindahan UU IKN bersama 44 tokoh lain. Namun, Din enggan menjelaskan

kan saat ditanya harapan dari adanya petisi tersebut.

"Nanti pada waktunya (setelah pengujian permohonan JR diajukan ke MK)," ujarnya.

Menanggapi petisi penolakan IKN, Wakil Ketua DPR, Sufrmi Dasco Ahmad, tak mempersoalkan hal tersebut.

"Ya kalau menurut saya apa pun itu pendapat itu untuk mengutarakan pendapat dan dijamin keabsahannya oleh konstitusi kita. Oleh karena itu, baik langsung atau melalui website itu dijamin keabsahannya," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/2).

Menurut Dasco, kemunculan penolakan tersebut bisa menjadi tolak ukur berapa banyak yang tidak setuju terhadap pemindahan ibu kota negara. Selain itu, dirinya juga meminta pemerintah untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada publik terkait rencana pemindahan ibu kota negara tersebut.

Dirinya juga tak mempersoalkan terkait adanya pihak yang mengajukan gugatan terhadap UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, menurutnya, hal tersebut merupakan langkah konstitusional yang bisa ditempuh oleh warga negara yang tidak puas terhadap sebuah produk undang. ■ ed andri saubani



Prasetyo Curigai Penganggaran Formula E

Prasetyo memang tidak menyangka, ada masalah terkait penganggaran Formula E tersebut. Dia menilai, ajal balapan mobil listrik itu memang terlalu dipaksakan untuk digelar. Terlebih, Indonesia saat ini tengah dihantam pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Lembaga antirasuah itu menyebut, telah menerima keterangan dan klarifikasi sejumlah pihak terkait dugaan korupsi tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengungkapkan bahwa lembaga antikorupsi pernah memeriksa atau pihak lain berdasarkan perjanjian yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek.

"Saudara saksi pernah buka rekening efek sendiri?" tanya tim JPU. "Enggak pernah. Tapi ada nomor SID-nya," jawab Agus. "Pak Benny pernah sampaikan gunakan identitas Anda untuk pembukaan rekening?" tanya tim penasihat hukum Benny. "Hanya bilang untuk bantu usaha Pak

Prasetyo memang tidak menyangka, ada masalah terkait penganggaran Formula E tersebut. Dia menilai, ajal balapan mobil listrik itu memang terlalu dipaksakan untuk digelar. Terlebih, Indonesia saat ini tengah dihantam pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Lembaga antirasuah itu menyebut, telah menerima keterangan dan klarifikasi sejumlah pihak terkait dugaan korupsi tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengungkapkan bahwa lembaga antikorupsi pernah memeriksa atau pihak lain berdasarkan perjanjian yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek.

"Saudara saksi pernah buka rekening efek sendiri?" tanya tim JPU. "Enggak pernah. Tapi ada nomor SID-nya," jawab Agus. "Pak Benny pernah sampaikan gunakan identitas Anda untuk pembukaan rekening?" tanya tim penasihat hukum Benny. "Hanya bilang untuk bantu usaha Pak

Prasetyo memang tidak menyangka, ada masalah terkait penganggaran Formula E tersebut. Dia menilai, ajal balapan mobil listrik itu memang terlalu dipaksakan untuk digelar. Terlebih, Indonesia saat ini tengah dihantam pandemi Covid-19.

Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, KPK meminta keterangan kepada Prasetyo selaku

ketua DPRD DKI Jakarta merupakan hal biasa. Menurut Riza, semua proses anggaran dibahas Pemprov DKI bersama DPRD, sehingga dalam pemeriksaan ini legislatif akan memberikan fakta dan data kepada penyidik KPK. Riza menegaskan, Pemprov DKI juga berupaya maksimal dalam hal perencanaan dan penggunaan anggaran agar sesuai peraturan. Hasilnya, DKI Jakarta empat kali mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pertanggungjawaban keuangan daerah. Mudah-mudahan ke depan tahun 2022 ini dapat kelima kalinya. Itu menunjukkan, DKI memiliki komitmen dan dapat membuktikan, mengimplementasikan bentuk pelaporan penggunaan dan perencanaan anggaran dengan baik," kata Riza.

■ ed bali ramadhan

Saksi Punya Transaksi Efek Seusai Imbalan dari Benny Tjokro

■ OLEH RIZKY SURYANDIKA

Agus Hendro Cahyono hadir sebagai saksi dalam sidang anjutan dugaan korupsi PT ASABRI dengan terdakwa Benny Tjokrosaputra pada Selasa (8/2). Agus mengungkapkan, pernah dimintai uang hingga Rp 10 juta untuk menyerahkan dokumen pribadinya kepada Benny. Dalam sidang ini, Agus mengaku, mengenal dan punya hubungan keluarga dengan Benny. Okky Irwina Savitri yang merupakan istri Benny ternyata juga sepupu Agus. Selama ini, komunikasi yang terjalin hanya antara Agus dan Okky tanpa melibatkan Benny. Agus menceritakan, pernah ditawarkan Okky untuk membantu usaha

Benny. Ia mengetahui Benny sebagai pebisnis sehingga tak ragu. Apalagi, ia dimintai uang bila membantu Benny. "Saya diminta KTP, NPWP. Saya berikan fotokopinya ke mbu Okky. Saya dijanjikan imbalan Rp 10 juta. Bilangnya uang terima kasih," kata Agus dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Walaupun demikian, Agus tak pernah mendapat informasi jelas mengenai bisnis yang dijalankan Benny dari bantuannya itu. Ia hanya mengetahui Benny pernah berbisnis batu bara tanpa sempat mengonfirmasinya langsung. "Item usahanya apa enggak bilang," lanjut Agus. Rasa heran baru dialaminya ketika

suruh stafnya untuk hitung dan dibayarkan (tagihan pajak)," ujar Agus. Agus juga baru mengetahui bahwa sudah ada nomor Single Investor Identification (SID) atas namanya. SID merupakan kode tunggal dan khusus yang digunakan untuk pemohon dan atau pihak lain berdasarkan perjanjian yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek.

Benny. Pajak yang timbul dari transaksi itu dibayarkan Pak Benny," jawab Agus. Sementara itu, Benny tak banyak menanggapi kesaksian Agus. Ia hanya merespons kesaksian Agus mengenai lini bisnisnya.

"Tidak ada pertanyaan. Saya agak bingung dibilang pengusaha batu bara. Saya ada tambang batu bara satu, tapi nggak produksi," kata Benny. Diketahui, Benny Tjokrosaputra belum diuji tuntas dalam kasus korupsi PT ASABRI. Namun, sebelumnya, ia diuji tuntas namun penjara seumur hidup dalam perkara korupsi PT Jiwarsaya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,807 triliun. Benny juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 6 triliun. ■ ed andri saubani



PENJUALAN KRI Wakil Ketua Komisi I Anton Sukartono Suratto (kiri) menyerahkan hasil pandangan Komisi I terkait penjualan barang milik negara berupa kapal eks KRI Teluk Mandar-514 dan KRI Teluk Peny-513 pada Kementerian Pertahanan kepada Wakil Ketua DPR Suifri Dasco Ahmad (terang) saat Rapat Paripurna ke-14 DPR Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/2). Dalam rapat paripurna tersebut DPR juga tidak menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Pelapor Arteria Dipanggil untuk Pemberitahuan Penyetopan Kasus

■ ALI MANSUR

JAKARTA — Kabinet Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan membantah pihak-pihak yang menyalahkan Arteria Dahlan untuk melakukan pemeriksaan. Justri, kata dia, undangan tersebut untuk memberikan penjelasan terkait tidak dilanjutkannya kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Arteria.

"Penyidik akan menyampaikan ulang kepada mereka secara langsung di mana menurut penyidik terkait dengan kasus ini, terkait dengan pendapat ahli pidana, ahli bahasa," ujar Zulpan saat dikonfirmasi, Selasa (8/2).

Selain itu, kata Zulpan, pihaknya juga mengarahkan ke pelapor, yaitu Poros Nusantara, untuk melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Poros Nusantara sendiri telah memenuhi undangan penyidik terkait kasus Arteria Dahlan yang dibatalkan telah dibentengi karena tak memenuhi unsur pidana.

"Sehingga nanti diarahkan melaporkan kepada MKD," tutur Zulpan.

Poros Nusantara pun menyoroti tidak dilanjutkannya penyidikan laporannya terhadap Arteria. Penyidik Polda Metro Jaya sebelumnya beralasan memberhentikan kasus Arteria Dahlan karena tidak menemukan unsur pidana di dalamnya.

"Kami pikir apa yang dilakukan (penyidik) terlalu buru-buru, karena ini belum ada klarifikasi secara utuh dan juga sudah kami menggunakan hak konstitusi," ujar kuasa hukum Poros Nusantara, Suzana Febrianti Suzana, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (8/2).

Suzana melanjutkan, sementara fokus kepolisian adalah pidananya guna untuk membuktikan unsur tindak pidana. Kemudian, terkait hak imunitas yang dimiliki Arteria Dahlan sebagai anggota DPR RI merupakan ranah berbeda yang ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Adapun hak imunitas atau MKD adalah ranah yang berbeda, kami adalah pencari keadilan untuk memastikan pelaporan hukum yang kami laporkan," ucap Suzana.

Menurut Suzana, kliennya pada Selasa juga turut serta membawa barang bukti. Di antaranya sejumlah alat bukti dari pemberitaan. "Selain bukti-bukti yang kami dapat di media, ada beberapa bukti-bukti pembertan dan alat-alat bukti lainnya," tutur Suzana.

Sebelumnya, kasus Arteria Dahlan, terkait dengan ucapan yang dinilai 'menyasar' etnis Sunda, berawal pada saat rapat kerja (naker) Komisi III dengan Kejaksaan Agung (Kejakung). Dalam raker tersebut, Arteria Dahlan menyampaikan agar Jaksa Agung melarang Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda dalam setiap rapat.

Kemudian, pernyataan Arteria Dahlan tersebut mendapat kecaman oleh publik, khususnya masyarakat Jawa Barat. Akibatnya, Arteria dilaporkan oleh sejumlah organisasi ke Polda Jawa Barat oleh Majelis Adat Sunda pada Kamis (20/1). Lalu, kasus ini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya hingga diputuskan tidak dilanjutkan. ■ [edi andri saubani](#)

PKS Tolak Revisi UU PPP

PKS menilai perbaikan UU Cipta Kerja seharusnya bukan lewat revisi UU PPP.

■ NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang menolak ditetapkannya revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi usul inisiatif DPR. Alasannya, langkah tersebut bukanlah upaya untuk perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dimaksudkan semata-mata untuk memberikan payung hukum terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PKS Bukhori Yusuf dalam rapat paripurna DPR Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (8/2).

Fraksi PKS, kata Bukhori, berpendapat bahwa UU Cipta Kerja memiliki sejumlah poin permasalahan di dalamnya yang harus diperbaiki oleh DPR dan pemerintah. Bukan malah merevisi aturan terkait peraturan pembentukan perundang-undangan untuk memasukkan metode omnibus.

"Dengan diislahkannya perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi usul inisiatif DPR, Keputusan tersebut diambil dalam forum rapat paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.

"Apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dapat

litas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang-tindih peraturan perundang-undangan, baik dari sisi konten, muatan, maupun teknis penataannya.

"Berdasarkan pengalaman penyusunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan menggunakan metode omnibus, alih-alih mengear percepatan dan kepentingan penciptaan lapangan kerja, hal itu justru mengabaikan kualitas hasilnya karena kurangnya partisipasi dari masyarakat dan para stakeholder," ujar Bukhori.

“**UU Cipta Kerja memiliki sejumlah poin permasalahan di dalamnya yang harus diperbaiki.**

"Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak untuk dilakukan pengambil keputusan pada hari ini sebelum adanya perbaikan-perbaikan yang menjadi catatan penting PKPS," sambungannya.

Pada Selasa, DPR menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi usul inisiatif DPR. Keputusan tersebut diambil dalam forum rapat paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.

Badan Legislasi tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dapat

disetujui menjadi usul DPR RI?" ujar Wakil Ketua DPR RI Suifri Dasco Ahmad dijawab setuju oleh peserta rapat yang hadir, Selasa (8/2).

Sebelum rapat paripurna, Dasco menyatakan bahwa DPR menjalankan putusan MK terkait UU Cipta Kerja. Langkah pertama yang dilakukan adalah lewat revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (PPP).

"Kita akan lakukan sesuai dengan Mahkamah Konstitusi, tetapi mengenai hal-hal lain belum bisa saya sampaikan, karena itu nanti akan dibahas di Badan Legislasi," ujar Dasco.

la menjelaskan, revisi UU PPP dimaksudkan agar di dalamnya mengatur omnibus sebagai salah satu metode pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu agar nantinya proses penyelesaian tumpang-tindih undang-undang lewat metode omnibus tak dinyatakan lagi inkonstitusional oleh MK.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati 15 poin yang akan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam poin sembilan, nantinya akan ada perubahan di Pasal 73 dengan menambahkan ayat baru, yakni diibolekannya perbaikan salah ketik terhadap undang-undang yang sudah diislahkan.

"Yang mengatur mengenai mekanisme perbaikan teknis oleh Kementerian Sekretariat Negara dalam hal masih terdapat kesalahan ketik setelah RUU yang telah disetujui bersama disampaikan oleh DPR ke Presiden untuk diislahkan dan diundangkan," ujar Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi dalam rapat pleno RUU PPP, Senin (7/2). ■ [edi andri saubani](#)

Baca juga di [republikajugid](#) Pindai QR Code ini

Pemerintah Siapkan Banyak DIM RUU TPKS, DPR tak Masalah

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Suifri Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR akan menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dari pemerintah setidaknya pada Selasa (8/2). Namun, hingga berita ini diturunkan, *Republika* belum berhasil mendapatkan keterangan dari pihak Istana terkait hal ini.

"Kita dengar Selasa (disampaikan). Kalau Selasa disampaikan oleh pemerintah, kita langsung lakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR karena itu kemudian memang jadi perhatian publik dan tuntutan masyarakat dan DPR berkomitmen untuk mendukung itu," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/2).

Dasco menegaskan, DPR berkomitmen agar proses terhadap RUU TPKS tidak terlalu lama. Namun, diketahui sebentar lagi DPR akan memasuki masa reses

pada pertengahan Februari ini. "Karena begitu banyak saya dengar ada substansi dan DIM yang dikirim ke kita, kita tentu juga ingin membuat RUU TPKS ini dengan baik, kita mau hati-hati, dan juga ingin tepat sasaran," ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan RUU TPKS menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa

(18/1) lalu.

Sebelumnya, Tim Gugus Tugas (Gugas) percepatan RUU TPKS telah merumuskan 623 daftar inventarisasi masalah (DIM). Banyak substansi baru dalam DIM tersebut.

"Tentunya, DIM pemerintah ini masih butuh banyak masukan dari koalisi masyarakat sipil dan akademisi," kata Ketua tim gugus tugas RUU TPKS Eddy OS Harjedi dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, (4/2).

Namun, Yayasan Lembaga

Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan pembahasan DIM RUU TPKS tidak terbuka. Staf Bidang Riset dan Pengembangan Organisasi YLBHI Syaifrah Hardani dalam pernyataan tertulisnya mengatakan, pada 3 Februari 2022, Jaringan Masyarakat Sipil dan Akademisi, termasuk YLBHI, diundang oleh Gugus Tugas RUU TPKS yang dikoordinatori oleh Kepala Staf Kepresidenan untuk memberi masukan DIM RUU TPKS.

Namun, KSP disebut tidak menunjukkan dokumen ataupun tayangan presentasi sehingga dapat melihat poin-poin DIM yang disampaikan. "Para pemateri yang terdiri atas utusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kejaksaan Agung, dan Polri menyampaikan hal-hal yang ada di dalam DIM secara verbal sehingga sulit bagi kami untuk melihat satu per satu poin DIM yang telah disusun dua hari sebelumnya," kata Syaifrah.

■ [antara](#) ■ [edi andri saubani](#)



Selamat dan Sukses

HARI PERS NASIONAL

TAHUN 2022

Kendari, 6-9 Februari 2022

OPTIMIS

JATIM BANGKIT



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Gubernur Jawa Timur



EMIL ELESTIANTO DARDAK
Wakil Gubernur Jawa Timur

Demi Memorabilia Langka

OLEH DWINA AGUSTIN

Demi memorabilia langka, orang rela antri di tengah udara musim dingin. Bahkan, pada malam hari suhu bisa di bawah nol derajat Celsius.

Memorabilia yang diburu adalah maskot dan barang lain terkait Olimpiade Musim Dingin yang digelar di Cina. Foto menunjukkan orang-orang muncul dengan bangku, rela menunggu semalaman saat suhu beku di sebuah penjualan memorabilia di Beijing, Cina, Senin (7/2).

Pada sore hari, sekitar 40 pelanggan sudah mengantre. Karyawan dengan pengeras suara mendesak mereka untuk tidak mengingap, ketika suhu diperkirakan turun hingga minus-6 derajat Celsius.

Pencarian paling sulit terutama untuk memiliki versi boneka maskot Bing Dwen Dwen, seekor panda dalam mantel musim dingin. Beberapa orang adalah pengantar bayaran.

Menurut seorang warga bernama Dong, mantan Bing Dwen Dwen habis dalam 30 menit. Dia tiba 30 menit sebelum toko dibuka, tapi gagal mendapatkannya. *Map ed: yeyen rostyani*



AND WENJIP

KILAS

WFP: 13 Juta Warga Tanduk Afrika Terancam Kelaparan

KAMPALA — Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan, kekerasan mendorong sekitar 13 juta jiwa di Tanduk Afrika berada di ambang kelaparan. Masyarakat di Somalia, Ethiopia, dan Kenya mengalami kekerasan terburuk sejak 1981.

Lembaga PBB itu mendesak bantuan untuk mencegah krisis kemanusiaan terburuk. Kekeringan berdampak pada masyarakat untuk mengambil air dan petani di seluruh selatan dan tenggara Ethiopia, tenggara, dan utara Kenya dan selatan-tengah Somalia.

Angka malnutrisi juga tinggi di kawasan tersebut. WFP mengatakan, mereka memerlukan 327 juta dolar AS untuk 4,5 juta orang sangat membutuhkan selama enam bulan ke depan dan membantu masyarakat agar lebih tahan pada perubahan iklim ekstrem.

"Kegagalan musim hujan tiga kali berturut-turut merusak tanaman dan menyebabkan kematian hewan ternak yang sangat tinggi," kata WFP dalam pernyataannya, Selasa (8/2).

"Kekurangan air dan pasokan rumput memaksa keluarga-keluarga pindah dari rumah mereka dan meningkatkan konflik di antara masyarakat," tambah lembaga itu.

Curah hujan diprediksi akan terus memburuk selama beberapa bulan ke depan. Organisasi PBB yang lain juga sudah mengingatkan kerentanan kawasan itu diperburuk kekerasan kelompok bersenjata yang sporadis.

Awal Februari lalu, Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) mengatakan, lebih dari 6 juta orang di Ethiopia membutuhkan bantuan kemanusiaan pada pertengahan Maret. Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat Somalia mengatakan, lebih dari 7 juta orang di negara itu membutuhkan pertolongan. *■ ap/antar satria ed: yeyen rostyani*

Macron: Rusia dan Ukraina Hormati Protokol Minsk

Putin mengisyaratkan kesediaannya untuk melanjutkan perundingan.

YEYEN ROSTYANI

KIEV — Presiden Prancis Emmanuel Macron, Selasa (8/2), mengedukai Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berkomitmen untuk menghormati Protokol Minsk. Ini disimpulkan Macron setelah bertemu dengan kedua pemimpin tersebut.

"Kita kita memiliki kemungkinan ada perundingan yang lebih maju," kata Macron kepada Zelenskyy, saat konferensi pers bersama di Kiev.

Macron terbang ke Kiev setelah pada Senin mengunjungi Moskow. Di Moskow, Macron sempat berdiskusi dengan Putin selama lebih dari lima jam.

Protokol Minsk adalah serangkaian kesepakatan yang ditandatangani 2014 dan 2015 oleh pemimpin Ukraina, Rusia, Prancis, dan Jerman. Protokol itu diteken sebagai tanggapan atas aneksasi Rusia atas Crimea. Protokol tersebut juga menyebutkan upaya mengakhiri perang separatist

di Donbass, Ukraina timur.

Sebelumnya, Macron mengakui, tak ada terobosan dari pertemuan dengan Putin, Senin (7/2). Namun, Macron mengatakan, ia yakin bahwa "tidak ada kemunduran dan tidak ada juga eskalasi."

Menurut Macron, tujuannya bertemu Putin adalah "Untuk mencegah eskalasi dan untuk membuat perspektif baru. Tujuan itu telah tercapai."

Sedangkan, Putin menggambarkan pertemuan dengan Macron "bermanfaat", substantif, dan resmi. Ia menyebut, sejumlah gagasan Macron bisa menjadi dasar bagi langkah lebih jauh.

"Sejumlah ide dan proposal yang mungkin terlahir di sini disebutkan, menurut saya semua itu mungkin untuk menjadi dasar bagi langkah bersama selanjutnya," ujar Putin, Senin.

"Kami telah sepakat bahwa usai perjalanan beliau ke ibu kota Ukraina, kami akan saling berhubungan kem-

balikan dan bertukar pandangan mengenai hal ini," katanya menambahkan.

Usai pertemuannya dengan Macron, Putin mengatakan, Amerika Serikat (AS) dan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengabaikan tuntutan Rusia. Namun, Putin mengisyaratkan kesiapannya untuk terus berunding.

Rusia menuntut NATO dan pemimpinnya, AS, menolak permohonan Ukraina untuk menjadi anggota NATO. Rusia juga meminta NATO dan AS menarik kekuatannya dari Eropa Timur.

Rusia menempatkan lebih dari 100 ribu personel militernya di dekat Ukraina. Zelenskyy khawatir bahwa Rusia bisa menginvasi negaranya. Rusia memangku dugaan itu.

Namun, Barat juga mulai mengerahkan kekuatannya ke Eropa Timur, kian mendekati Ukraina. Mengingat ini, Putin mengingatkan, negara-negara Eropa akan tertarik ke dalam konflik militer dengan Rusia dan "tak akan ada pemenangnya".

Rusia mengatakan, penguasaan kekuatan adalah bagian dari latihan militer bersama Belarus. Namun, mereka tidak menyatakan kapan pasukan Rusia akan meninggalkan Belarus jika latihan usai.

Putin hanya mengatakan, pada suatu saat pasukannya akan kembali ke pangkalan militer di Rusia. Namun, kata Putin, "Tak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa mereka akan tetap di sana."

Pada Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, ada enam kapal induk dikerahkan dari Mediterania untuk menuju Laut Hitam. Pengerahan itu terkait latihan militer bersama Belarus.

Ukraina memiliki sejarah kelam dengan Rusia. Salah satunya, pada 2014 Rusia menganeksasi Crimea yang ada di wilayah Ukraina timur.

Sementara itu, Presiden AS Joe Biden memperingatkan, AS akan memblokir pipa gas Nord Stream 2 yang menghubungkan Rusia dan Jerman. Langkah itu akan dilakukannya, "jika Rusia menginvasi, artinya tank dan pasukan akan melintas perbatasan Ukraina lagi."

Pipa gas tersebut sudah selesai pembangunannya. Namun, hingga kini belum beroperasi.

Rusia adalah pemasok energi terbesar bagi Eropa. Terlokalisasi pipa itu akan menghantam perekonomian Rusia, sekaligus mengurangi suplai energi bagi Jerman. *■ Reuters/ap*

Israel Siapkan Sistem Pertahanan Berbasis Laser

TEL AVIV — Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan, Israel akan memiliki teknologi penghalang canggih dalam satu tahun. Sistem pertahanan terbaru akan mempertahankan negara itu seperti dinding laser.

"Ini akan melindungi kami, dalam jangka panjang dan menengah untuk melindungi Israel dengan dinding laser untuk mempertahankan kami dari rudal, roket, UAV [pesawat tanpa awak] dan ancaman lainnya yang pada dasarnya akan mengambil kartu terkuat musuh-musuh kami," kata Bennett seperti dikutip *the Defence Post*, Senin (7/2).

Israel akan mulai menggunakan sistem senjata itu pada 2023. Pada Juli tahun lalu teknologi penghalang rudal yang dipasang di pesawat ringan berbasis penghalang drone dari jarak 1 kilometer.

Namun, Kementerian Pertahanan Israel berniat membangun laser dengan kekuatan 100 kilowatt yang dapat mendeteksi pesawat tanpa awak dari jarak 20 kilometer. Bennett juga mengatakan, Israel akan menawarkan teknologi laser pada sekutunya di kawasan.

Israel sudah memiliki tiga sistem pertahanan, yakni Iron Dome, David Sling, dan Arrow. Masing-masing memberikan pertahanan terhadap roket dan rudal dengan ukuran dan jarak yang berbeda.

Iron Dome yang paling terkenal dikerahkan untuk mempertahankan Israel dari roket asal Gaza. Sistem pertahanan itu efektif dan dapat dikerahkan dalam misi bergerak.

Iron Dome juga dapat beroperasi di segala macam cuaca. Sistem pertahanan itu dapat menghalau rudal sejauh 70 kilometer dan ditempatkan di daerah strategis untuk mengurangi kerusakan. *■ linter satria ed: yeyen rostyani*

Di Udupi, Mereka Dilarang Berhijab

OLEH LINTAR SATRIA

Kampus negeri khusus perempuan di Distrik Udipi, selatan Negara Bagian Karnataka, India, akhir-akhir ini kerap didatangi awak media. Rupanya, kisah sejumlah mahasiswa berhijab menarik perhatian media.

Para mahasiswa itu mendirikan tenda sebagai tanda protes atas larangan berhijab di kampus mereka. Aksi ini sudah berlangsung sekitar sebulan. Kisah mereka segera menyebar di internet dan mendorong media mengurusi mereka.

Pada Senin (7/2), ratusan mahasiswa termasuk orang tua mereka turun ke jalan, mengabaikan peraturan Covid-19. Mahasiswa dan wali mereka menuntut agar mahasiswa yang mengenakan hijab diizinkan belajar di kelas. Namun, staf kampus yang mengabaikan para mahasiswa melanggar peraturan seragam, tetap bergeming.

Dalam satu bulan terakhir, semakin banyak sekolah menerapkan seragam serupa pada hijab. Pengadilan akan mendengar petisi yang diajukan para siswa yang berunjuk rasa dan akan memutuskan apakah mencabut larangan tersebut atau tidak.

"Yang kami saksikan merupakan bentuk apartheid agama, dekret ini diskriminasi dan berlaku dengan tidak adil pada Muslimah," kata seorang siswa berusia 18 tahun yang ikut berunjuk rasa, Ahi Almas, Selasa (8/2).

Sejumlah pertemuan antara staf sekolah, perwakilan pemerintah, dan murid gagal menyelesaikan masalah ini. Menteri Pendidikan Negara Bagian Karnataka, BC Nagesh, juga menolak mencabut larangan itu.

"Mereka yang menolak mengikuti peraturan seragam dapat mengeksplorasi pilihan lain," katanya pada wartawan *India Today*.



● Mahasiswa yang dilarang memasuki kelas mereka karena berhijab, sedang berbicara dengan kepala sekolah di kampus mereka di Udupi, India, Jumat (4/2).

populasinya Muslim. Negeri itu tidak pernah melarang atau membatasi pemakaian hijab di ruang publik. Banyak perempuan Muslim di India yang memakai hijab di jalan.

Namun, debat soal penutup kepala memiliki bias. Sejumlah aktivis khawatir, larangan berhijab di sekolah meningkatkan Islamofobia. Akibat, kekerasan dan kebencian terhadap Muslim di India meningkat pesat selama pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dari partai berkuasa, Bharatiya Janata Party (BJP).

"Memilih hijab untuk dikirim itu tidak adil dan diskriminatif," kata pendiri kelompok wanita Muslim, Bharatiya Muslim Mahila Andolan, Zakia Soman.

Aktivis lain menilai, Modi dan partai nasionalis Hindu-nya perlahan-lahan semakin mengisolasi dan memarginalisasi Muslim. Kegelisahan

yang sudah lama dirasakan komunitas Muslim India, negara multikultural yang menjamin kebebasan beragama di konstitusinya.

Kebijakan antihijab memicu kecaman dari masyarakat secara daring. Tagar #HijabIsOurRight menyebar di media sosial, tapi juga dapat pertentangan balik.

Pekan lalu, seorang murid Hindu di Karnataka memakai selendang berwarna kunyit, simbol kelompok nasionalis Hindu. Mereka juga mengucapakan puja-puja pada dewa dengan keran. Sambil memprotes pilihan siswa Muslim yang memakai hijab.

Pertiswanya tersebut mendorong pemerintah negara bagian untuk melarang pakaian yang dianggap "mengganggu kesetaraan, integritas dan ketertarikan umum". Sejumlah sekolah menengah mengumumkan hari libur untuk menghindari bentrokan massa. *■ ap ed: yeyen rostyani*

Hong Kong Kekurangan Sayuran karena Covid-19

RIZKY JARAMAYA, KAMARAN DIKARMA

HONG KONG — Hong Kong kekurangan pasokan sayuran karena dampak pandemi Covid-19. Para pembeli pada Selasa (8/2) berebut sayuran yang jumlahnya semakin menipis akibat penurunan pengiriman produk segar dari Cina daratan.

Pada Selasa pagi, toko sayur Qiantana di pasar Wan Chai, membatasi jumlah pembeli. Sementara itu, pembeli berupaya untuk mendorong masuk ke dalam toko.

"Tidak ada lagi sayuran di dalam. Ini seperti medan perang," kata staf toko tersebut.

Beberapa kios sayur dan buah yang menjual produk Cina daratan tutup. Sementara itu, yang lain menjual produk dengan harga dua kali lipat dari biasanya. Raks-raks penyimpanan sayuran di sebagian besar supermarket tampak kosong. Maka itu, warga membanjiri pasar segar untuk membeli produk terbaru yang masih tersedia.

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan, pengiriman sayuran dari seberang perbatasan menurun akibat pengemudi truk yang positif Covid-19. "Untuk saat ini, opsi terbaik adalah mematuhi strategi lockdown yang digunakan oleh Cina daratan untuk menekan semua wabah virus korona," ujar Lam.

Fasilitas karantina pemerintah telah mendekati jumlah maksimum karena pihak berwenang berupaya untuk mengikuti siklus pelacakan kontak. I. Surat kabar resmi Partai Komunis Cina, *People's Daily*, telah mendorong Hong Kong untuk mengikuti pendekatan Cina dalam

mengatasi virus korona.

Kebijakan ketat Covid-19 di Hong Kong telah mengubah kawasan pusat keuangan itu menjadi salah satu kota besar paling terisolasi di dunia. Aturan pembatasan yang ketat berdampak pada perekonomian dan pariwisata.

Tak hanya omikron

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan, pandemi Covid-19 tidak akan berakhir dengan varian omikron. Dia memperingatkan, Selandia Baru harus mempersiapkan diri menghadapi lebih banyak varian Covid-19 tahun ini.

"Menurut para ahli, omikron tidak akan menjadi varian terakhir yang akan kita hadapi tahun ini," kata Ardern saat berbicara di parlemen Selandia Baru, Selasa.

Dia menekankan pandemi Covid-19 belum akan berakhir. "Tapi, bukan berarti kita tidak bisa bergerak maju dan terus membuat kemajuan," ucap Ardern.

Peringatan Ardern itu muncul saat ratusan warga Selandia Baru menggelar demonstrasi di luar gedung parlemen. Mereka menuntut pemerintah mengakhiri pembatasan sosial dan mencabut kewajiban vaksinasi Covid-19. Pemerintah Ardern memang telah menerapkan beberapa pembatasan sosial terkait selama dua tahun terakhir. Hal itu merupakan upaya agar kasus Covid-19 di sana dapat benar-benar dikendalikan. Selandia Baru dinilai sebagai salah satu negara yang berhasil mengendalikan atau menangani wabah Covid-19. *■ Reuters ed: yeyen rostyani*

TAJUK

Pers yang Mencerahkan

"Pers adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan peningkatan kualitas manusia sebagai makhluk rasional, moral, dan sosial." Kalimat di atas dikutip dari Thomas Jefferson. Dia adalah presiden ketiga Amerika Serikat, yang menjabat dari tahun 1801 hingga 1809. Jefferson adalah pencetus Deklarasi Kemerdekaan (1776) dan bapak pendiri Amerika Serikat. Dia merupakan juru bicara demokrasi, memeluk prinsip-prinsip Republikanisme, dan hak-hak manusia dengan pengaruh di seluruh dunia.

Pers pada dalam demokrasi memang sangat penting. Dengan pers seperti kata Jefferson, kualitas manusia akan meningkat. Pers menjadi pencerah. Bahkan, kehadirannya dianggap sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Hari ini insan pers Indonesia memperingati Hari Pers Nasional Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengungkapkan, ada sekitar 40 rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN), di antaranya konvensi media massa pada 7 dan 8 Februari 2022, seminar pariwisata bangkit, seminar energi dan pertambangan, seminar moneter dan fiskal, *workshop* pendidikan jurnalistik. Diskusi Amneger Jurnalistik Adinergo, Klinik Penulisan Kebudayaan, dan bakti sosial. Seluruh kegiatan sebagian besar akan dipusatkan di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Selain kegiatan seremonial, peringatan Hari Pers adalah saat yang tepat bagi seluruh insan pers kembali pada diri dirinya. Menjadi pers yang mencerahkan sehingga kehadirannya mampu meningkatkan kualitas manusia seperti yang pernah diucapkan Jefferson.

Hari-hari ini pers Indonesia menghadapi tantangan berat, bukan hanya menjaga kualitas konten dan independensinya, melainkan juga bertahan di tengah situasi yang serba tak menentu. Namun, di tengah segala kesulitan, pers Indonesia tetap punya tanggung jawab menghadirkan informasi yang memiliki kualitas, mencerahkan, mendidik, dalam bingkai persatuan.

Dalam webinar pada rangkaian HPN kemarin, Forum Pemimpin Redaksi (pemred) Indonesia mendeklarasikan tekadnya untuk menciptakan jurnalisme yang berkualitas atau *good journalism*. Poin pertama dari deklarasi tersebut, yakni para pemred bertekad untuk mewujudkan *good journalism* dengan memegang teguh kode etik jurnalistik dan meninggalkan perilaku tercela yang kian marak saat ini, seperti melakukan pelanggaran *copyright*, *clickbait* atau judul bombastis yang mengelabui publik.

Kedua, *good journalism* dengan menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan pers. Ketiga, mewujudkan *good journalism* dengan menciptakan ekosistem media yang lebih sehat dan baik, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. *Good journalism* menjadi isu yang menarik untuk diangkat, mengingat dengan perkembangan media sosial saat ini, pers menjadi seolah terganggu. Prinsip-prinsip jurnalistik mulai luntur. Sebagian terpaksa mengikuti arus untuk sekadar bertahan.

Peringatan HPN ini menjadi momentum bagi insan pers untuk kembali pada *good journalism*. Tentu saja tidak kembali pada *good journalism* tak berhenti pada Forum Pemred. Semua insan pers, mulai dari reporter hingga pemimpin redaksi punya tanggung jawab untuk itu.

Saatnya pers kembali kepada jurnalisme yang bermanfaat, jurnalisme yang mencerahkan, dan jurnalisme yang meningkatkan kualitas umat manusia. ■

SUARAPUBLIKA

Kebijakan Ambigu Mengorbankan Generasi

Miris, Pemprov DKI memberlakukan kebijakan pembelajaran tetap muka (PTM) terbatas di ibu kota tetap bergulir di tengah lonjakan kasus Covid-19. Pihaknya mengklaim, kebijakan Pemprov DKI tetap lurus dengan keputusan pemerintah pusat (6/2). Lalu belakngan PTM terbatas ini tetap dilaksanakan karena sektor lainnya tetap dibuka oleh pemerintah daerah secara maksimal, maka diharapkan, PTM terbatas dapat diperlakukan sama karena pendidik memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya.

Hal ini menuai protes dari orang tua karena menilai kurang tepat untuk pembelajaran siswa, mengapa tidak diberlakukan 100 persen saja dengan syarat protokol prokes 7 merspons desakan para orang tua. Kemudian kedua memberikan pilihan kepada orang tua untuk memilih PU atau mengikuti PTM terbatas. Sayangnya, pemerintah mengijil ulang kebijakan yang diberlakukan agar tidak menimbulkan ambiguitas serta merugikan pihak-pihak terkait, terutama generasi sebagai sasaran dari kebijakan ini.

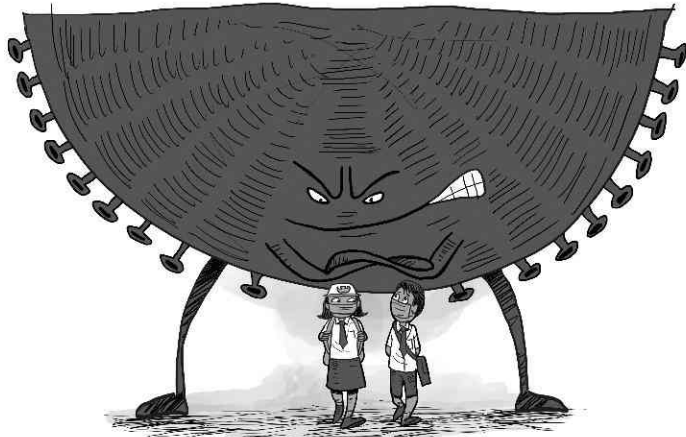
Ashani Ashri, ST-GZ, Jakarta Timur

Learning Loss Akibat Pandemi

Covid-19 di Indonesia memasuki gelombang ketiga. Sayangnya, pengambil kebijakan tidak mengantisipasi adanya belajar dari dua gelombang sebelumnya. Tidak ada karantina ketat terhadap pelaku perjalanan luar negeri, dengan alasan demi perputaran ekonomi.

Sekarang kita melihat, kasus kluster sekolah dan keluarga sudah meledak di mana-mana. Pendidikan yang seharusnya dilakukan dengan metode tetap muka, jadi terhambat lagi. Kesalahannya bukan pada berapa persen PTM harus dilakukan, tetapi seberapa tegas para pejabat negeri untuk mengkarantina setiap kasus yang ditemukan. Gara-gara salah tangani pandemi, negeri ini berada diambang learning loss.

Ani Pramudita, Slemang, Di Yogyakarta



Membangun Ibu Kota Negara Berkeadilan

DIDIN S DAMANHURI Guru Besar Ekonomi Politik Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB

Ibu Kota Negara di era modern tak melulu bicara gedung-gedung, istana, pusat pemerintahan dan bisnis

Bung Karno sudah berimajinasi bahwa ibu kota negara (IKN) adalah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kalimantan dinilai sebagai wilayah bebas gempa. Tapi waktu itu, belum terbayangkan bahwa Kalimantan akan jadi wilayah Hutan Tanaman Industri (HTI), dengan pembangunan besar-besaran industri *plywood* zaman Orde Baru dan perkebunan sawit juga pertambahan batu bara pada era Reformasi. Ini semua yang menjelaskan terjadinya deforestasi sehingga hutan Kalimantan tinggal 15 persen yang berfungsi.

Pak Harto malah sudah menyalipkan Putera Jaya di Malaysia 25 km dari Kuala Lumpur. Meski yang dipindahkan ternyata hanya ibu kota pemerintahannya.

Sementara itu, Myanmar memindahkan IKN dari Rangoon ke Naypyidaw (sekitar tiga jam penerbangan dari Rangoon) dengan minim partisipasi publik dan hanya ambisi Presiden Than Shwe yang Juanta Militer. Akhirnya, Naypyidaw menjadi IKN yang sepi karena tak ada hunian penduduk dan tidak berkembang sebagai ibu kota.

Pengembangan IKN di dunia sebenarnya tidak selalu berupa pemindahan IKN lama ke wilayah IKN baru. Pemindahan IKN diwujudkan, antara lain di AS (New York ke Washington), Australia (Melbourne ke Canberra), Rusia (dari Saint Petersburg ke Moscow), Turki (Istanbul ke Ankara), Brasil (dari Brasília ke São Paulo). Yang dinilai tak berhasil adalah terutama di Myanmar.

Pak Jokowi dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran telah memperbaiki indeks logistik dan ditunjukkan untuk menarik investasi, yang selama ini struktur PDB sekitar 59 persen berasal dari konsumsi masyarakat. Sementara investasi hanya sekitar 29 persen.

Tampaknya relatif berjalannya pembangunan infrastruktur tersebut, dijadikan modal untuk bertekad mewujudkan Infrastruktur fisik pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Dengan waktu hanya 43 hari, RIU IKN akhirnya disahkan DPR dan dianggarkan Rp 466 triliun (T) dengan alokasi APBN Rp 89 T, swasta Rp 123 T, dan KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) Rp 254 T.

Problem pembiayaan dan geopolitik

Pertanyaannya, problem pembiayaan dari swasta dan BUMN pada era pandemi ini apakah memungkinkan? Rasanya hampir mustahil, kecuali kalau insentifnya para pemodal swasta mendapatkan aset-aset di Jakarta. Tapi itu yang banyak ditentang publik. De-

ngan demikian, ada dua kemungkinan yang akan ditempuh pemerintah: Pertama, membekukan akhirnya kepada APBN, yang sebagian berasal dari Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh karena itu, yang menggalang IKN adalah Badan Otoritas tanpa DPR dan diangkat Presiden serta dianggap pembangunan sebagai objek investasi.

Namun, masalahnya mulai tahun 2023, IMF akan menghentikan bantuan B1 kepada APBN (*detik.com*). Problem yang lebih krusial lagi adalah utang pemerintah sekarang sudah mencapai Rp 6.713 T atau 44 persen PDB (*okezone.com*). Belum utang BUMN hampir Rp 3.000 T (*kontan.co.id*). Juga utang dalam negeri (Utang BLBI dan berbagai SUN, sukuk, dan lain-lain) lebih dari Rp 1.000 T. Jadi dengan rasio pajak sebelum pandemi hanya sekitar 1 persen dan pada era pandemi anjlok jadi sekitar 8 persen sehingga tahun 2020 pendapatan total negara hanya sekitar Rp 1.647,78 T. Dengan demikian, total beban utang sekitar Rp 770,58 T dengan *Debt Service Ratio* (DSR) sekitar 46,42 persen, jauh melebihi yang direkomendasikan IMF maksimal 35 persen. Dan total beban utang 2021 akan mencapai 866,23 T dengan DSR 49,91 persen. Sementara tahun 2022, total beban utang akan mencapai 955,85 T dengan DSR 51,93 persen (*legion-news.com*).

Dengan kemungkinan beban pembiayaan IKN dari APBN akan sangat menimbulkan penumpukan utang, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Maka itu, kalau tetap dipaksakan membangun IKN tanpa APBN, akhirnya menoleh ke investor luar negeri. Pengamat Faisal Basri menyatakan bahwa yang paling siap adalah berasal dari RRC seperti diakui seorang pejabat negara, investor itu siap dengan dana 100 miliar dolar AS.

Masalahnya, membangun IKN dengan ketergantungan kepada investor RRC, seperti dalam kasus kereta cepat, ternyata akhirnya kembali dibebankan kepada APBN. Lebih jauh, risiko Kaltim yang dengan pusat konflik AS vs RRC di Laut Cina Selatan, maka secara geopolitik dan keamanan menjadi sangat rawan.

Isu oligarki

Sebenarnya istilah oligarki bukan isu politik, melainkan sudah merupakan isu akademis. Adalah Jeffrey Winters seorang ahli yang banyak meneliti tentang oligarki di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat. Bahkan, dia mengemukakan indikator kuantitatif apa yang dinamakan *Material Power Index* (MPI) di sebuah negara yang mengukur 40 paling kaya dibandingkan PDB/kapita. Menurut Winters (2013), MPI Indonesia tertinggi dibandingkan negara-negara lain (kecuali Filipina), tempat 40 orang kaya sama dengan 650 ribu kali kelompok penduduk terendah. Kemudian menurut Credit Suisse

(2019), 1 persen orang terkaya sama dengan 46,6 persen kekayaan nasional.

Kalau lihat format pembangunan IKN dengan status otoritas dan menjadi objek investasi, baik MPI maupun rasio 1 persen orang kaya terhadap PDB, akan makin memburuk. Artinya, oligarki dalam arti segelintir orang yang memiliki kuasa finansial dan politik akan makin mencengkram. Apalagi diketahui bahwa dari 180 hektare (ha) tanah calon IKN hanya dimiliki dua pengusaha konglomrat (Sukanto Tanoto dan Hasyim Jhayadikusumo) dan 70 ha tambahan milik PT Bata Sejahtera yang terkait pejabat tinggi. Di atas tanah tersebut ada 142 izin usaha pertambangan, perkebunan, dan perhutanan. Tak tampak *setting* akses UMMK dalam proyek raksasa IKN tersebut.

Dengan konteks tersebut, niang partisipasi publik untuk membahas bagaimana membangun ibu kota negara yang berkeadilan akan sulit dicapai. Kalau kita lihat, misalnya di Paris, Berlin, Washington, London, Tokyo, bahkan Teheran dan Kairo yang punya banyak pusat-pusat kebudayaan, rasanya berbagai kegiatan intelektual yang beragam perspektif, universitas-universitas terbaik, pembahasan akademis masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama secara kritis dalam berbagai perspektif. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang kemiskinan, ketimpangan, demokrasi, nasib dunia ketiga, dan seterusnya. Umumnya juga sangat dinamisnya organisasi nonpemerintah (LSM), yang sangat proaktif terhadap pencarian solusi bangsa dan rakyatnya dari perspektif *civil society*.

Dengan demikian, ibu kota negara pada era modern tak melulu bicara gedung-gedung, istana, pusat pemerintahan, dan bisnis. Apalagi, kalau pemerintahan, politik dan bisnis hanya dikendalikan sekelompok elite yang tidak pada terhadap nasib rakyat dan bangsanya. Yang akan terjadi maka IKN hanya akan menjadi pusat yang *enclave*. Dia terasing dan sepi dari partisipasi penduduk.

Mudah-mudahan, meski sudah ada UU IKN yang lebih merupakan UU Pembangunan IKN—belum berbasis UU Perkotaan yang berpedaran—baik Presiden Joko Widodo maupun para elite lainnya masih mempertimbangkan kembali agar pembangunannya untuk diurus, setidaknya dalam lima tahun ke depan. Mengingat beban APBN dengan utang luar negeri yang sangat berat, apalagi pandemi masih belum berakhir. Kita ingin bangsa kita membangun ibu kota negara yang berkeadilan. Semoga. ■

Baca Opini di republikabaru.id
Pindai QR Code ini



REPUBLIKA

Terbit sejak 4 Januari 1993, Republikabaru hadir sebagai pelopor perbaruan media massa Indonesia. Harian ini memberi warna baru pada desain, gaya penulisan, dan sudut pandang surat kabar negeri ini. Sebagai koran, kemudian portal berita pertama di Tanah Air, media ini melahirkan kesemangatan baru dalam tata informasi. Republikabaru terbit demi kemakmuran bangsa, penebar manfaat untuk semesta.

Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Harian Republikabaru. Semua wartawan Harian Republikabaru dibekali dengan pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari siapa pun. Semua isi artikel/ulasan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Semua isi artikel/ulasan yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan Daerah bersangkutan.

MAKHA GROUP

Pemimpin Redaksi/Pemangku Jawab:
Iris Jurdani
Wakil Pemimpin Redaksi:
Nur Husein Murtaji
Redaktur Pelaksana:
Sulastika
Redaktur Senior:
Rizki Nur Hafidza
Wakil Redaktur Pelaksana:
Rizki Nur Hafidza, Heri Ratih, Anisa Dwiastuti, Joke Sudharto, Nur Husein Murtaji, Priyandono, Gengsi Mardiana, Heri Ratih, Nur Husein Murtaji, Didi Nurhiday, Muhammad Subhan, Badi Khatib, Idris Dhan Pratomo
Sekretaris Redaksi:
Hendang Sagor
Perwakilan Jawa Barat:
Nur Husein Murtaji (Kepala Perwakilan)
Iris Jurdani (Kepala Redaksi)
Perwakilan DIY - Jateng & Jatim:
Hendang Sagor (Kepala Perwakilan)
Nur Husein Murtaji (Kepala Redaksi)
Wartawan Senior:
Kopala Desai: Syarif, Kopala Info: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi: Rendi, Kopala Administrasi: Rendi, Kopala Keuangan: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Politik: Rendi, Kopala Hukum: Rendi, Kopala Olahraga: Rendi, Kopala Budaya: Rendi, Kopala Lingkungan: Rendi, Kopala Kesehatan: Rendi, Kopala Pendidikan: Rendi, Kopala Agama: Rendi, Kopala Sosial: Rendi, Kopala Ekonomi: Rendi, Kopala Internasional: Rendi, Kopala Opini: Rendi, Kopala Foto: Rendi, Kopala Video: Rendi, Kopala Grafis: Rendi, Kopala Layout: Rendi, Kopala Desain: Rendi, Kopala Produksi: Rendi, Kopala Distribusi

TAK TERBENDUNG

Mega bintang Golden State Warriors Stephen Curry (tengah) berduel dengan center Oklahoma City Thunder Derrick Favors (kiri) dan forward Darius Bazley pada laga lanjutan NBA 2021/2022 di Oklahoma, Amerika Serikat, Selasa (8/2). Warriors menang 110-98 atas tim tuan rumah. Langkah Curry dan kawan-kawan tak terbendung dengan selalu menang di sembilan laga terakhir.



ACTION IMAGES/CARL RIGINE

Persija Bersemangat Jelang Kontra Madura United

■ AFRIZAL ROSIKHUL ILMI

BALI — Persija Jakarta berharap bisa mendapatkan tambahan kekuatan saat menghadapi Madura United pada laga lanjutan pekan ke-24 BRI Liga 1 2021/2022 di Stadion Kapten I Wayan Dipa, Gianyar, Rabu (9/2) malam WIB. Asisten pelatih Persija, Ferdiansyah, mengakui, ketersediaan pemain sangat penting di tengah situasi seperti ini.

Macam Kemayoran sebelumnya tampil pingang saat menghadapi Arema FC. Tim Ibu Kota harus kehilangan lima pemain karena positif Covid-19. Mereka adalah Maman Abdurrahman (bek tengah), Andriyany Ardiyasa (kipser), Samuel Christianson Simanjuntak (bek), Ismed Sofyan (bek), dan Mekan Konate (gelandang). Kendati demikian, Ferdiansyah menilai para pemain yang tersedia tetap menunjukkan motivasi tinggi saat menghadapi Arema FC. Skuad Macan Kemayoran berhasil mengamankan satu poin pada laga tersebut setelah hasil imbang 1-1. Untuk laga melawan Madura, ia berharap pemainnya bisa meningkatkan permainan dan memperoleh kemenangan.

"Dari hasil kemarin, kita beri tahu pemain bahwa kita sudah mulai lebih baik dalam hal penyerang maupun bertahan. Ini perlu kita tingkatkan, mudah-mudahan permainan tim bisa lebih diaplikasikan saat melawan Madura United dan semoga jadi lebih baik dan dapatkan poin," kata Ferdiansyah dalam konferensi pers virtual menjelang pertandingan, Selasa (8/2).

Persija belum memperoleh kemenangan sejak menang 2-1 melawan Persita bulan lalu. Dan, itu menjadi satu-satunya kemenangan dalam lima pertandingan terakhir tim Ibu Kota, dua lainnya imbang dan dua kali kalah. Sebelum pertandingan melawan Madura, Persija duduk di peringkat ketujuh klasemen sementara dengan koleksi 33 poin.

Sebab itu, Ferdiansyah mengaku telah menyiapkan tim sebaik mungkin untuk menghadapi Madura United, baik secara fisik, taktik, maupun mental.

Dia mengakui, Laskar Sapeh Kerah punya banyak pemain dengan skill individu yang bagus sehingga perlu diwaspadai saat mereka tengah menguasai bola.

■ ed: gila ngak abar prambadi

Impresi Pertama The Blues

Sayangnya, the Blues tidak akan langsung didampingi oleh Tuchel dalam laga ini.

■ REJA IRFA WIDODO

ABU DHABI — Chelsea mengawali upaya untuk menambah koleksi trofi kali menghadapi Al Hilal pada babak semifinal Piala Dunia Antar-Klub, Rabu (9/2) malam WIB. Berstatus juara Liga Champions Eropa musim lalu, persaingan the Blues berkecambah di Piala Dunia Antar-Klub sedikit terganggu dengan penampilan kurang meyakinkan.

Performa ini mengacu pada penampilan tim asal London Barat itu pada putaran keempat Piala FA, akhir pekan lalu.

Meski berhasil lolos ke putaran kelima, the Blues harus susah payah melewati adangan klub kontestan

League One, Plymouth Argyle. Chelsea menyingkirkan Plymouth, 2-1, via masa tambahan waktu. Karena itu, duel dengan Al Hilal di Stadion Mohammed Bin Zayed itu menjadi kesempatan bagi the Blues menjawab keraguan. Pun, dengan memberikan impresi pertama sebagai salah satu kandidat terkuat peraih gelar Piala Dunia Antar-Klub.

Terlebih, wakil dari Eropa dalam turnamen ini terbukti mampu selalu tampil apik. Dari 17 kali gelaran Piala Dunia Antar-Klub, klub-klub asal Eropa berhasil melaju ke babak final dalam 16 edisi. Tren apik klub-klub asal Eropa ini pun sejalan dengan ambisi the Blues untuk bisa menjadi yang terbaik pada kesempatan kedua berpartisipasi di Piala Dunia Antar-Klub.

Terakhir kali the Blues tampil di Piala Dunia Antar-Klub adalah pada

2012 silam. Pada saat itu, Chelsea dipaksa gigit jari dan urung membawa pulang trofi perdana Piala Dunia Antar-Klub ke London Barat karena dibekap wakil Amerika Selatan, Corinthians, 0-1, di partai final.

Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, pun sudah jauh-jauh hari menegaskan ambisi the Blues dalam edisi ke-18 turnamen yang mempertemukan para klub juara di kompetisi regional di masing-masing konfederasi anggota FIFA.

"Begitu Anda terlibat di dalamnya, Anda akan melakukan berbagai rencana. Ini menjadi kesempatan besar untuk menjuarai trofi dari turnamen, yang jarang kami ikuti. Untuk itu, kami akan melakukan apa pun untuk memperbesar peluang agar hal itu bisa terjadi (menjuarai trofi Piala Dunia Antar-Klub)," ujar Tuchel, seperti dilansir Reuters, beberapa waktu lalu.

Sayangnya, the Blues tidak akan langsung didampingi oleh Tuchel pada laga ini. Pelatih asal Jerman itu diketahui terpapar Covid-19. Eks pelatih Paris Saint Germain (PSG) itu me-

iliki kemungkinan untuk bisa kembali mendampingi anak-anak asuhnya apabila Chelsea bisa melangkah ke partai final, yang rencananya bakal digelar Sabtu (12/2) malam WIB.

Lawan the Blues kali ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Juara Liga Champions Asia musim lalu itu juga diperkuat sejumlah pemain yang pernah merumput di Eropa, seperti eks gelandang serang Sporting Lisbon dan West Bromwich Albion, Matheus Pereira, dan mantan penyerang Manchester United, Odion Ighalo.

Tidak hanya itu, klub asal Arab Saudi itu juga berada dalam tren apik performa dengan rentetan kemenangan dalam enam laga terakhir di semua ajang.

Pelatih Al Hilal, Leonardo Jardim, mengakui, Chelsea mendapatkan status unggulan dalam laga ini karena statusnya sebagai juara Liga Champions Eropa. Namun, Jardim menegaskan, kondisi tersebut tidak serta-merta membuat anak-anak asuhnya kehilangan keyakinan untuk bisa menyingkirkan the Blues dalam laga nanti. ■ ed: gila ngak abar prambadi

UNTUK INDONESIA

Bank **BTN**

BTN ANNIVERSARY
9 FEBRUARI 2022 | 08.30 - 12.00 WIB
LIVE ON BANK BTN

72 tahun
BTN Melayani Keluarga Indonesia

VIRTUAL PROPERTY EXPO
18 FEBRUARI - 17 MARET 2022
PROMO KPR/KPA KPR IB/KPA IB **3,72%** Fix Rate 1 Tahun

God Bless

Kahitna

batara spektra

72 BTN RUN RIDE 2022
27 MARET 2022

BANGGA MELAYANI KELUARGA INDONESIA DI SETIAP GENERASI DENGAN SEMANGAT BERINOVASI

SEBAGAI WUJUD APRESIASI SELAMA 72 TAHUN MELAYANI, BANK BTN MEMPERSEMBAHKAN BERAGAM PENAWARAN DAN ACARA MENARIK YANG DIHADIRKAN ISTIMEWA UNTUK ANDA

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI

CONTACT CENTER 1500-286

AyoPunyaRumah
Dengan Bank Tabungan

Info lebih detail

HARIAN PERKOTA PUTRAJAYA

TEROBOS BANJIR

Warga menggunakan sepeda melewati banjir saat mendistribusikan nasi bungkus di Dukuh Tugurejo, Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (8/2). Pemerintah desa setempat mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik warga terdampak banjir yang tidak mengungsi di Dukuh Tugurejo dengan dibantu oleh anggota Polres Pekalongan.



Gelombang Omikron Ancam Nakes

PB IDI mewajibkan dokter yang melakukan kegiatan profesi untuk vaksin tiga dosis.

■ DIAN FATH RISALAH, FAUZIAH MURSIDI

JAKARTA — Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban mengatakan, gelombang ketiga Covid-19 yang diakibatkan varian omikron mulai mengancam tenaga kesehatan (nakes) di rumah sakit. Bila semakin banyak nakes yang terinfeksi, akan mengurangi pelayanan kesehatan.

"Gelombang ini mulai mengancam nakes di rumah sakit. Kalau yang terinfeksi banyak dan mereka harus cuti, ketersediaan nakes akan mengurangi pelayanan. Hal ini dapat jadi masalah yang berat, seperti yang terjadi di Inggris. Saya harap itu tidak terjadi," kata Zubairi dalam keterangan, Selasa (8/2).

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum PB IDI, Daeng M Faqih mengatakan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) telah menerbitkan imbauan kepada seluruh dokter di Indonesia. Imbauan itu diterbitkan karena sudah mulai banyaknya dokter dan nakes yang terinfeksi serta meningkatnya angka kematian akibat Covid-19. "Setiap

dokter yang melakukan kegiatan profesinya wajib mendapatkan vaksinasi tiga kali," ujar Daeng.

Daeng mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemkes) periode 30 Januari-5 Februari 2022, hasil skrining 9.161 staf di 34 rumah sakit di bawah Kemkes sebanyak 10,25 persen atau sekitar 939 staf rumah dinyatakan positif. Dari data tersebut, 18 persen *positivity rate* pada staf manajemen, kemudian 8 persen *positivity rate* pada dokter, 7 persen *positivity rate* pada staf penunjang dan 8 persen *positivity rate* pada perawat.

Setiap dokter wajib melakukan *swab* PCR secara rutin minimal dua pekan sekali agar tidak menjadi sumber penularan bagi pasien, sejawat atau rekan kerja, anggota keluarga di rumah, serta masyarakat. Bila terkonfirmasi Covid-19, dokter wajib melaporkan ke IDI cabang dan perhimpunan.

"Dokter yang terkonfirmasi Covid-19, termasuk kasus asimtomatis tetap harus isolasi dan mendapatkan terapi adekuat. Kriteria dapat bertugas kembali adalah bila PCR sudah dua kali negatif dengan jarak pemeriksaan 24 jam," ujar Daeng.

Menkes Budi Gunadi Sadikin

mengatakan, kenaikan kasus Covid-19 akibat omikron bisa lebih tinggi dibandingkan peningkatan kasus infeksi yang terjadi akibat penularan varian delta. Namun, Menkes Budi mengatakan masyarakat tidak panik dan tetap waspada. Mantan wakil menteri BUMN ini mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia masih berperang melawan pandemi Covid-19.

"Kita masih berperang. Saya percaya Indonesia sudah berada kali perang selalu menang. Yang penting kita mau kompak bekerja sama. Kita memanfaatkan konsep pertahanan semesta," kata dia.

Menkes mengatakan, konsep pertahanan semesta merupakan strategi berperang bahwa rakyat yang paling berperan menentukan kalah atau menang. Pada kekuatan terbesar Indonesia, menurut dia, bukan berada pada kekuatan yang dimiliki pemerintah, melainkan kebersamaan masyarakat dalam menghadapi SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Menurut dia, peralatan perang yang kini tersedia dan yang paling baik yakni penggunaan masker, gaya vaksinasi Covid-19 perlu segera dimanfaatkan masyarakat. "Kita bisa mengatasi perang menghadapi pandemi ini, tetapi butuh aksi kolektif semua. Kekuatan ada di rakyat semua, ada di masyarakat semua. Sentajanya apa? Sentajannya adalah pakai masker dan cepat divaksin," katanya.

Juru bicara pemerintah untuk pe-

nanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menegaskan perlunya upaya untuk menurunkan kasus Covid-19 agar tidak ada kasus kematian. Wiku menegaskan pula, nyawa merupakan sesuatu yang berharga dan tidak boleh disepelkan, berupa pun jumlahnya.

"Nyawa tetapih nyawa yang berharga. Saya percaya, apabila kita segera menurunkan kasus, angka kematian dapat kita tekan sehingga tidak ada satu pun orang meninggal," ujarnya.

Wiku mengungkapkan, pada pekan terakhir, tercatat 244 korban jiwa meninggal karena Covid-19, sementara pada gelombang pertama delapan kali lebih banyak, yakni sebesar 2.000 orang. Kemudian kedua puncak gelombang kedua sebesar 6.000 orang atau 24 kali lebih banyak.

La mengatakan, persentase penyumbang kematian terbanyak adalah orang dengan usia lanjut, pengidap komorbid, dan orang yang belum divaksinasi. Menurut dia, jika angka kematian terus memuncak, hal ini berpengaruh menyebabkan peningkatan kebutuhan alat, material, dan obat-obatan Covid-19 dalam jumlah besar.

Karena itu, Wiku mengingatkan, setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab sama pentingnya untuk mencegah penularan. Khususnya, bagi masyarakat yang berada dalam wilayah kenaikan kasus yang tinggi. ■ ed: mas alamsi huda

Bandara Lombok Sambut Ratusan Peserta MotoGP

JAKARTA — PT Angkasa Pura I (Persero) menyampaikan bahwa Bandara Internasional Lombok mulai menerima kedatangan para pembalap, kru, dan ofisial tim peserta tes pramusim kejuaraan dunia balap motor MotoGP, yang akan dilaksanakan di Sirkuit Mandalika Mandalika. Ada sebanyak 485 peserta MotoGP 2022 yang tiba pada Senin (7/2) dengan dua nomor penerbangan.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi mengatakan, dua penerbangan Carter dari maskapai Malaysia Airlines pada Senin, menjadi penerbangan pertama yang tiba di Lombok. Pesawat dengan nomor penerbangan MH8760 mengangkut 248 penumpang, serta disusul dengan penerbangan MH8756 yang mengangkut 235 penumpang.

Malam harinya, pesawat kargo dari maskapai Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR8496 mendarat pada pukul 21.08 WITA. Pesawat kargo berjenis Boeing 777F yang bertolak dari Bandara Internasional Kuala Lumpur tersebut mengangkut logistik sebanyak 71.318 kg kargo.

Selanjutnya, Bandara Lombok menerima kembali kedatangan pesawat kargo pengangkut logistik tim peserta tes pramusim MotoGP 2022, dengan mendaratnya pesawat maskapai Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR8394 pada Selasa (8/2) siang. Pesawat dengan tipe Boeing 747-F tersebut mendarat pada pukul 12.11 WITA dengan mengangkut 77.993 kg logistik, yang sebelumnya berangkat dari Kuala Lumpur.

La mengungkapkan, AP I selaku pengelola Bandara Internasional Lombok menerapkan skema *bubble* dalam penanganan kedatangan para pembalap dan tim untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Skema *bubble* dilaksanakan dengan membagi orang-orang yang terlibat ke dalam kelompok yang berbeda, dengan memisahkan orang yang berisiko terpapar Covid-19 dengan masyarakat umum. Interaksi antar kelompok atau *bubble* akan dibatasi untuk meminimalisasi risiko penyebaran Covid-19.

"Para penumpang yang baru tiba akan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan secara ketat dari petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)," kata Faik Fahmi.

Untuk mendukung kelancaran penanganan kedatangan para pembalap, kru, dan ofisial tim peserta tes pramusim MotoGP di Sirkuit Mandalika, AP I menyiapkan 12 jalur pemeriksaan dokumen kesehatan, enam jalur pemeriksaan paspor, dua conveyor belt, dan empat jalur pemeriksaan bea cukai. AP I juga menyiapkan moda transportasi khusus yang akan mengangkut dari bandara menuju kawasan sirkuit.

Masyarakat Lombok yang berprofesi sebagai sopir berharap dapat dilibatkan dalam akomodasi ajang MotoGP Mandalika. Pada Selasa (8/2), ratusan sopir, pemuda, dan Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Pujut mendampingi kantor PT ITDC Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Desa Ketara, Lalu Buntaran mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan supaya warga lokal harus diberdayakan. Namun menurut dia, para sopir transportasi lokal hingga saat ini tidak dilibatkan dalam akomodasi transportasi ajang tes pramusim ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika.

Managing Direktur ITDC, Bram Subiandoro mengatakan, apa yang mereka asipasi para sopir transportasi lokal tersebut akan didiskusikan untuk mencari solusi terbaik. ■ antares ed: satira kartika yudha

Pemerintah Cari Bentuk Aturan Publisher Rights dari hlm 1

undang tersendiri, lalu (perlu diungkapkan) undang-undang tentang apa," ucapnya.

Mahfud MD menekankan bahwa dirinya dan Menkominfo terus memicarakan perihal regulasi hubungan antara penerbit dan platform digital tersebut. "Mungkin setelah konvensi ini saya akan segera mengundang teman-teman menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk segera membuat 'baju hukum' terdapat rancangan regulasi yang dibuat teman-teman Dewan Pers," katanya.

Hal serupa ditekan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam webinar yang digelar Forum Pemred bertajuk "Memangkas Jurnalisme Berkualitas di Era Revolusi Teknologi Informasi" pada Selasa (8/2). Johnny

mengatakan, pemerintah akan membentuk suatu aturan dengan memperhatikan *draf publisher rights* yang diusulkan Dewan Pers. Selain itu, upaya menciptakan konvergensi dan lapangan bermain yang adil antarpihak di ruang digital itu juga akan melihat pada aturan-aturan yang sudah ada di berbagai belahan dunia.

"Bentuk payung hukumnya apa, tentu akan kita sesuaikan dengan ruang regulasi yang ada. Apakah dalam format undang-undang (UU) atau dalam format lainnya seperti peraturan pemerintah (PP)," katanya.

Dewan Pers pada Oktober 2021 telah menyerahkan *draf* undang regulasi *publisher rights* kepada Menkominfo. *Draf* berjudul "Usulan Jurnalisme Berkualitas dan Tanggung Jawab Plat-

form Digital" itu disusun dan diajukan perwakilan asosiasi, perusahaan media, serta kalangan jurnalis.

Dalam menyusun usulan regulasi tersebut, Dewan Pers mempelajari *publisher rights* yang diterapkan di berbagai negara. Lahinya regulasi *publisher rights* di berbagai negara untuk mengatasi rantai persoalan antara *publisher* dan platform digital. Beberapa persoalan itu terkait monetisasi dan agregasi berita tanpa kompensasi memadai, pengabaian hak cipta jurnalistik, keterbatasan sistem algoritma platform digital, monopoli data pengguna, monopoli distribusi konten, hingga monopoli periklanan digital. Rantai persoalan tersebut yang diyakini menyebabkan persaingan usaha tidak sehat di bidang media.

Johnny menerangkan, Presiden Jokowi pada Hari Pers Nasional (HPN) 2021 bahkan telah memberikan arahan agar mengkaji regulasi untuk menjaga hubungan antara media massa, penerbit, dan platform digital. Menurut Johnny, pemerintah juga memikirkan regulasi yang dapat membuat ekosistem media di Indonesia berjalan berdamai. ("Pembuatan aturannya") Dengan memperhatikan *draf* usulan *publisher rights* yang disampaikan oleh Dewan Pers," kata Johnny.

Dia mengatakan, *draf* usulan *publisher rights* tersebut sudah dia sampaikan dan bicarakan kepada Menko Pukhuk Mahfud MD. Johnny mengungkapkan, dirinya pada Selasa (8/2) juga sudah mendapatkan pesan singkat dari Mahfud tentang rencana penyelenggaraan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendiskusikan *draf* tersebut.

"Untuk menindaklanjuti

legislasi primer yang seperti apa yang perlu disiapkan untuk memastikan konvergensi, *sustainability*, *playing field* yang berimbang dan adil di ruang digital," ungkap dia.

Dengan kombinasi antara iklim pers yang sehat dan upaya nyata industri pers untuk terus berbenah diri serta didukung regulasi, dia berharap dapat terus menjaga kualitas sekaligus independensi yang bertanggung jawab. Menurut Johnny, jurnalisme berkualitas akan tetap menjadi barometer pers yang berkualitas.

"Kiranya seluruh pihak yang terkait dengan pers mempunyai agar konten pers kembali ke khitahnya. Konten yang informatif, yang mendidik, yang mencerahkan, yang memberdayakan, dan yang membangkitkan rasa nasionalisme kita," ujar dia.

Dalam webinar kemarin, Forum Pemimpin Redaksi (Pemred)

Marquez Cs Siap Jajal Sirkuit Mandalika dari hlm 1

di Pertamina Mandalika Circuit terdiri atas sesi tes dan latihan selama tiga hari. Seluruh pembalap akan mengikuti MotoGP Official Test yang dijadwalkan pada pukul 10.00 - 17.45 WITA untuk sesi tes dan dilanjutkan dengan sesi latihan selama 15 menit hingga pukul 18.00 WITA.

"Kami sangat antusias dalam menyambut 24 pembalap yang akan mencoba lintasan Pertamina Mandalika Circuit di 11-13 Februari mendatang. Apalagi, terdapat nama-nama pembalap terbaik MotoGP di antara 24 pembalap yang hadir tersebut," kata Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satra, Selasa (8/2).

Priandhi menambahkan, Sirkuit Mandalika merupakan sirkuit baru yang belum dikenal oleh pembalap MotoGP. Karena itu, *official test* ini sangat penting

bagi pembalap dan kru tim untuk mengenal karakteristik sirkuit sebelum sesi balapan di Pertamina Mandalika Circuit pada Maret mendatang.

"Kami berharap semua pembalap dan kru tim memaksimalkan *official test* ini dan mendapatkan pengalaman yang terbaik dengan sirkuit kami," ujar pria yang akrab disapa Andhi ini.

Selama tes resmi berlangsung, para pembalap beserta kru akan mengikuti kebijakan skema *travel bubble*. Dengan adanya sistem tersebut, mereka hanya boleh berkegiatan di wilayah yang dibatasi dengan durasi waktu yang ditentukan.

Andhi mengatakan, MGPA berupaya melaksanakan peraturan MotoGP 2022 tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh Pemerintah Indonesia untuk mence-

gah kemungkinan transmisi penyebaran Covid-19. "Kami berharap semua berjalan lancar dan kita semakin siap dalam menggelar balapan MotoGP pada Maret mendatang," kata Andhi.

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Alexander K Ginting menjelaskan, para pembalap dan ofisial MotoGP Mandalika tidak diwajibkan menjalani karantina terpisah karena sudah berada pada skema perlindungan *travel bubble*. "Kalau sudah karantina *bubble*, artinya karantina terpisah tidak dikerjakan karena tumpang tindih," kata Alexander kepada *Republika*, Selasa (8/2).

Alexander mengatakan, skema *bubble* memungkinkan orang-orang yang berada di dalamnya terlindungi dari risiko penularan Covid-19. Mereka hanya boleh berinteraksi dengan orang-orang yang sudah ditentukan dan yang sudah dipastikan negatif Covid-19.

"*Bubble* kan ada dalam karantina yang gelembungnya bergerak, tapi tidak boleh pecah, sehingga setiap orang akan konsisten dalam *bubble*-nya masing-masing tanpa menjadi pecah," kata dia.

La menambahkan, sistem karantina tersebut sudah diuji coba pada MotoGP 2022 telah diatur dalam Surat Edman Satgas Covid-19 Nomor 5 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem *Bubble* pada Kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika dalam Masa Pandemi Covid-19 yang terbit pada 3 Februari 2022.

Dalam aturan itu disebutkan sejumlah ketentuan, di antaranya pelaku sistem *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika, memasuki kawasan *bubble* MotoGP 2022 di Mandalika melalui pintu masuk kedatangan internasional Bandar Udara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid.

Mereka harus terlebih dahulu menunjukkan kartu atau serifikasi

kasus vaksin Covid-19 dua dosis lengkap. Kemudian, menunjukkan hasil negatif Covid-19 dalam pemeriksaan RT-PCR di negara/wilayah asal yang sampainya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam.

Selama berada di kawasan sistem *bubble*, peserta hanya diperkenankan melakukan interaksi dengan orang yang berada dalam satu kelompok, melakukan kegiatan di zona yang telah ditentukan pada setiap fasilitas atau sarana-prasarana dalam kawasan *bubble* di Mandalika, dan menjalan pemeriksaan tes cepat antigen secara rutin setiap hari.

Selanjutnya, CEO Dorna Sports Ricardo Ezequiel sempat melontarkan pernyataan bahwa MotoGP tidak akan menggelar balapan di negara yang mewajibkan karantina 14 hari. "Kami tidak akan menerima peraturan karantina. Jika mereka meminta kami untuk karantina selama 14 hari pada suatu negara, maka kami ti-

dak akan pergi ke negara itu," kata Ezequiel, dikutip dari GP One.

Kepala Biro Operasional Polda Nusa Tenggara Barat Kombes Pol Iman Thobroni memastikan, pihaknya mengawal ketat penerapan sistem *bubble* untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada ajang tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika. Pengawasan sudah dilakukan sejak para pembalap dan kru tiba di Bandara International Zainuddin Abdul Madjid pada Senin (7/2) malam. "Kami kawal mereka dari bandara sampai ke hotel penginapan," ujarnya.

Dia menambahkan, para peserta hanya boleh bergerak dari lokasi penginapan ke Sirkuit Mandalika. Imam memastikan, mereka tidak boleh berinteraksi langsung dengan masyarakat luar.

"Kalau liburan, itu hanya boleh ke kawasan Pantai Tanjung Aan, yang lain tidak boleh. *Nongkrong* di kafe juga tidak boleh," ucap dia. ■ antares ed: satira kartika yudha



TEMPAT ISOLASI Petugas menata tempat tidur di Gelanggang Olahraga (GOR) Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (8/2). Pemerintah Kota Jakarta Utara menyiapkan GOR Tanjung Priok sebagai tempat isolasi terkendali untuk penanganan pasien positif Covid-19 dengan kapasitas maksimal mencapai 400 orang.

Pemkot Bogor Bongkar Deretan PKL di Dua Lokasi

Belasan PKL di kawasan lapak Jambu Dua ditindak karena menjual miras.

BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akhirnya bertindak tegas dengan membongkar lapak pedagang kaki lima (PKL) yang sudah bertahun-tahun menduduki lahan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada Selasa (8/2). Penertiban itu dilakukan dengan pertimbangan belasan lapak tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Abdul Rachim, menjelaskan, pembongkaran belasan PKL yang menghuni kawasan Jambu Dua itu merupakan program rutin yang dicanangkan Pemkot Bogor. Selain di kawasan Jambu Dua, sambung dia, Pemkot Bogor secara bersama-sama menertibkan beberapa lapak PKL yang ada di dekat Simpang Ciawi, yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor.

Menurut dia, pembongkaran itu sebagai upaya untuk menata wilayah agar lebih tertib. "Penertiban rutin di lokasi-lokasi, yang selama ini kumuh dan rawan masalah sosial dan krimi-

nal," kata Dedie kepada *Republika* di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/2).

Dedie menyatakan, Pemkot Bogor berencana membangun *shelter* atau halte Biskita Transpakun di lokasi lahan yang sebelumnya dikuasai PKL tersebut. Pihaknya juga perlu bersikap tegas karena PKL yang berdagang di dua lokasi itu bukan termasuk pedagang yang masuk program relokasi. Dedie memperingatkan, selama ini, deretan PKL yang mendirikan lapak untuk berdagang sangat tidak peduli dengan ketertiban dan kebersihan sekitarnya. Hal itu membuat kawasan Jambu Dua ataupun Ciawi terkesan kumuh dan tak enak dipandang mata. "Sudah puluhan tahun jorok. Mengganggu pandangan dan mereka tidak peduli dengan ketertiban dan kebersihan," ujar Dedie.

Khusus penertiban di Simpang Ciawi, menurut Dedie, menyusul 22 bangunan liar yang ditempati PKL. Bangunan tersebut terletak di dua wilayah, yakni di Kelurahan Sindangraja, Kecamatan Bogor Timur dan Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan. Dia menyebut, puluhan bangunan liar itu berdiri di atas lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Per-

mahan Rakyat (PUPR) yang difungsikan oleh PT Jasa Marga.

Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah, menjelaskan, total ada 17 lapak milik PKL yang diratakan di Jalan Ahmad Yani. Dia mengatakan, sebelum petugas gabungan merobohkan lapak, para pedagang sudah diberikan surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3 sesuai prosedur berlaku. Karena tidak kunjung pindah, kata Riki, Satpol PP Kota Bogor pun melayangkan surat pemberitahuan penertiban kepada para pedagang.

Pada hari yang ditentukan, akhirnya petugas gabungan yang dipimpin Satpol PP Kota Bogor menghancurkan seluruh lapak yang berdiri di lahan milik Pemkot Bogor. Pantauan *Republika* di lokasi, puluhan aparat wilayah secara komando melakukan penertiban. Bangunan semipermanen yang tadinya berjejer sejajar dengan ruko di sampingnya, kini hanya tersisa balok kayu, triplek, serta ubin yang masih menempel di tanah.

Para pedagang diperkenankan mengambil kayu atau triplek untuk digunakan sebagai tempat berdagang di lokasi lain yang resmi. "Makanya, ini kita lakukan eksekusi melibatkan beberapa instansi. Termasuk Polsek Bogor Utara, Koramil, Denpom, dan dinas terkait," tutur Riki.

Dia menegaskan, semua lapak itu ditertibkan karena melanggar Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 Ten-

tang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum). Selain itu, lapak berupa bangunan semipermanen tersebut mengganggu badan jalan, drainase, serta taman umum.

Adapun lokasi lahan yang ditertibkan, sambung dia, selain untuk pembangunan halte, juga difungsikan sebagai taman dan jalur pedestrian. "Untuk relokasi (pedagang) hingga saat ini belum ada program relokasi," kata Riki.

Miras ilegal

Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach, menyatakan, belasan PKL di kawasan Jambu Dua juga terindikasi menjual minuman keras (miras) tanpa izin alias ilegal. Apalagi, mereka berjualan di lahan milik Pemkot Bogor. Agustian mengakui, memang ada PKL yang berjualan makanan, seperti lapo ataupun warung tegal (warteg) pada umumnya. Namun, di belakang pedagang juga menjajangk miras secara bebas. Hal itu bertentangan dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penunjukan Teknis Penertiban Minuman Beralkohol di Kota Bogor.

"Mereka jual miras mulai dari jenis cici, sampai ke miras botolan. Nanti bekas pengusirannya akan dipasang seng sebagai penutup," kata Syach.

■ shabrina zakaria ed: erik purnama putra

KILAS

Seorang Diduga ODGJ Bakar Motor

JAKARTA — Seorang laki-laki diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) membakar dua sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah restoran di kawasan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (8/2) pagi WIB. Warga di sekitar lokasi kejadian, Amat menjelaskan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 06.30 WIB. Dia memperkirakan, laki-laki yang diduga ODGJ itu sudah tertidur sejak Senin (7/2) malam WIB. Kejadian ini terjadi pagi. Dari semalam dia tidur di sini. Saya kira awalnya karyawan PHD (Pizza Hut Delivery), kata Amat ketika ditemui di sekitar lokasi pembakaran sepeda motor, Selasa.

Amat mengaku, mengetahui insiden pembakaran sepeda motor setelah ada warga yang berteriak. Semula ia tidak terlalu peduli, tapi perhatiannya akhirnya teralihkan setelah semakin banyak warga mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). "Ada ibu-ibu yang teriak. Saya kira ada tabrakan di depan. Saya diam saja. Makin lama makin ramai yang teriak. Ternyata api sudah besar," ujar Amat.

Menurut dia, warga yang mengetahui ada sepeda motor terbakar berusaha memadamkan api. Beruntung, tidak lama kemudian api dapat dikendalikan, meski sudah membakar sebagian bodi kendaraan. "Pelaku (langsung) diamankan warga," tutur Amat.

Selanjutnya, kata dia, datang Petugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) Suku Dinas Sosial Jaktim ke lokasi kejadian. Petugas pun membawa laki-laki itu ke Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit. ■ antara ed: erik purnama putra

Dinsos Siapkan Bansos Bagi Warga Isoman

TANGSEL — Kasus Covid-19 varian omikron mengalami lonjakan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hingga menembus angka 1.000 orang positif per hari. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel menyiapkan hal itu dengan berusaha menyiapkan bantuan sosial (bansos) bagi warga yang menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah.

"Sementara ini belum, tapi kita sedang siapkan bansos nantinya," kata Wali Kota Tangerang Benjamin Darmo di Ciputat, Kota Tangsel, Provinsi Banten, Selasa (8/2).

Dia menjelaskan, bansos yang nantinya dibagikan ke warga meliputi paket sembako. Benjamin mengatakan, melaksanainya mereka yang mendapat bantuan adalah mengacu data terdapat kesejahteraan sosial (DKTS) di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangsel. "Kita ada data terdapat kesejahteraan sosial, nanti divalidasi, sekarang sedang dilakukan validasi oleh para camat dan para lurah nanti kalau diperlukan," terangnya.

Benjamin berpendapat, pandemi yang sudah berjalan dua tahun membuat masyarakat bisa memahami tata cara dan pemenuhan kebutuhan selama menjalani isoman. Dia meyakini, pengetahuan warga itu membuat mereka bisa lebih tenang menghadapi status positif Covid-19. "Jadi, mereka sudah tahu harus gimana isoman, saya kira tidak harus terlampau periode lalu ya," kata Benjamin.

Kebijakan yang sama juga diterapkan di Kota Tangerang. Kepala Dinas Kota Tangerang Suli Rosadi menjelaskan, warga yang menjalani isoman dapat mengajukan bantuan paket sembako kepada Pemerintah Kota Tangerang. ■ eve rianti ed: erik purnama putra

Disnaker Gelar Pelatihan Kerja Dua Semester

DEPOK — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok memberikan pelatihan bagi para pencari kerja (pencaker) untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Tujuannya agar setelah mendapat pelatihan, mereka dapat lebih cepat diserap pelaku industri ataupun memulai wirausaha sendiri.

"Pelatihan yang diberikan adalah barista, komputer, tata boga, tata rias pengantin, pergengkelan roda dua, servis komputer, dan servis AC," kata Kepala Disnaker Kota Depok, Mohammad Thamrin di Kota Depok,

Jawa Barat, Selasa (8/2).

Thamrin mengatakan, pelatihan bagi pencaker terbagi menjadi dua semester. Pada semester pertama dilaksanakan pada Januari-Juni 2022. Kemudian, semester dua akan dimulai pada Juli-Desember 2022.

Dia menjelaskan, Disnaker Kota Depok pada semester pertama mengadakan pelatihan menjadi barista pada 25-30 Maret 2022. Lalu, pelatihan komputer angkatan pertama pada 17-15 Juni 2022 dan angkatan kedua pada 21-29 Juni 2022.

"Kemudian, untuk semester

dua, ada pelatihan tata boga 8-15 Juli 2022. Lalu, pelatihan tata rias pengantin 19-28 Juli 2022 dan pelatihan pergengkelan roda dua 02-31 Agustus 2022," ujar Thamrin.

Selanjutnya, pihaknya mengadakan pelatihan servis komputer pada 5-13 September 2022 dan pelatihan servis AC pada 19-27 September 2022. Thamrin menekankan, semua pelatihan tersebut diadakan secara gratis. Bahkan, peserta akan mendapatkan uang perjalanan, makan, sertifikat, dan fasilitas penunjang pelatihan lainnya.

Dia pun mengajak pencaker untuk mendaftar pelatihan yang memberi keterampilan bagi peserta itu. "Untuk kriteria peserta pelatihan, yaitu memiliki KTP Depok, memiliki AK-1 (kartu kuning), usia minimal 18 tahun, tidak sedang sekolah atau menyelesaikan pendidikan, belum bekerja, dan sudah mendapatkan sertifikat vaksinasi Covid-19," terang Thamrin.

Sebelumnya, Disnaker Kota Depok juga menggelar aplikasi bursa kerja online (BKOL) yang memfasilitasi pencaker untuk mengajukan lamaran pekerjaan.

Tercatat ada 47 perusahaan yang tergabung dalam BKOL dengan jumlah pencari kerja 3.464 orang. Program itu diluncurkan untuk membantu pencaker mendapatkan pekerjaan dan sekaligus mengurangi pengangguran di Kota Depok.

Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, dan Bina Lembaga Pelatihan Kerja Disnaker Kota Depok, Tri Astuti, menjelaskan, bagi masyarakat atau pencaker yang ingin mendaftar dan mengikuti seleksi pelatihan kerja dapat membuka tautan <https://simpler.depok.go.id>. Semua

pendaftaran dilakukan secara daring. Tri menginformasikan, pendaftaran pelatihan semester pertama akan ditutup pada 1 Maret 2022. Adapun pelatihan semester dua ditutup pada 16 Juni 2022.

Mereka yang terpilih menjadi peserta akan mendapatkan notifikasi. "Setelah mendaftar akan ada seleksi dari masing-masing pelatihan di atas. Jalang seleksi akan diumumkan melalui Whatsapp atau email pendaftar dan juga diumumkan dalam aplikasi Simplex," kata Tri.

■ antara ed: erik purnama putra

Bima yang Ingin Memopulerkan Lari Trail dan Pariwisata

Pengurus Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI) periode 2021-2025 sudah resmi dilantik. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto ditunjuk sebagai ketua umum ALTI untuk masa bakti lima tahun. Bima terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional dan Raker Pengurus Pusat ALTI di Kota Bogor, Senin (7/2).

Bima pun bertekad melalui ALTI bakal memopulerkan olahraga lari trail agar bisa masuk ke ranah pariwisata sekaligus sarana kampanye lingkungan hidup. Saat ini, sambung dia, sudah terbentuk pengurus daerah ALTI di 12 provinsi.

Dia menuturkan, ingin mengaitkan olahraga lari trail di masyarakat Indonesia yang antusiasnya terus naik belakangan ini. "Jadi, kita ingin memasyarakatkan, memopulerkan olahraga lari trail ini. Jadi, ini bukan sekadar lari, ini dekat dengan alam, rekreasi, *tourism*, dan lingkungan hidup. Jadi, kita ingin mengaitkannya ini," kata Bima di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/2). Dia pun optimis, pengurus ALTI bisa meluas hingga terbentuk di 20



Pengurus ALTI berusaha memopulerkan olahraga lari trail.

sampai 25 provinsi sampai 2025. Bima juga mempunyai target pribadi, ALTI dapat terdaftar di Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Dengan begitu, diharapkan olahraga lari trail bisa masuk pertandingan ekshibisi di Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan datang.

Bima mengunggulkan jika Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno ditunjuk menjadi dewan pembina ALTI. Dengan keterlibatan Sandiaga, ia sangat berharap, banyak daerah tertarik bergabung ALTI sekaligus untuk mendapat legitimasi dan dukungan. Karena itu, ia siap memopulerkan jenis olahraga tersebut ke arah yang sifatnya rekreasi.

"Untuk para pemuda dengan jarak tempuh, durasi, serta elevasi yang lebih bersahabat supaya populer di kalangan SMA, kampus, pencinta yang bisa memulai dari awal," kata Bima.

Ketua Harian ALTI Muhammad Farhan mengungkapkan, pengurus sedang melakukan penajakan agar organisasi bisa tergarbang dalam KORI. Hanya saja, ia menyadari, ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi ALTI. Di antaranya, ALTI harus memiliki pengurus di 15 provinsi, memperoleh dua kejuruan nasional, beruntung, dan menyelenggarakan acara di PON sebagai sebuah ekshibisi. "Seperti di beberapa cabang olahraga yang kita lihat di PON Papua kemarin," kata anggota Fraksi Nasdem DPR tersebut.

Farhan menerangkan, perbedaan lari trail dan konvensional adalah medan lari, seperti area *off road*. Sebagian besar medan yang digunakan untuk lari berupa ladang, sawah, pantai, gunung, jalan tanah, dan lainnya di luar jalan raya. "Jadi, rasanya lebih menantang. Ini kita lari tadi cuma tujuh kilometer, tapi rasanya seperti di 15 kilometer jalan raya. Diperkirakan 10 persen *road*, sisanya *off road*," ucap Farhan.

Ketua Umum KORMI Hayono Isman menyambut baik hasil Musyawarah

Nasional ALTI yang menetapkan pengurus periode 2021-2025. Dia meyakini, Ketua Umum ALTI Bima Arya Sugiarto bakal memopulerkan olahraga yang memuat unsur *tourism* tersebut. Di bawah kepemimpinan pengurus yang baru, harapan saya selaku ketua umum KORMI tentu ALTI punya kekuatan karena kita punya Indonesia Bugar 2045. Jadi, ALTI saya harap berkontribusi," ucap Hayono.

Dia mengatakan, ALTI saat ini sudah memiliki 12 pengurus tingkat provinsi. Hal itu berarti ALTI mampu memenuhi syarat menjadi anggota penuh KORMI. Sehingga, olahraga lari trail bisa ikut Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) 2022 bersama 76 induk olahraga lainnya.

"Jadi, nanti ALTI berhipung di KORMI, ALTI akan masuk komisi olahraga petualangan dan tantangan. Kita ada tiga komisi, komisi olahraga tradisional, dari kreasi budaya, komisi kesehatan dan kebugaran, dan komisi olahraga petualangan dan tantangan," ucap Hayono. ■ shabrina zakaria ed: erik purnama putra

BURSA			KURS			KURS TENGAH DOLAR AS			INDIKATOR		
SELASA (8/2)			SELASA (8/2)			SELASA (8/2)			PENJUALAN PBID		
FTSE 100	7.618,15	44,68	MATA UANG	JUAL	BELI						
Dax	15.309,14	102,50	AUD	10.280	10.175						
Cac 40	7.071,58	62,33	EUR	16.550	16.380						
Dow Jones	35.091,13	1,39	GBP	19.597	19.396						
Nasdaq	14.015,67	82,34	HKD	1.857	1.839						
Shanghai	3.452,63	23,05	JPY	125	124						
Hang Seng	24.329,49	250,06	SGD	10.769	10.658						
Nikkei	27.284,52	35,65	USD	14.476	14.331						
Straits Time	3.405,11	38,63									
IHS6	6.789,52	15,42									

Sumber: Markit dan BCI 17.00 WIB

Sumber: B1 sampai 17.00 WIB

Sumber: B1



PEREKONOMIAN JAWA BARAT Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat Herawanto (tengah) berinteraksi dengan Kepala Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Indarto Budiwitono (kiri) dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Barat Dedi Supandi (kanan) dalam acara 'Perekonomian Jawa Barat 2021 dan Prospek Tahun 2022' di Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, Bandung, Selasa (8/2). Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun ini diperkirakan pada kisaran 5,0-5,5 persen secara tahunan.

BTN Raup Laba Bersih Rp 2,37 Triliun

BTN menargetkan pertumbuhan kredit sekitar 9-11 persen pada tahun ini.

■ NOVITA INTAN

JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk meraup laba bersih Rp 2,37 triliun sepanjang 2021. Realisasi laba bersih tersebut naik 48,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargo mengatakan, kenaikan laba bersih BTN ditopang penyaluran kredit yang tumbuh 5,66 persen, dari Rp 260,11 triliun pada 2020 menjadi Rp 274,83 triliun pada 2021.

"Pertumbuhan kredit tersebut disertai dengan penurunan *non-performing loan* (NPL) *gross* BTN sebesar 3,70 persen pada 2021, berkurang jauh dari 2020 yang berkisar 4,37 persen. NPL *net* juga membaik, dari 2,06 persen pada 2020 menjadi 1,20 persen pada 2021," kata Haru saat pemaparan kinerja BTN 2021 secara virtual, Selasa (8/2).

Menurut Haru, pertumbuhan kredit BTN membuktikan sektor perumahan terbukti cukup tangguh dalam melewati masa krisis ekonomi akibat pandemi. Pembiayaan pembelian rumah tetap mengalir sekalipun daya beli konsumen relatif turun.

"Ini terbukti dari penyaluran kredit perseroan pada 2021 yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan 2020

dan berada di atas rata-rata kredit industri perbankan pada kisaran 5,24 persen," ujar Haru.

Haru menyebutkan, berbagai insentif yang diberikan pemerintah berhasil menjaga daya beli konsumen, sehingga permintaan kredit rumah tetap meningkat. Ia optimistis, saat perekonomian Indonesia pulih dan pandemi berlalu sepenuhnya, permintaan KPR dapat meningkat lebih tinggi.

Sepanjang periode 2019-2020, saat perekonomian nasional terhimpit krisis dan penyaluran kredit industri perbankan mengalami kontraksi 2,5 persen. Haru mengatakan, BTN tercatat sebagai satu dari sedikit bank yang berhasil membuka kembali pertumbuhan kredit.

Haru mengatakan, kredit pembelian rumah (KPR) subsidi masih menjadi penopang utama pertumbuhan kredit BTN dengan kenaikan sebesar 8,25 persen menjadi Rp 130,68 triliun pada 2021 dibandingkan 2020 sebesar Rp 120,72 triliun. Sedangkan, KPR nonsubsidi juga turut menunjukkan kenaikan level 4,14 persen menjadi Rp 83,25 triliun pada 2021 dibandingkan 2020 sebesar Rp 79,93 triliun.

Haru menegaskan, sisi kecukupan likuiditas BTN cukup sehat. Tercatat *loan to deposit ratio* (LDR)

berada level pada 92,86 persen atau membaik dari posisi tahun lalu, yakni 93,19 persen.

"Angka ini lebih baik dari LDR perseroan 2018 dan 2019 yang masing-masing sebesar 103,49 persen dan 113,5 persen. LDR tahun lalu merupakan LDR terendah sepanjang lima tahun terakhir," kata Haru.

Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN menargetkan pertumbuhan kredit sekitar 9-11 persen pada tahun ini. Target tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya, yakni 5,6 persen.

Nixon menyebutkan, sepanjang tahun lalu, penyaluran kredit sebesar Rp 274,83 triliun. Angka tersebut tumbuh 5,66 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 260,11 triliun.

“Angka ini lebih baik dari LDR perseroan 2018 dan 2019 yang masing-masing sebesar 103,49 persen dan 113,5 persen.”

"Dana pihak ketiga (DPK) juga diproyeksikan tumbuh sejalan pertumbuhan kredit sembilan persen sampai 11 persen pada 2022. *Margin* bunga bersih atau *net interest margin* (NIM) ditargetkan sebesar empat persen lebih dan biaya dana atau *cost of fund* (CoF) akan dijaga di bawah 3,2 persen," kata Nixon.

Kinerja BTN Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) BTN juga mencatatkan kinerja positif. Laba bersih BTN Syariah sebesar Rp 185,20 miliar pada 2021, naik 37,33 persen dibandingkan laba bersih sepanjang 2020 yang sebesar Rp 134,86 miliar.

Realisasi laba bersih didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada akhir 2021 tercatat pembiayaan syariah tumbuh 9,93 persen menjadi Rp 275,55 triliun dibandingkan 2020 sebesar Rp 25,06 triliun.

"Kualitas pembiayaan BTN Syariah juga terus membaik dengan *non-performing financing* (NPF) *gross* sebesar 4,32 persen pada 2021 dari sebelumnya 6,53 persen pada 2020," kata Haru.

BTN Syariah juga menghimpun DPK sebesar Rp 29,26 triliun pada 2021 atau naik 22,79 persen dari Rp 23,83 triliun pada 2020. Dengan capaian tersebut, aset UUS BTN tumbuh 16,14 persen menjadi Rp 38,36 triliun pada 2021 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 33,03 triliun.

■ ed: citra istya rini

Telkom Digitalisasi PMO Kopi Nusantara

■ MUHAMMAD NURSAMSARI

JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom melalui Leap-Telkom Digital menghadirkan layanan digital yang berperan dalam pengembangan ekosistem pertanian secara digital bernama Agree. Kehadiran Agree merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap pengembangan digitalisasi di sektor pertanian.

"Agree datang sebagai solusi dari sisi hulu, produksi, sampai hilir pertanian dan terbuka berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di pertanian," kata Direktur Digital Business Telkom Muhammad Fajrin Rasyid di Jakarta, Selasa (8/2).

Fajrin mengatakan, saat ini, Agree tidak hanya bergerak di sektor pertanian, tapi juga sektor perikanan dan peternakan. Ia menyebutkan, lebih dari 45 ribu petani dan lebih dari 100 perusahaan agribisnis tergabung dalam ekosistem Agree.

"Agree juga akan dimanfaatkan BUMN untuk digitalisasi hulu hingga hilir komoditas kopi dalam *project management office* (PMO) Kopi Nusantara," ujar Fajrin.

Fajrin menyampaikan, Agree dengan tambahan fitur *traceability* yang merupakan kolaborasi dengan Distrik Sigma menjadi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dengan menyediakan layanan *track and trace* pemrosesan kopi. Ia juga berharap, hal ini dapat meningkatkan nilai komoditas kopi, baik di pasar domestik maupun global.

Fajrin memastikan, Telkom siap mendukung pengembangan ekosistem pertanian yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan terkait. "Ini akan menjadi sebuah ekosistem yang terintegrasi, mulai petani, pemodal, *off-taker*, asuransi, dukungan pemerintah dan instansi, serta penyedia teknologi yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan petani dan menambah nilai bagi BUMN dan industri," kata Fajrin.

Melalui Agree, lanjut Fajrin, Telkom berkomitmen menciptakan ekosistem pertanian digital yang terhubung dari hulu ke hilir dan mudah dalam *traceability*. Dengan demikian, ungkap Fajrin, hal ini dapat mendukung bangsa Indonesia dalam menciptakan satu data pertanian dan literasi digital bagi sektor pertanian hulu ke hilir.

Selanjutnya, Menteri BUMN Erick Thohir resmi meluncurkan PMO Kopi Nusantara di Lampung pada Ahad (30/1). Ekosistem PMO melibatkan sejumlah BUMN, seperti holding BUMN pangan, Pupuk Indonesia, PTPN III, BRI, Perhutani, dan Telkom, serta asosiasi kopi, pelaku usaha kopi, dan para petani kopi.

Erick berharap, PMO Kopi Nusantara yang terdiri atas BUMN, swasta nasional, asosiasi, dan lembaga *research and development* (R&D) mampu mendorong kemajuan ekosistem industri kopi nasional. Termasuk juga, mengkomodifikasi kepentingan pelaku bisnis kopi serta mendorong industri kopi dalam negeri untuk bersaing secara global.

Erick optimistis, PMO kopi nusantara dapat memperkuat ekosistem industri kopi Tanah Air.

"Dalam membangun ekosistem itu tidak mungkin terjadi kalau masing-masing pihak ego, ekosistem bisa terjadi kalau mau ditaruh di tengah semua kepentingan, तो sila kelima itu kesejahteraan untuk semua," ujar Erick.

Erick mengatakan, program ekosistem kopi tahap pertama menyasar pada enam titik proyek percontohan. Ia menegaskan, upaya penguatan sektor kopi tentu tak hanya dilakukan BUMN semata, tapi memerlukan kolaborasi berbagai pihak. ■ ed: citra istya rini

Prospek Saham PGAS Positif Tahun Ini

■ RETNO WULANDHARI

JAKARTA — Saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGAS diprediksi positif pada tahun ini. Mirae Asset Sekuritas merekomendasikan untuk membeli saham emiten pelat merah yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi ini.

Analisis Mirae Asset Sekuritas Juan Harahap melihat, pergerakan saham PGAS akan banyak diwarnai sentimen positif. Salah satunya adalah peningkatan distribusi gas yang lebih tinggi sepanjang 2021.

PGAS mencatat distribusi gas sebesar *900 billion british thermal unit per day* (BBTUD) atau tumbuh 5,5 persen *month on month* (MoM) pada Desember 2021. Distribusi gas sepanjang 2021 tercatat naik 5,2 persen *secure* tahunan menjadi 871 BBTUD.

Peningkatan angka MoM ini disebabkan karena telah selesai penyewaan blok Conoco-

Phillips pada Oktober-November 2021," kata Juan dalam risetnya seperti dikutip *Republika*, Selasa (8/2).

Disisi lain, segmen transmisi mencatat penurunan sebesar 1,124 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau -6,1 persen MoM pada Desember 2021. Segmen transmisi tercatat lebih rendah menjadi sebesar 1,223 MMSCFD atau -2,5 persen secara tahunan sepanjang tahun lalu.

Mirae Asset Sekuritas memprediksi, PGAS pada tahun ini akan berhasil mencapai angka operasional yang lebih tinggi didukung oleh pemulihan kegiatan ekonomis yang diterjemahkan ke dalam permintaan domestik yang lebih tinggi.

Manajemen PGAS menargetkan distribusi gas yang lebih tinggi sebesar 10 persen secara tahunan serta transmisi gas yang lebih tinggi sebesar dua persen secara tahunan. Hal ini disebabkan adanya potensi tambahan pasokan gas dari proyek interkoneksi pipa Gresik-Semarang (Gressem) yang

akan mulai berproduksi pada semester I 2022.

Mirae Asset Sekuritas merevisi perkiraan jumlah operasional PGAS sepanjang 2022 dengan distribusi gas diharapkan mencapai 1,036 BBTUD. Sementara itu, volume transmisi diperkirakan meningkat menjadi 1,379 BBTUD atau tumbuh sebesar 2,4 persen dari perkiraan sebelumnya.

"Oleh karena itu, kami merevisi pendapatan PGAS 2022 sebesar 10,0 persen menjadi 3,5 miliar dolar AS, yang diterjemahkan ke dalam asumsi laba bersih yang lebih tinggi sebesar 381 juta dolar AS, atau meningkat 13,3 persen dibandingkan dengan asumsi sebelumnya," kata Juan.

Mirae Asset Sekuritas merekomendasikan langkah *trading* buy menjadi buy untuk saham PGAS dengan target harga yang lebih tinggi, yaitu Rp 1.850 dari sebelumnya Rp 1.750.

PGAS mencatatkan pendapatan sebesar 2.254,3 juta dolar AS pada kuartal III 2021 lalu,

PGN mencatat laba operasi sebesar 326 juta dolar AS. PGAS juga berhasil meraih peningkatan laba yang didistribusikan ke induk menjadi 286,2 juta dolar AS pada kuartal III 2021 meningkat dibandingkan periode sama pada 2020 sebesar 53,3 juta dolar AS.

Hal ini disokong dari kinerja operasional yang memperlihatkan tren positif dengan volume niaga gas selama periode Januari-September 2021 sebesar 873 BBTUD dan naik jika dibandingkan volume niaga gas kuartal III 2020 sebesar 812 BBTUD (secara tahunan).

"Untuk volume transmisi pada periode yang sama 2021 sebesar 1,238 MMSCFD. Posisi PGN sebagai Subholding Gas Pertamina semakin memperkuat kinerja konsolidasi dan peningkatan pemanfaatan gas di sektor kilang, transportasi marine, dan tentunya kemudahan akses terhadap pasokan dari hulu," kata Sekretaris Perusahaan PGAS Rachmat Hutama. ■ ed: citra istya rini



PROYEK REKLAMASI Sejumlah alat berat berada di area proyek reklamasi di Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (8/2). Pulau Batam menambah luas wilayahnya dengan reklamasi laut dan menyambungkan sejumlah pulau untuk menarik investasi. Saat ini Pulau Batam memiliki luas wilayah daratan seluas 715 kilometer (km) persegi.



KAMPUNG KULINER Warga melakukan pembayaran nontunai menggunakan QRIS di salah satu lapak petaku usaha kuliner di Jalan Rungkut Lor Gang II, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/2). Pemkot Surabaya meresmikan kampung yang memiliki 71 petaku UMKM dengan hasil produksi berbagai macam jajanan tersebut sebagai Kampung Wisata Kue.

Pedagang Kesulitan Akses Minyak Goreng

Kemendag menjamin pasokan minyak goreng sesuai HET akan lancar dalam sepekan ke depan.

■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengungkapkan, para pedagang masih kesulitan mendapatkan minyak goreng untuk menambah stok. Tak hanya itu, pedagang pasar tradisional juga tidak dapat melakukan retur minyak goreng murah dengan stok lama yang masih menggunakan harga normal.

"Ini laporan riil di lapangan minyak goreng mahal tidak bisa retur. Pedagang juga tidak bisa akses dan bahkan ada semacam kelangkaan karena masyarakat susah mencari minyak goreng," kata Ketua Umum APPSI Sudaryono saat dihubungi *Republika*, Selasa (8/2).

Ia mengatakan, Kemendag telah menyampaikan informasi bahwa para pedagang dapat melakukan retur minyak goreng dengan masing-masing distributor untuk bisa mengganti stok dengan harga yang sesuai aturan pemerintah. Kendati demikian, menurut dia, distributor tetap menjual dengan harga di atas ketentuan.

Rata-rata harga yang diterima pedagang yakni berkisar Rp 17 ribu-Rp 19 ribu per liter. Dengan harga beli itu, harga jual ke konsumen dibandarkan antara Rp 20 ribu-Rp 21 ribu per liter.

Meski demikian, Sudaryono mengatakan, APPSI telah menjalin kerja sama dengan ID Food selaku *holding* BUMN Pangan untuk mendistribusikan minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET). "Pekan lalu kita drop 16 ribu liter ke Pasar Induk Kramat Jati yang dikoordinasikan oleh APPSI. Saya terus koordinasi agar langkah ini bisa direplikasi di banyak titik karena APPSI ada di 300 kabupaten/kota," ujar dia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengingatkan para perusahaan distributor minyak goreng untuk tidak menolok pengajuan retur dari pedagang pasar tradisional. Kemendag pun meminta pedagang pasokan untuk dapat melakukan retur jika terdapat distributor nakal yang tidak mau menyerahkan pasokan minyak goreng baru dengan harga murah.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nur-

wan mengatakan, kewajiban itu berlaku untuk para distributor yang memang sudah memiliki stok minyak goreng baru dengan harga murah. "Distributor yang sudah punya stok baru dengan harga murah jangan paksa pedagang habiskan dulu stok lama yang mahal. Kalau (pedagang) temuan distributor yang begitu, laporkan," kata Oke.

Oke pun meminta pedagang untuk memaklumi jika mekanisme retur minyak goreng butuh waktu. Pemerintah pun memaklumi jika pedagang pasar masih menjual minyak goreng dengan harga tinggi yang tidak sesuai dengan kebijakan HET.

"Sampai saat ini kami masih melakukan pengawasan dengan pola kontrol sosial. Pedagang kecil yang menjual minyak goreng dengan mahal belum kami lakukan tindakan tegas. Tapi, kalau ritel modern menjual di atas HET, akan kami tindak," katanya.

Kemendag menjamin pasokan minyak goreng murah sesuai HET akan lancar dalam sepekan ke depan hingga ke wilayah Indonesia timur.

Kemendag pun memastikan mengontrol ketat suplai produksi minyak sawit untuk dalam negeri sebelum di ekspor oleh para produsen.

Oke mengatakan, saat ini tercatat ada 40 juta liter minyak sawit yang siap didistribusikan. Volume itu me-

rupakan hasil dari kebijakan *domestic market obligation* (DMO) sebesar 20 persen dari pasokan minyak sawit mentah (CPO) yang akan diekspor.

"Saya sudah mendapatkan laporan itu dan sudah diekspose ke wilayah timur. Jadi, saya pastikan dalam sepekan ke depan pasokan sudah lancar," kata Oke.

Oke mengatakan, pasokan minyak goreng hasil DMO akan mulai mengisi pasar-pasar tradisional dalam kemasannya arang seharga Rp 1.500 di tingkat konsumen. Diharapkan, dengan kelancaran distribusi minyak curah untuk pasar, tekanan permintaan terhadap toko ritel modern bisa dikurangi.

Oke menjelaskan, kapasitas maksimal penyimpanan minyak goreng di ritel modern sekitar 20-25 juta liter per bulan. Jumlah itu dinilai tak signifikan jika dibandingkan total kebutuhan minyak goreng untuk masyarakat yang mencapai 327 juta liter per bulan.

Stok minyak goreng di toko ritel, berdasarkan laporan terakhir yang diterima Kemendag telah terisi sekitar 12 juta liter atau 50 persen dari kapasitas penyimpanan. Artinya, di toko ritel saat ini sudah tersedia hanya saja mungkin masih dalam perjalanan. Di Jawa itu cepat, yang saya perhatikan itu di timur," katanya. ■ *ahmad fikri noor*

BSI Perkuat Layanan Call Center

■ LIDA PUSPANGTYAS

JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperkuat layanan *call center* guna meningkatkan perubahan perilaku nasabah. BSI membangun *call site* di Semarang, Jawa Tengah, untuk meningkatkan kualitas layanan serta peningkatan *accessibility* *call* bagi nasabah. Direktur Information Technology BSI Achmad Syafi menyampaikan, BSI *Call Site* Semarang adalah implementasi *business continuity plan* dan antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kehadiran BSI *Call Site* Semarang melengkapi infrastruktur BSI *Call Site* yang telah dimiliki di area Jabodetabek. "Hal ini seiring dengan kesiapan Bank Syariah Indonesia untuk fokus ke pengembangan digital," kata Achmad melalui keterangan pers, Selasa (8/2).

Layanan tersebut dapat digunakan untuk transaksi sederhana yang bisa dilakukan di kanal elektronik BSI Mobile, ATM, BSI Net, dan CMS untuk layanan nasabah korporat. Terobosan ini dilakukan karena melihat perubahan perilaku masyarakat pada era digital yang serbadinamis.

Menurut Achmad, perubahan zaman harus diimbangi dengan percepatan inovasi layanan. Hal itu pun dilakukan BSI dalam hal percepatan dan peningkatan kompetensi *staff call center* sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.

SEVP Operation BSI Wahyu Avianto menyampaikan, BSI *Call Centre* siap menerima panggilan masuk sebanyak 4.500 panggilan per hari. Lebih dari 200 *staff call center* siap melayani nasabah untuk informasi rekening, produk dan layanan, lokasi ATM, kantor cabang, informasi promo yang sedang berjalan, serta penerimaan pengaduan nasabah.

"BSI *Call Site* Semarang ini akan mempercepat proses layanan bagi masyarakat yang mengakses BSI melalui *call center*," ujarnya.

Di sisi lain, BSI juga terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam bertransaksi. Era digital dapat pula membuka akses pelaku kejahatan untuk melakukan hal yang merugikan masyarakat.

Untuk itu, BSI terus aktif melakukan sosialisasi melalui media sosial dan juga pada *nada sambung call center* yang berisi informasi. Nasabah harus selalu menjaga data keamanan pribadi seperti nomor PIN, kata sandi, *user id*, kode OTP, kode CVV, dan data keamanan lainnya. BSI pun selalu menyosialisasikan agar masyarakat selalu mengakses informasi resmi melalui akun resmi perseroan.

Sebelumnya, BSI telah menegaskan komitmen menjalankan penguatan digital pada tahun ini. Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan, BSI terus berkomitmen menjaga kinerja positif. Hal itu dilakukan dengan fokus menumbuhkan bisnis syariah yang berkelanjutan dan sehat, mengedepankan *free based income*, dan akselerasi digital.

Hery mengatakan, pada 2022, BSI akan bertumbuh dari sisi pembiayaan maupun DPK. Perseroan pun berusaha menjaga efisiensi biaya dan menekan biaya dana, meningkatkan dana-dana murah, dan meningkatkan keuntungan dari *free based income*. ■ *ahmad fikri noor*

Kementan Ajak Petani Wujudkan Empat Kali Tanam Setahun

■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Kementerian Pertanian mendorong para petani untuk bisa memproduksi padi dengan empat kali tanam dan panen atau IP 400. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga mengajak petani untuk melakukan penanaman padi dengan menggunakan varietas unggul yang bisa menarik banyak negara untuk mengimpor beras dari Indonesia.

"Karena itu, varietas tidak boleh pakai yang kurang, harus yang lebih jang dan lebih cepat. Varietasnya harus yang lebih bagus. Kalau perlu ini kita targetkan untuk ekspor," kata Syahrul saat mengunjungi sentra pertanaman padi di Bone, Sulawesi Selatan, seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (8/2).

Syahrul mengatakan, Bone sebagai salah satu sentra padi harus mampu membuktikan diri sebagai daerah yang memproduksi padi lebih banyak. De-

ngan begitu, Sulawesi Selatan ke depan dapat kembali menjadi percontohan produksi padi nasional.

"Daerah lain saya yakin bisa menjadi contoh bagi pertanian nasional. Oleh karena itu, semua petani yang ada ini harus dilatih dulu, baik dari sisi teknologi maupun cara menanamnya. Ingat yang paling tinggi dari modal itu bukan uang, tapi semangat dan kebersamaan," katanya.

Syahrul mengatakan, secara keselu-

ruhan, Indonesia termasuk negara subur dengan produksi beras yang surplus. Karena itu, Indonesia tidak melakan impor dalam beberapa tahun terakhir.

"Pada 2020, stok kita 7 juta ton dan 2021 stok kita sampai 9 juta ton. Kalau ke depan kita bisa terus-tegas tidak impor maka negara kita termasuk negara yang swasembada pangan di bidang beras. Apalagi, nilai tukar petani kita naik, artinya kesejahteraan petani juga naik," katanya. ■ *ahmad fikri noor*

Sementara itu, Wakil Bupati Bone Ambo Dalle mengatakan, wilayahnya selalu siap melaksanakan program Kementan, terutama pada peningkatan produksi hingga empat kali panen. "Kita akan mendukung program Kementan untuk kegiatan optimalisasi produksi pertanian. Alhamdulillah, kami adalah salah satu pemerintah yang mendukung agar petani di Bone bisa menanam empat kali dalam setahun," ujarnya. ■ *ahmad fikri noor*

Assalamualaikum wr.wb.
Ada yang menyampaikan bahwa bunga lembaga keuangan konvensional itu boleh, ada pula yang menyampaikan bahwa itu syubhat dan bahkan haram. Sebenarnya bagaimana tuntunannya terkait bunga bank konvensional ini? Mohon penjelasan Ustadz.

Sapto, Tulungagung

Waalaikumussalam wr.wb.
Praktik pembungaan uang telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan diarahkan. Hal itu baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu sebagaimana Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang *interest* atau *fa'idah*. Syubhat tentang kehalalan bunga lembaga keuangan konvensional (LKK) itu terbantahkan dengan alasan-alasan berikut. Pertama, *tashawwur* (gambaran masalah) yang tidak pada tempatnya. Kesiimpulan hukum sangat terkait erat dengan gambaran masalah yang menjadi objek hukum. Jika gambarannya benar maka kesimpulan hukum akan sesuai. Tetapi, jika gambaran keliru maka kesimpulan hukumnya



KONSULTASI SYARIAH

DIAJUK OLEH DR ONI SAHRONI
Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Bunga Lembaga Keuangan Konvensional

akan keliru juga.

Kesimpulan bunga bank itu halal didasarkan pada gambaran tabungan di bank konvensional yang sering dinisbatkan pada cerita di mana seorang menerima pertanyaan dari pihak bank tentang ketentuan hukum tabungan. Ia kemudian menanyakan balik, "Apakah tabungan itu titipan atau kredit?" Kemudian dijawab oleh pihak bank bahwa itu titipan, bukan kredit. Dari jawaban itu disimpulkan bahwa dengan titipan maka bank adalah pihak yang diberikan kuasa untuk investasi dan hasilnya yang dibagihasilkan antara nasabah dengan bank.

Jawaban pihak bank bahwa itu

titipan tidak bisa dijadikan rujukan karena subjektif. Bahkan, kesimpulan tersebut merupakan khayalan dan tidak ada wujudnya pada praktiknya. Ini karena tidak ada satu pun bank konvensional yang menerima titipan.

Akan tetapi, transaksi yang dilakukan adalah kredit. Bahkan, peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa transaksi antara pemilik tabungan dan bank konvensional adalah kredit, bukan titipan.

Saat fakta dan realitanya transaksi antara bank dan pemilik dana pihak ketiga atau pamanfaat dana adalah kredit, maka tambahan yang diperjanjikan atas kredit yang diterima bank itu adalah

riba. Sebagaimana kesimpulan para ahli fikih, "*Kullu qardin jarra naf'an fahu riba idza kana masyruthan fih naf'un lil muqridh*" (setiap utang-piutang yang memberikan manfaat [kepada kreditor] adalah riba jika dipersyaratkan).

Kedua, menyalahi keputusan seluruh jlitah kolektif dunia. Di antaranya keputusan Lembaga Riset Al-Azhar (Majma' Buhts al-Islamiyah) di Kairo, Mesir, pada Muharram 1385 H atau Mei 1965, Mukhtar Islamiyah Syariah Internasional (di Makkah al-Mukarramah pada 21-26 Februari 1976 yang dihadiri lebih dari 300 ulama dan para ahli fikih, ekonomi, dan keuangan. Selain itu, keputusan Majma' Fikih

Internasional Organisasi Konferensi Internasional pada 10-16 Rabul Tsani 1406 H/22-28 Desember 1985, Keputusan Lembaga Fikih Rabbith Alami Islami di Makkah pada 12-19 Rajab 1406 H, Bayan Ulama al-Azhar di Makkah pada 1989, penjelasan Majma' Fuqaha asy-Syariah di Amerika Serikat pada 2003, dan fatwa-fatwa Dar al-Ifta' al-Mishriyah pada 1979, 1980, dan 1981.

Ketiga, kesimpulan bunga bank konvensional halal itu hanya didasarkan pada potret skema transaksi dan tidak melihat secara utuh bagaimana aktivitas lembaga keuangan konvensional secara umum. Di antaranya termasuk bagaimana dana yang diterima itu akan disalurkan pada kredit yang tidak mempertimbangkan halal dan haram.

Karena tidak ada regulasi dan pengawasan yang mewajibkan kredit bank konvensional diberikan kepada objek kredit usaha yang halal, maka kredit semua usaha dan peruntukan kredit, baik halal atau tidak, itu boleh menerima kredit dari bank konvensional.

Poin ini yang hilang dari pertimbangan kesimpulan fatwa kehalalan bunga bank konvensional. *Wallahu a'lam.* ■



Urgensi Regulasi Melindungi Data Pribadi

Lebih dari 60 persen masyarakat masih belum mengetahui keberadaan RUU PDP.

■ NOER QOMARIAH KUSUMAWARDHANI

Dengan meningkatnya interaksi masyarakat di dunia digital, kebutuhan terhadap ekosistem digital yang kondusif dan aman makin diperlukan, terutama menyangkut data pribadi. Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang telah melewati uji publik diharapkan mampu menjadi instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelindungan data pribadi di Indonesia.

Namun, survei Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Katadata Insight Center bertajuk "Survei Persepsi Masyarakat dan Kesiapan Industri terhadap Pelindungan Data Pribadi" tahun lalu menunjukkan, lebih dari 60 persen masyarakat masih belum mengetahui keberadaan RUU PDP, bahkan hanya 31,8 persen perusahaan yang mengetahuinya. Memperingati momentum Hari Privasi Data Internasional yang jatuh setiap 28 Januari, Kominfo, Vida, dan Indonesia Cyber Security (ICSF) mengajak masyarakat dan pelaku industri digital untuk makin teredukasi akan keberadaan RUU PDP.

Saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memberitahukan secara tertulis pada pemilik data pribadi, apabila terjadi kegagalan dalam pelindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya (*data breach*-Red).

Nantinya, RUU PDP yang sedang dibahas di DPR akan mengatur kebijakan lebih detail di samping

definisi data dan hak pemilik data pribadi. Beberapa pengaturan tersebut, yakni penegasan kewajiban dan tanggung jawab *data controller* dan *data processor*.

Termasuk, pembentukan pejabat *data protection officer* (DPO), sanksi administrasi, hingga sanksi pidana. Plt Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Teguh Ariefadi, mengungkapkan, di Kemenkominfo pemahaman perlindungan data tidak lagi diambil dengan definisi perlindungan data pribadi.

Namun, di RUU PDP, kata-kata perlindungan dikoreksi dan lebih tepat menggunakan kata-kata pelindungan. "Kalau perlindungan itu adalah tempat berlindung sementara kalau pelindungan adalah tata cara atau metode untuk melindungi," ujar Teguh dalam acara pelatihan media *Vida x ICSF Media Clinic Eps 3: "Sambut Hari Data Privasi Internasional, Seperti Apa Implementasi Kebijakan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia?"*, pekan lalu.

Inilah, kata dia, mengapa RUU PDP dengan mempertimbangkan pendapat para ahli bahasa menggunakan terminologi pelindungan data pribadi. Teguh juga menyebutkan RUU PDP saat ini berada di tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

RUU Pelindungan Data Pribadi itu sendiri sampai saat ini masih tahap pembahasan DIM. Sudah sekitar 45 persen sampai 50 persen DIM yang sudah dibahas. "Dan harapannya di awal tahun ini sebetulnya kami sudah bersurat ke DPR untuk meminta melanjutkan pembahasan yang terkait dengan Daftar Inventarisasi Masalah dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi," kata Teguh.

Menurut dia, RUU PDP bertujuan



“**UU PDP bertujuan membangun keseimbangan antara hak dan kewajiban baik itu pemilik data maupun pihak yang mengendalikannya ataupun memproses data.**”



juan membangun keseimbangan antara hak dan kewajiban baik itu pemilik data maupun pihak yang mengendalikannya ataupun memproses data. Semua itu pun diatur, mulai dari bagaimana perolehan data yang benar, bagaimana mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, setelah berhasil di analisis bagaimana menyimpannya.

Tak ketinggalan, bagaimana perlakuan data ketika berhasil disimpan, ketika ada data yang mau diperbarui, bagaimana ketika data ditampilkan, dibuka ke publik, bagaimana cara mengumumkannya, cara mentransfer, hingga memindahkan data.

Tanda tangan digital

Dalam pembahasan aturan implementasi terbaru, pelanggan atas pemenuhan kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip PDP akan dikenai sanksi administratif. Berdasarkan PP 71/2019, terdapat beberapa prinsip dalam hal pengumpulan dan pemrosesan data pribadi.

Pertama, dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi, kemudian dapat dilakukan sesuai dengan tujuannya, dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi, dan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses, serta

pengungkapan yang tidak sah. Co-founder dan CEO *Vida Sati Rasananto* menjelaskan, sebagai penyelenggara sertifikat elektronik (PsE), sudah menjadi peran dan tanggung jawab *Vida* untuk turut membantu misi pemerintah menciptakan ekosistem digital yang aman di Indonesia. "Lewat teknologi dan standar kelas dunia, *Vida* menjamin keamanan data pribadi konsumen dalam layanan proses verifikasi identitas daring yang kami tawarkan, yang lazimnya dibutuhkan saat proses *onboarding* ke platform digital," ujar Sati.

Menurut dia, misi ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. Terutama, *Vida* melihat urgensi penerapan aturan pelindungan data pribadi, RUU PDP, demi mengurangi risiko penyalahgunaan identitas lebih jauh dan melindungi identitas digital masyarakat.

Sati menjelaskan, sebagai PsE, *Vida* memiliki beberapa prinsip dalam menjamin identitas digital yang sejalan dengan RUU PDP. Dengan prinsip-prinsip identitas digital yang dibawa oleh *Vida*, di antaranya *secure*, *consent*, dan *transparan*. Di mana, pengguna layanan verifikasi identitas dan tanda tangan elektronik *Vida* akan lebih mudah mengontrol informasi krusial yang mereka miliki.

Berebak sertifikat elektronik *Vida*, keputusan autentikasi layanan digital atau proses tanda tangan elektronik ada pada pengguna sepenuhnya. "Vida menjaga data pribadi pengguna dan digunakan hanya untuk keperluan pengguna, dengan menerapkan enkripsi *end-to-end* pada seluruh transmisi data," kata Sati.

Sebagai PsE berinduk di bawah Kemenkominfo, *Vida* memiliki pembuktian hukum tertinggi dalam hal tanda tangan elektronik (TTE). TTE *Vida* juga diakui di lebih dari 40 negara, karena *Vida* adalah PsE pertama dari Indonesia yang masuk dalam *Adobe Approved Trust List* (AATL) atau daftar rekan terpercaya Adobe.

■ ed setyanawati@vivakantera

Digital Trust dan Pertumbuhan Ekonomi

Sering pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat, kepercayaan pengguna dalam berinteraksi dan melakukan transaksi secara digital menjadi hal yang fundamental. Digital trust pun menjadi dasar bagi masyarakat untuk menggunakan teknologi dan membangun kepercayaan terhadap industri digital.

Hal ini pun diyakini dapat menjadi kunci pertumbuhan ekonomi digital pada 2022. Digital trust pun memiliki peran penting bagi pertumbuhan industri digital. Makin pelaku industri digital mampu menjamin keamanan data pengguna, akan makin besar dampak positif yang ditimbulkan untuk keberlangsungan industri.

Jaminan atas digital trust ini makin relevan dengan diadagkannya tiga isu prioritas di sektor digital yang akan dibahas dalam *Presidensi G-20* oleh Kemenkominfo. Tiga isu prioritas Digital Economy Working Group adalah pemulihan dan konektivitas pascapandemi, literasi dan keterampilan digital, serta arus data lintas batas negara yang terpercaya.

Semuel Arijanti Pangarapan selaku direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan, memasuki ranang digital itu harus membangun kepercayaan. Sertifikat elektronik pun, kata dia, telah menjadi pendorong kemajuan ekosistem digital nasional karena menjadi penanda bukti keabsahan bagi layanan digital.

Seperti untuk digunakan dalam dokumen dan transaksi digital ataupun menjadi penanda identitas digital, yang memberi kemudahan pada layanan digital masyarakat Indonesia. "Studi kami dari beberapa negara, sertifikat elektronik menjadi sebuah keniscayaan untuk drealisasikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital," ujar Semuel.

Identitas digital tersebut dapat digunakan dalam berbagai transaksi seperti dalam pembelian barang secara daring, membuka rekening bank atau industri keuangan lainnya. Inovasi seperti identitas digital ini tentunya selaras dengan apa yang diangkat Indonesia dalam *Presidensi G-20*.

Menurut Semuel, ke depannya, Kemenkominfo akan terus menyiapkan regulasi yang berkaitan dengan pertumbuhan identitas digital Indonesia. Tujuannya, untuk membangun ekosistem digital berbasis digital trust, dan melakukan penguatan SDM digital dalam negeri. ■ ed setyanawati@vivakantera



Menuju Pertumbuhan Inklusif

Kerja sama pemerintah-swasta menjadi instrumen penting dalam memanfaatkan teknologi sekaligus mengurangi potensi risiko.

■ OLEH AGUNG P. VAZZA

Selama sekitar dua tahun lebih pandemi menghantui Asia Tenggara, sebagian kalangan bahkan berpendapat masa-masa terburuk belum benar-benar terlewati. Apalagi, dengan munculnya varian baru, pemulihan ekonomi bakal bergantung pada bagaimana penanganan pandemi, terutama terkait percepatan vaksinasi dan langkah-langkah merespons munculnya varian baru. Kombinasi percepatan vaksinasi dengan langkah merespons kemunculan varian baru merupakan kunci penting penanganan pandemi.

Varian baru virus memang membawa perekonomian global pada posisi lemah saat memasuki awal 2022. Pesatnya penyebaran Omicron, varian baru virus Corona, memaksa banyak negara kembali memberlakukan pembatasan aktivitas. Pembatasan yang berujung kembali terhambatnya perputaran roda perekonomian. Di sisi lain, terjadi kenaikan harga energi serta disrupsi pada rantai pasokan global, memunculkan risiko inflasi, terutama di negara-negara maju, juga sebagian negara berkembang. Lambatnya pemulihan ekonomi di Cina akibat lambatnya pertumbuhan konsumsi swasta, juga cukup membebani prospek pertumbuhan ekonomi global.

Data World Economic Outlook (WEO) Januari 2022 yang dipublikasikan Dana Moneter Internasional (IMF), memperlihatkan pertumbuhan global yang pada tahun lalu diperkirakan mencapai 5,9 persen, diproyeksikan temoderasi menjadi 4,4 persen pada 2022. Posisi ini setengah persen lebih rendah dibanding proyeksi WEO yang dirilis Oktober tahun lalu. Posisi yang sama juga memunculkan terjadi perlambatan pada dua perekonomian terbesar dunia, Amerika Serikat (AS) dan Cina. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan kembali menurun ke posisi 3,8 persen.



Investasi ditengarai menjadi salah satu faktor penting proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara

Ketika perekonomian global masih berada dalam cengkeraman pandemi, maka tak pelak strategi yang paling tepat adalah strategi kesehatan. Akses global terhadap vaksin menjadi penting demi menekan risiko yang lebih besar. Fakta ini jelas membutuhkan peningkatan produksi dan pasokan vaksin, alat kesehatan, termasuk distribusi internasional yang lebih *fair*. Di sisi ekonomi, kebijakan moneter di banyak negara diprediksi masih akan ketat guna meminimalkan tekanan inflasi. Sementara, dari sisi fiskal, diperkirakan lebih memprioritaskan belanja sosial dan kesehatan, serta menjaga akses terhadap likuiditas.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, kawasan Asia Tenggara, khususnya lima negara utama kawasan (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura) tergarbar tetap memiliki jalur pertumbuhan yang cukup kuat. Data WEO

Januari 2022, memperlihatkan ASEAN-5, setelah terpukul pada 2020 di posisi -3,4 persen, mulai berangkit kembali pada 2021, dan tahun ini diperkirakan mencapai posisi 5,6 persen. Selanjutnya, tahun depan, pertumbuhannya diproyeksikan lebih pesat ke posisi enam persen.

Investasi ditengarai menjadi salah satu faktor penting terkait proyeksi pertumbuhan Asia Tenggara tersebut. World Economic Forum (WEF), dalam situs resminya, mencatat, pandemi memang merontokkan aktivitas investasi global lantaran ketidakpastian, pembatasan kegiatan, serta disrupsi rantai pasokan, sehingga memaksa penundaan investasi korporasi multinasional. Kondisi serupa terjadi pula di Asia Tenggara, yang mencatat penurunan investasi asing langsung (FDI) dari 182 miliar dolar AS pada 2019 menjadi 137 miliar dolar AS pada 2020.

Hanya saja, terlepas dari penurunan tersebut, lima negara utama Asia Tenggara tetap menjadi daya tarik sebagai tujuan investasi. Kontribusi kawasan ini terhadap FDI global justru mengalami peningkatan dari 11,9 persen pada 2019, menjadi 13,7 persen pada 2020. Dalam kurun yang sama, pangsa FDI intra-kawasan juga meningkat dari 12 persen menjadi 17 persen. Berdasarkan itu, WEF juga melihat Asia Tenggara memiliki prospek investasi yang cukup cerah. Ini digambarkan dengan memaparkan data laporan ASEAN Development Outlook (ADO), yang mengungkap total PDB sepuluh negara Asia Tenggara pada 2019 mencapai 3,2 triliun dolar AS, sekaligus menjadikan kawasan sebagai perekonomian terbesar kelima dunia. Diperkirakan pada 2030 menjadi perekonomian terbesar keempat dunia.

Publik-Privat

WEF melihat proyeksi terhadap perekonomian Wawasan Asia Tenggara jadi cukup menjanjikan lantaran beberapa faktor. Salah satu faktor penting dimaksud adalah terkoordinasinya respons terhadap pandemi. Seluruh negara anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) memutuskan mengambil langkah terkoordinasi untuk merespons pandemi. Salah satu bentuk koordinasi tersebut adalah Hanoi Plan of Action on Strengthening ASEAN Economic Cooperation and Supply Chain Connectivity in Response to the COVID-19 Pandemic. Dalam konteks ini, setiap negara anggota berkolaborasi terkait kelancaran arus barang kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan ketahanan jaringan pasokan kawasan.

Selain itu, guna mendukung upaya pemulihan sekaligus membangun ketahanan, ASEAN juga meluncurkan dana khusus seperti COVID-19 ASEAN Response Fund melalui kerja sama dengan mitra eksternal pada ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED). Kerja sama ini diyakini mampu meningkatkan kesehatan regional, sekaligus menjadikan kawasan lebih siap menghadapi kondisi darurat terkait kesehatan publik.

Faktor lain yang tak kalah penting bagi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara adalah implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada 1 Januari 2022. Kesepakatan ini mencakup negara Asia Tenggara dan empat negara mitra (Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru). Implementasi kesepakatan tersebut menjadi Asia Tenggara tetap menjadi kawasan dengan keterbukaan pasar sekaligus menguatkan langkah menuju integrasi ekonomi menuju pemulihan inklusif pasca-pandemi.

RCEP sendiri disebut-sebut sebagai kesepakatan perdagangan bebas regional terbesar

dunia, lantaran mencakup 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global dan 30 persen dari populasi dunia, serta sepertiga dari perdagangan barang dan jasa global. Kunci penting dari kesepakatan ini adalah terbukanya perdagangan, investasi, jasa, dan e-commerce, intra-RCEP. Keterbukaan itu menjadi relevan dengan upaya menguatkan rantai nilai, keterbukaan pasar, serta efisiensi investasi di kawasan. Apalagi, korporasi dari negara yang tidak teracup dalam RCEP tetap bisa memanfaatkan RCEP dengan merelokasi investasi dan beroperasi di kawasan.

Kesepakatan tersebut diperkirakan semakin menguatkan daya tarik investasi di kawasan. Saat ini saja, 40 persen investasi di negara-negara ASEAN berasal dari negara anggota RCEP, dan 24 persen dari jumlah tersebut berasal dari negara anggota RCEP non-ASEAN. Ini berarti peluang untuk mendorong investasi langsung di kawasan.

Selain faktor-faktor tersebut, faktor lain yang juga menjadi alasan bagi prospek pertumbuhan ekonomi kawasan adalah revolusi industri 4.0 dan transformasi digital. Kawasan ini dinilai juga sudah mengadopsi secara terkoordinasi strategi revolusi industri keempat (4IR), yang ditandatangani saat pertemuan puncak ke-38 dan ke-39 ASEAN, serta ASEAN

Agreement on Electronic Commerce. Fakta ini membuka peluang bagi kawasan untuk terus mendorong transformasi digital dan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur digital, dan kecerdasan buatan.

Belum lagi keberadaan ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF), yang diharapkan bisa memperkuat konektivitas digital sebagai prioritas regional sekaligus pemulihan ekonomi. Sebuah survey yang dilakukan WEF dan Sea, mengungkapkan negara yang lebih digital cenderung lebih memiliki ketahanan ekonomi selama pandemi.

Seluruh faktor-faktor tersebut diprediksi membawa seluruh pemangku kepentingan secara bersama memaksimalkan manfaat teknologi sekaligus mengurangi potensi risiko. Dan kondisi ini menunjukkan bagaimana kerja sama pemerintah dan swasta (publik-privat) menjadi instrumen penting baik bagi dunia usaha maupun pemerintah, dalam pengembangan ekosistem digital dan inovasi. Pemerintah jelas memainkan peran penting terkait insentif bidang penelitian dan pengembangan. Sedangkan sektor swasta berperan sebagai penggerak transformasi digital melalui investasi teknologi di kawasan. Maka, tak pelak, penguatan kerja sama pemerintah dan swasta, menjadi kunci menuju pertumbuhan inklusif. ■



MENANGKAP KEINDAHAN WASTRA DARI LENSAM KAMERA



Film dokumenter ini mengulas kisah wastra dari berbagai daerah di Indonesia.

■ UMI NUR FADHILAH

Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memproduksi film dokumenter tentang ragam wastra di Indonesia. Dalam bahasa Sansekerta, wastra memiliki arti selendang kain.

Film berjudul *Cerita Wastra* tersebut dibagi menjadi empat bagian yakni episode Kawasan Mandalika, Borobudur, Maumere, dan Toba. Film yang masing-masing berdurasi 24 menit ini tayang di kanal YouTube Budaya Saya.

Lewat lensa kamera, *Cerita Wastra* mampu menangkap kisah di balik keindahan dari berbagai sudut nusantara. Setiap daerah menampilkan budayawan dan perajin wastra yang memberikan informasi detail mengenai seluk-beluk wastra.

Film pertama yaitu *Cerita Wastra Episode Mandalika* telah tayang sejak 2 Februari 2022. Lombok dikenal sebagai tanah penghasil kain tenun indah. Dalam film ini, disebutkan bahwa Lombok adalah tujuan migrasi bangsa-bangsa yang berlangsung cukup lama, sehingga ditemukan banyak sekali variasi adat istiadat dan budaya.

"Berbicara tentang kebudayaan, ini berhubungan dengan tiga aspek," kata Budayawan Sasak, Lalu Bayu Windia, dikutip dari laman YouTube Budaya Saya, Senin (7/2).

Aspek pertama berkaitan dengan norma dan nilai yang mewujudkan menjadi sistem teologi dan cara bersipat. Kedua, ada yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat berpolo, inilah yang melahirkan adat tradisi. Ketiga, berkaitan dengan aspek hasil karya, cipta, rasa yang mewujudkan menjadi hasil tenun.

Dalam film dokumenter itu, kain tenun dikisahkan sebagai wujud wastra yang menjadi jati diri masyarakat Lombok. Kain tenun menjadi bagian dari masyarakat selama ribuan tahun.

Tak hanya indah, nilai filosofis secara simbolis disampaikan lewat motif yang beragam. Variasi motif ini, sekali lagi, dipengaruhi oleh kultur budaya dan kepercayaan yang hidup di Lombok dari generasi ke generasi. Seperti di Desa Bayan, Lombok Utara, yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Menurut juru kunci Masjid Kuning Bayan, Raden Palasari, kain bisa menjadi pembeda dan penanda strata sosial masyarakat. Misalnya, masyarakat biasanya hanya menggunakan kemben, sementara bangsawan menggunakan sampur.

Kain tenun Bayan masih dibuat secara tradisional dengan tangan dan dibantu alat tenun sederhana dari kayu. Perajin tenun Bayan, Mami, menjelaskan, tenun masih dipertahankan di Lombok Utara karena masyarakat adat masih membutuhkannya.

"Kami turuti aturannya itu untuk mencukupi

dan melengkapi pakaian masyarakat adat," ujar Mami.

Masyarakat Bayan menganggap kain tenun sebagai hal sakral. Khusus motif, setelah Islam masuk, wujud makhluk hidup mulai dihindari atau disamarkan. Kini, motif tumbuhan lebih dominan pertanda Islam masih kuat dijalani di Bayan.

Menurut warga Sukare, Satriadi, dahulu perempuan yang ada di Desa Sukare harus bisa menenun. Jika tidak bisa menenun, perempuan tidak boleh menikah.

Karena itu, sejak kecil, perempuan di Sukare sudah belajar menenun hingga ketika dewasa sudah pandai. Kepandaian menenun menjadi syarat perempuan Sukare menikah. Karena itu, ada ungkapan, "Perempuan tidak bisa disebut perempuan Sasak jika tidak bisa menenun."

Dari Lombok, film dokumenter memotret wastra dari Borobudur. Berbeda dengan penenun di Lombok, wastra dari Borobudur berasal dari rumah-rumah tua. Perempuan-perempuan menggambar batik dengan hati hingga melahirkan ikon budaya.

Perjalanan batik di Borobudur dijelaskan tak semulus batik keraton. Tokoh komunitas, Muhammad Hatta, menjelaskan bahwa pembatik Borobudur sempat tak ada beberapa generasi. Kemudian, Balai Konservasi Borobudur mencoba mengaktualisasikan relief-relief dalam bentuk seni, salah satunya desain batik, tari, musik, dan sebagainya.

Pembatik pernah bertemu arkeolog untuk memotret relief Borobudur dengan berbicara norma masa yang boleh dan tidak boleh. Pembatik menyutunya sebagai motif di Borobudur, yaitu motif hani yang terinspirasi Candi Borobudur.

Di Lasem, perwakilan Yayasan Lasem Heritage, Baskoro Pop menjelaskan, ada perpaduan budaya antara Jawa, Tionghoa, dan santri. Dokumenter tentang Lasem menunjukkan bagaimana potret rumah-rumah di daerah itu yang bercampur antarbudaya.

Pada 1800-an bisnis batik mulai berkembang di Lasem. Pada masa jayanya, sekitar 1930-an, ada hingga 120 pengusaha batik dengan 4.000-an perajin. Kini, jumlahnya berkurang drastis. Rumah Batik Nyak Kik dan Sekar Kencono adalah dua yang masih bertahan.

Bergerak ke Surakarta, ini adalah daerah dengan tradisi batik pedalaman yang disebut batik keraton. berkembang di sekitar keraton, memiliki nuansa warna yang bersahaja, seperti hitam, cokelat, danogan.

Di dalam bunker-bunker, rumah tua, atau lorong-lorong, batik di Surakarta terpusat di dua sentra utama, yaitu Laweyan dan Kauman. Ketua Kampung Batik Laweyan, Alpha Febela, menjelaskan, batik sudah ada sejak zaman penjajahan. Dia memiliki dokumentasi terpinet tentang motif-motif batik setempat.

Museum Batik Danarhadji juga merangkum

kisah-kisah batik lengkap. Tempat itu memiliki koleksi batik kuno hingga 10 ribu helai, mulai dari batik Belanda yang dicetuskan Carolina Josephina hingga motif dongeng Eropa.

Batik adalah tentang mendokumentasikan tradisi pada masa lalu, menjadi harapan pada masa sekarang, serta warisan yang harus dijaga untuk masa depan. Batik membutuhkan banyak generasi untuk bertahan dan berkembang.

Bergerak ke Maumere, ada kain tenun ikat Sik-kaya yang dikenal pete lorung (g). Sikka adalah jati diri, identitas, budaya yang hadir di setiap perayaan.

Ada sesuatu sederhana dalam kain ikat Sikka yang melibatkan keuletan, kreativitas, kerja keras, dan komitmen. Dalam film tersebut dijelaskan, motif pada tenun ikat Sikka turut dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat adat. Di Toba, kain ulos disebut pengikat kasih sayang di antara sesama. Ulos adalah wastra nusantara dari Sumatera Utara.

Menurut budayawan, Monang Naipospos, kain tenun mengandung karya seni. Ulos memiliki motif tertinggi yang biasanya disebut motif kehidupan dari alam dan filosofi kehidupan. Penenun yang sudah memahami filosofi disebut *pan-deyang* mampu menuangkan nilai kehidupan.

Bagi masyarakat Meut, ulos adalah kesekharisan. *Mansorha* atau menggulung benang di roda merupakan proses awal pembuatan ulos. Banyak keluarga menggunakan tangan hidup dari ulos. Khas dari Meut adalah motif raga hotang yang biasa digunakan pada upacara pernikahan. Alam selalu menjadi inspirasi motif ulos yang mengisyaratkan harapan, pemikiran, dan budaya.

Menurut Ketua Lembaga Adat Ragi Hotang Desa Meut, Guntur Siampir, masyarakat sejak dahulu membuat pakaian dari tangan sendiri. Karena itu, pembuatan ulos sudah turun temurun. Ulos identik dengan warna putih, hitam, merah. Tak hanya motif, bahan warnanya ulos juga disediakan alam.

Ada tiga hal yang menjadi sumber kehangatan masyarakat Batak, yakni matahari, api, dan ulos. Selamanya, ulos tak hanya menjadi penghangat, tetapi pengikat kekerabatan dan sumber kebahagiaan orang di sekitarnya.

■ edg.gommarria.rastanti



“Dahulu perempuan yang ada di Desa Sukare harus bisa menenun. Jika tidak bisa menenun, perempuan tidak boleh menikah.”



Ashiap Man, Kisah Superhero Kocak Ala Indonesia

■ SANTI SOPA

Rumah produksi Starvision Plus sudah sejak lama ingin membuat film tentang pahlawan super versi Indonesia. Ada semangat yang ingin disampaikan dari niat tersebut, yaitu "Semua Bisa Jadi Pahlawan", sebagaimana keyakinan seseorang dalam Islam.

Tingkatan yang dimaksud yakni melawan kejahatan dengan hati, ucapan, dan yang tertinggi keimanannya adalah melawan dengan tindakan. Muatan kearifan lokal termasuk dalam pendekatan penulisan skenario dan desain produksinya.

Produser Starvision Plus, Chand Parwez, berdiskusi dengan YouTuber Atta Hallilitar yang juga menyampaikan keinginannya untuk membuat karya yang bisa menginspirasi anak-anak, remaja, dan keluarga Indonesia. Baik Chand maupun Atta, ingin karya yang mereka sajikan membuat penonton lebih peduli sesama, lingkungan, dan menyebarkan benih-benih kebangsaan.

Mereka akhirnya membuat film *Ashiap Man* yang bergenre laga komedi. "Keseriusan dan dedikasi Atta Hallilitar untuk karyanya ini perlu dikasih acungan jempol," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/2).

Karakter utama dalam film ini adalah

Zul. Menurut Chand, karakter Zul bisa mewakili orang biasa. Baku karakter istimewa yang jauh dan sulit untuk diidentifikasi ke diri kita.

Pemilihan karakter demikian agar dekat sebagai tontonan bersama keluarga dan kental dengan dasar-dasar pendidikan ahlak. Chand mengapresiasi Atta saat memerankan Zul.

"Keluwasannya memerankan Zul sebagai Ashiap Man mengingatkan saya kepada almarhum Benjamin S dan Dono Warkop ketika jadi jagoan di film-film lawas yang sangat berkesan bagi saya," ujarnya.

Sebagai produser, Chand memaklumi apabila ada yang salah kaprah dan mencoba membandingkan *Ashiap Man* dengan karya-karya superhero dari Marvel ataupun DC.

"Sangat besar peranan dari karya-karya tersebut dalam menciptakan mimpi banyak orang untuk jadi pahlawan berkekuatan super, padahal dalam kenyataannya tidak demikian," kata dia.

Chand berharap, film yang lulus sensor untuk semua umur ini menjadi tontonan yang memupuk benih jiwa ksatria, sekaligus menebalkan keimanan, hingga berani melawan kezaliman.

Atta Hallilitar, pertengahan ekstra untuk bermain film *Ashiap Man*. Demi film ini, Atta juga harus menambah berat badan maupun latihan otot.

"Di film ini, pertama kalinya aku punya

badan berotot, berat badan sebelumnya 58, waktu main ini hampir 70 kilo," ujarnya.

Dalam film, Zul digambarkan memiliki pekerjaan sebagai pengantar galon air dan punya otot kuat mengangkat galon dalam jumlah banyak. Namun, ia sempat merasakan dilema bagaimana menjadi pahlawan sesungguhnya setelah pasar di kampungnya kebakaran hingga merenggut ayah tersayang.

Ketika Zul berulangkali tentang Zul (Atta Hallilitar) yang terobsesi untuk menjadi seorang adiwira. Dia juga dijuluki Ashiap Man di kampungnya. Ayahnyah, Ibrahim (Arsyend Bening Swara) selalu menyemangati Zul.

Ketika Zul berulangkali, Ibrahim dan istrinya, Suci (Elma Theana) memberinya potongan kain untuk dipakai sebagai jubah di belakang punggungnya. Karena selalu siap ketika menjumpai masalah, Zul dijuluki Ashiap Man oleh warga kampungnya.

Beberapa kameo yang cukup menyita perhatian juga tampil, di antaranya Yayan Ruhian, Ashanty Hermansyah, Arsy Hermansyah, dan penampilan khusus Raffi Ahmad serta Nagita Slavina.

Semula, film ini rencananya akan tayang perdana pada 10 Februari. Namun pada Senin (7/2), pihak Starvision Plus mengumumkan bahwa penayangan film tersebut ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. ■ edg.gommarria.rastanti

INFO PERWAKILAN :

REPUBLIKA DI YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, DAN JAWA TIMUR

Alamat: Jl. Perahu No.4 Kota Baru, Di Yogyakarta

Phone: +62274 544972, +62274 566028

Fax: +62274 541 582

Email: yogyarepublika@gmail.com

PENGUMUMAN HASIL AKHIR PROSES PENGAKHIRAN KEGIATAN DAN PENUTUPAN KANTOR OPERASIONAL QATAR CHARITY INDONESIA

SNH LAW OFFICE

Sehubungan dengan Pengakhiran Kegiatan dan Penutupan Kantor Operasional Qatar Charity Indonesia, dengan ini kami SNH LAW OFFICE yang ditunjuk sebagai Pengurus Pemberesan menyatakan telah selesai melaksanakan pemberesan.

Dan oleh karena dalam jangka waktu yang telah ditentukan (30 hari) sejak pengumuman pertama tanggal 06 Januari 2022 SNH LAW OFFICE atas nama Qatar Charity Indonesia tidak menerima klaim-klaim dari Pihak Ketiga, maka terhitung tanggal 05 Februari 2022 Qatar Charity Indonesia menyatakan tidak akan menerima klaim apapun dari Pihak Ketiga.

Jakarta, 09 Februari 2022

SNH LAW OFFICE
(Pengurus Pemberesan)

Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji'un
Segenap Direksi dan Karyawan

REPUBLIKA
mengucapkan turut berdukacita atas wafatnya

Bapak Husein bin H Abdul Rahim (73 Tahun)
Ayahanda Bapak Harun (Wartawan Senior)

Wafat:
Selasa, 8 Februari 2022, Pukul 08.00 WITA di Buton Sulawesi Tenggara

Alamat Duka:
Lakudo, Buton, Sulawesi Tenggara

Telah Dimakamkan:
Selasa, 8 Februari 2022, ba'da Shalat Ashar, di Lakudo, Buton, Sulteng.

Semoga almarhum, husnul khotimah mendapatkan ampunan atas segala dosa khilaf-nya, diterima amal sholeh disisi Allah Subhaanahu Wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran & ketabahan. Aamiin, ya Rabbal Aalamiin.

DAPATKAN PRODUK DIGITAL di APLIKASI Gerai REPUBLIKA

Pindai Disini

klik!
gerai.republika.co.id

republika.id kini telah hadir menemani Anda sekeluarga di rumah. Cara baru dalam menjangkau kedalaman berita dan menikmati kekayaan pengalaman menyerap informasi, terlebih di masa Pandemi saat ini.

<https://www.republika.id>

REPUBLIKA.id

PINDAI DI SINI

REPUBLIKA

e-PAPER **CEGAH BERSAMA PENULARAN KORONA** **PAKET E-PAPER**

BEKERJA, BELAJAR, DAN BERIBADAH DARI RUMAH

Membatasi diri tak berarti membatasi informasi. Terenkansi Anda bisa bebas mengakses e-Paper Republika dengan membeli paket berlangganan.

REPUBLIKA

EPAPER
Login with Republika ID

Masuk Register

Lupa Password?

28 REPUBLIKA

BPJS Kesehatan Surplus

Kurva, Candi, dan Rongga, 28 Februari 2022

PPKM Mikro Diperketat

Kirim OPI/MO & Materi Iklan (PDF/TIF: Res 300 dpi) ke email: iklanrepublika@gmail.com

EPAPER REPUBLIKA merupakan koran dalam bentuk digital yang memiliki isi dan tampilan sama seperti edisi cetak yang bisa diakses melalui *desktop* & *mobile*. Terbit setiap pukul 02.00 WIB. Pelanggan dapat mengakses arsip koran dari tahun 2011 s/d sekarang. Anda bisa membaca EPAPER republika melalui <https://epaper.republika.co.id> atau bisa juga dengan *mengunduh aplikasi* gerai REPUBLIKA yang tersedia di *google playstore*.

Terbit sejak 4 Januari 1993, Republika hadir sebagai pelopor pemberian media massa Indonesia. Hari ini memberi warna baru pada desainnya, pengantarannya, dan sudut pandang surat kabar negeri sebagai koran, kemudian portal berita pertama di Tanah Air, media ini melahirkan keseimbangan baru dalam tata informasi. Republika terbit demi kemaslahatan bangsa, penerbit manfaat untuk semua.

Hubungi Kami
Mendapat kendala dengan epaper republika? Hubungi kami di email: gerai@republika.co.id

SUBUH	04.39
ZUHUR	12.09
ASHAR	15.26
MAGHRIB	18.20
ISYA	19.31

HIKMAH

OLEH INAYATULLAH HASYIM

Mintalah Nasihat

Suatu hari, Umar bin Khattab sedang dalam perjalanan bersama pasukannya. Saat melihat seorang nenek di pinggir jalan, Umar berhenti dan meminta nasihat. Wanita itu pun memberinya tausiyah. Lama sekali. Meskipun lama, Umar fokus mendengarkan nasihatnya, hingga kumandang azan Zuhur bergema. Karena penasaran, salah satu anggota pasukan kemudian bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, untuk apa kau mendengarkan nasihat wanita itu lama sekali?" Umar menjawab, "Andai tak ada kumandang azan, aku akan tetap mendengarkan nasihatnya sampai dia puas mengatakanku."

Seakan menjawab rasa penasaran pasukannya, Umar bin Khattab melanjutkan, "Bagaimana mungkin Umar

bertolak meninggalkannya sedangkan doa wanita itu telah pernah dijawab langsung oleh Allah SWT? Ya, wanita tua itu adalah Khaulah binti Ts'alah yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat Alquran surah al-Mujadilah. Wanita itu tak dikenal publik, tetapi dikenal di langit. Seperti Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang keutamaan Abu Dzar al-Ghifari. Dia tidak populer di bumi, tapi populer di langit.

Suatu hari, Rasulullah SAW tengah bersama Malaikat Jibril (alaihi salam), kemudian datang Abu Dzar al-Ghifari, Jibril berkata, "Lihatlah datang Abu Dzar." Rasulullah SAW bertanya, "Kalian para malaikat mengenalinya?" Jibril menjawab, "Dia sangat terkenal di kalangan kami, bahkan lebih terkenal daripada di kalangan kalian." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Bagaimana dia bisa memiliki keutamaan

itu?" Jibril menjawab, "Karena dia selalu rendah hati dan rajin membaca qul huwallahu ahad..." (Tafsir al-Kabir, Imam Fakhruddin).

Saudaraku, mintalah nasihat dari orang lain, sebab boleh jadi orang yang kita anggap "biasa-biasa saja", ternyata punya nilai istimewa di hadapan Allah, Dzat Yang Mahakusasa. Ambil pelajaran dari nasihat-nasihat itu seperti ketika kita menjujur orang lain.

Terutama, hanya satu jari terarah kepada orang lain, empat jari lainnya mengarah kepada diri kita sendiri. Apa maknanya? Nasihatlah dirimu sendiri sebelum menasihati orang lain. Dengan makin sering meminta nasihat, bukan berarti kita lebih rendah dan hina. Namun, sebab sering kali semut di seberang lautan tampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tak kasat mata. Maka, jika

mata kita terpapar debu saja, kita perlu bantuan orang lain untuk menyucinya. Begitulah indahnya nasihat dalam Islam agar hati kita tak beku dan mati.

Kadang, nasihat itu bukan tentang apa isinya, tetapi dari siapa kita ingin mendengarnya. Seperti ketika kita mendengar nasihat dari kedua orang tua kita. Kata yang terucap mungkin sama dari orang lain, tapi energi dan auranya berbeda. Ketika Allama Iqbal, penyair filosof Pakistan, merasa letih, dia meminta nasihat dari ayahnya. Ayahnya berpesan, "Nak, bacalah Alquran, rasapilah maknanya seakan-akan ia diturunkan untukmu." Nasihat itu telah memberi energi pada puisi-puisi Iqbal yang sarat makna dengan pesan-pesan agama.

Saudaraku, pujian dapat meracunimu. Nasihat membangun jiwa dan kepribadianmu. Wallahu 'alim. ■



MENGENANG SYEKH NAWAWI Katib Aam PBNU Achmad Said Asrori (kiri) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga dari kiri), Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar (kedua dari kiri), Ketua BPK Agung Firman Sampurna (kedua dari kanan) dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfat Musthofa (kanan) menyaksikan pameran pada acara Pekan Memorial Syekh Nawawi di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (8/2). Pada acara itu, PBNU meresmikan nama jalan Syekh Nawawi yang berlokasi di Kampung Kebantenan, Cilincing, Jakarta Utara.

DPR Minta Umrah Dievaluasi

Pembukaan embarkasi umrah selain Jakarta sedang diupayakan.

■ ALI YUSUF, ZAHROTUL OKTAVIANI

JAKARTA — Jumlah jamaah umrah yang terpapar Covid-19 makin bertambah. Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), per 6 Februari 2022, dari 6.712 jamaah umrah yang telah kembali ke Tanah Air, sebanyak 2.176 jamaah atau 32,42 persen terkonfirmasi positif Covid-19.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ac Hassan Syadzid meminta pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan umrah di masa pandemi ini. Evaluasi ini penting untuk menelusuri di mana jamaah umrah terpapar Covid-19. "Pertama dievaluasi terlebih dahulu tentang tingginya tingkat penularan terhadap jamaah umrah," kata Ace kepada *Republika*, Selasa (8/2).

Menurut dia, peningkatan kasus positif Covid-19 pada jamaah umrah tidak bisa dibiarkan dan hanya sebatas dicatat. Dalam hal ini, pemerintah harus mencari di mana para jamaah terpapar Covid-19. "Dari 1.000 ke 2.000 itu bukan angka sedikit," katanya.

Menurut dia, evaluasi untuk melakukan penelusuran ini menjadi agenda yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Hingga sampai sektor umrah menjadi penyebab tingginya kasus Covid-19 saat ini.

"Tentu cara yang paling utama harus ditelusuri oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan (Kemkes), di mana potensi penularan tersebut," katanya.

Selama ini, kata dia, pemerintah dalam hal ini Kemenag dan Kemkes hanya mencatat, tidak menelusuri di mana jamaah terpapar Covid-19. Padahal, hal ini penting untuk mencegah terus berulangnya kasus infeksi Covid-19 di kalangan jamaah umrah.

Dalam pandangan Ketua Komnas Haji Umrah, Mustolih Siradj, mengingat tingginya kasus positif Covid-19 di kalangan jamaah umrah, maka Kemenag perlu mempertimbangkan kebijakan untuk memunda pemberangkatan umrah hingga kondisi kembali terkendali.

"Menurut saya akan lebih baik jika Kemenag memunda keberangkatan umrah, atau ditangguhkan hingga jumlah kasus harian kembali terkontrol," ujar Mustolih.

Ia menyampaikan, masalah umrah ini menyangkut keselamatan jamaah. Pada saat yang sama, pemerintah baru saja menaikkan level PPKM menjadi level 3. "Hal ini menunjukkan bahwa negara makin menegatkan pembatasan mobilitas masyarakat, dan ini sepatutnya juga mencakup pada penyelenggaraan perjalanan umrah," katanya.

Sementara itu, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin menyebut, jamaah umrah yang positif telah menjadi isolasi mandiri. Mereka seluruhnya telah kembali sehat.

"Kami bertanya ke Kapuskes Haji, bagaimana kondisi jamaah umrah yang positif setelah diisolasi. Alhamdulillah, seluruhnya kembali sehat, tidak ada yang berujung fatal," ujar dia saat dihubungi *Republika*, Selasa (8/2).

Untuk menurunkan kasus positif jamaah umrah, ia menyebut, asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) mengusulkan agar tes PCR pertama kepulangan dilakukan satu hari setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi. "Tujuannya agar kondisi jamaah sudah cukup istirahat, sehingga segar bugar setelah perjalanan jauh dari Arab Saudi," ujarnya.

Nur Arifin juga menyampaikan, pemerintah tengah mengupayakan pembukaan embarkasi umrah selain Jakarta. Terkait hal itu, pihaknya telah melakukan pembicaraan bersama para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.

Bersama Kementerian Perhubungan, lanjut Nur Arifin, Kemenag pernah membahas kemungkinan pembukaan Bandara Juanda, Surabaya untuk umrah. Pembahasan ini juga dilakukan bersama kepala Bandara Juanda dan Pangdam Brawijaya.

"Waktu itu, Pangdam Brawijaya menyatakan kalau nanti sudah ada kebijakan dari pusat, maka beliau siap meniadakan lalujnya," kata Nur Arifin.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sampai saat ini pelaksanaan umrah masih sesuai dengan SK Kepa Satgas Covid Nomor 4 Tahun 2022. Di dalamnya tertulis, embarkasi umrah masih dipusatkan di Bandara Soekarno-Hatta.

Kemenag juga telah melakukan rapat di kantor BNPB, Jakarta, pada 4 Februari lalu. Kepala BNPB yang juga menjabat sebagai ketua Satgas Covid-19, Suharyanto mengatakan, jika nantinya pengendalian Covid-19 jamaah umrah sudah terkendali dengan baik, embarkasi umrah dapat diperluas ke daerah lain.

■ *Dea Aji Soraya* dan *Wahid Handasah*

Omikron Merebak, Pesantren Diimbau Ikuti SE Menag

■ FUJI E PERMANA, UMAR MUKHTAR

JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau pesantren meniadakan Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor SE 4 Tahun 2022 sebagai pedoman. Imbauan ini disampaikan seiring terjadinya lonjakan kasus infeksi Covid-19 sebagai akibat merebaknya varian omikron.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono Abdul Ghofur menerangkan, SE tersebut adalah tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah Pada Masa PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19, Optimalisasi Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan, serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M. Menurut dia, SE ini terbit dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian omikron yang lebih menular.

Menurut Waryono, pedoman ini bisa diikuti pesantren karena dalam pedoman ini tertulis juga untuk satuan pendidikan, maka termasuk pesantren. Pesantren diimbau melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan surat edaran ini. "Dalam pelaksanaan pemantauan berkoordinasi dengan pimpinan satuan kerja, pimpinan pemerintah, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan aparat keamanan," katanya kepada *Republika*, Selasa (8/2).

Waryono juga berpesan kepada pesantren-pesantren agar lebih berhati-hati menghadapi lonjakan kasus Covid-19 dan munculnya varian omikron. Masyarakat pesantren diimbau untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKPPPI), Akhmad Alim, mengimbau kepada seluruh pesantren untuk betul-betul melakukan proteksi baik secara vertikal dan horizontal menyusul naiknya kasus Covid-19 varian omikron. Hal itu supaya kegiatan pembelajaran di pesantren bisa terus berjalan.

Secara vertikal, kata dia, proteksi bisa dilakukan dengan memperbanyak doa meminta perlindungan diri kepada Allah SWT. Ini biasanya dilakukan di pesantren melalui zikir dan doa pada waktu pagi dan petang.

"Ini sebagai ikhtiar vertikal karena Allah SWT yang menjaga kita dan yang memberikan perlindungan. Ini yang kita tekankan kepada pesantren-pesantren," ujar dia.

Akhmad melanjutkan, kegiatan belajar di pesantren juga ditingkatkan dari sisi proteksi horizontal. Dia menjelaskan, proteksi horizontal yaitu menjaga diri melalui protokol kesehatan dengan memperhatikan wudhu, cuci tangan, dan menjaga kebersihan lingkungan pesantren. "Ini dalam rangka usaha upaya Covid-19 varian Omikron tidak semakin mewabah," katanya.

Pesantren, kata dia, juga diwajibkan untuk menjalankan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) selama tidak terjadi gangguan atau gejala penularan Covid-19 terutama dari pihak luar. Untuk itu, dia mengingatkan, pesantren juga harus bekerja sama dengan lembaga kesehatan.

Akhmad mengemukakan, sinergi dengan lembaga kesehatan itu penting untuk memastikan pengecekan secara intensif supaya kesehatan santri terjaga dan terproteksi kesehatannya. Ketika terdeteksi satu atau dua orang di dalam pesantren yang bergejala atau terpapar Covid-19, akan diisolasi di tempat yang telah disediakan oleh pesantren.

"Saat pesantren ada di zona merah misalnya, dan terbukti ada yang terkonfirmasi positif, maka dalam keadaan darurat, kegiatan belajar pesantren digelar secara hybrid, daring dan offline," katanya.

"Yang terpenting kegiatan belajar di pesantren itu tidak berhenti. Dalam hal ini pesantren harus cerdas menyalasi keadaan seiring meningkatnya varian omikron," kata dia.

Akhmad menambahkan, pemerintah juga harus memberikan perhatian kepada pesantren. Di antaranya, dengan memberikan sarana dan bantuan untuk memudahkan kegiatan belajar sehingga proses pembelajaran di pesantren tetap dapat berjalan kondusif.

■ *Dea Aji Soraya* dan *Wahid Handasah*

Mengganti Jenis Kelamin, Apa Hukumnya?

■ OLEH UMAR MUKHTAR

Pada masa kini, karena alasan tertentu, ada orang-orang yang memutuskan mengubah jenis kelamin (transgender). Apakah Islam membolehkan hal itu?

Wakil Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNBU) KH Mahbub Maafi Ramadhan menegaskan, mengganti jenis kelamin itu tidak dibolehkan dan haram hukumnya.

"Keputusan NU pada 1979 pun, (me)ntapkan bahwa mengganti jenis kelamin itu enggak bisa, karena itu haram. Enggak bisa diganti kelamin begitu. Misalnya dari perempuan diganti menjadi laki-laki atau sebaliknya," kata dia kepada *Republika*, belum lama berselang. Kiai Mahbub menjelaskan,

penggantian jenis kelamin dalam pandangan para ulama tidak diperbolehkan. Sebab, hal itu mengubah apa yang diciptakan oleh Allah SWT. Bila ada seseorang yang sengaja melakukan tindakan mengubah jenis kelamin, maka termasuk golongan yang dilaknat.

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata, "Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang mengubah ciptaan Allah." (IHR Bukhari).

Janganakan mengubah jenis kelamin, menyuruh lawan jenisnya saja diarahkan dalam Islam. Misalnya, terlahir sebagai laki-laki, tetapi berpemakaian perempuan atau

sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat para perempuan yang menyuruh laki-laki, dan para laki-laki yang menyuruh perempuan."

Larangan itu tidak hanya terkait busana, tetapi juga meliputi cara berjalan dan berbicara. Sebab, setiap manusia pada dasarnya diciptakan dalam kondisi yang sempurna. Allah SWT berfirman dalam surah at-Tin ayat 4, "Sesungguhnya, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Karena itu, bagaimana pun kondisinya, manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik menurut Allah SWT sehingga tidak dibolehkan mengubah apa yang telah diciptakan Allah SWT.

Lain halnya ketika ada orang yang memiliki dua alat kelamin. Kiai Mahbub menjelaskan, jika ada seseorang

memiliki dua tanda kelamin luar seperti vagina dan penis, harus di lihat tanda kelamin dalamnya. Dalam hal ini rahim dan indung telur untuk perempuan, sementara untuk laki-laki adalah testis dan sperma.

Bila yang bersangkutan memiliki tanda kelamin dalam perempuan, dihukumi perempuan. Sebaliknya jika ia memiliki tanda kelamin dalam laki-laki, dihukumi laki-laki terlepas tanda kelamin luarnya. "Ketentuan tanda kelamin dalam maupun luar ditentukan oleh dokter ahli di bidangnya," katanya.

Sementara, lanjut Kiai Mahbub, jika tanda kelamin luar ataupun dalam tidak bisa memberikan petunjuk, jenis kelamin ditentukan berdasarkan kecenderungan seksualnya. Berpikir dari sini, jika menurut dokter ia adalah laki-laki atau perempuan, sementara alat

kelamin luarnya tidak sesuai, operasi memperjelas kelamin menjadi niscaya.

"Alquran hanya menyebutkan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Karena itu ketika terjadi ambiguitas kelamin maka harus segera diganti jenis kelaminnya agar tidak menimbulkan kesulitan dalam ibadah maupun muamalah," ujar Kiai Mahbub.

Allah SWT berfirman, "Hal manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS al-Hujurat ayat 13). ■ *Dea Aji Soraya* dan *Wahid Handasah*



TINJAU POLMAN Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) meninjau pengecoran logam saat mengunjungi Politeknik Manufaktur (Polman) Bandung, Kota Bandung, Selasa (8/2). Luhut dan Ridwan Kamil meninjau teknologi manufaktur, serta ruang produksi di Polman guna menyerap peluang investasi dari level perguruan tinggi.

Belasan Siswa Terpapar Covid-19

Kebijakan pelaksanaan kegiatan belajar akan dievaluasi.

■ LILIS SRI HANDAYANI

CIREBON — Kasus siswa terpapar Covid-19 dilaporkan di sejumlah daerah wilayah Jawa Barat (Jabar). Seperti di Kota Cirebon, di mana dilaporkan ada 18 siswa tingkat SMA/SMK yang terpapar Covid-19. Menurut Kepala Seksi Pelayanan Pendidikan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Jawa Barat, Rudianto, siswa yang terpapar Covid-19 itu tersebar di enam sekolah. Terbanyak di SMA Negeri (SMAN) 1, sembilan orang. Kemudian di SMAN 2 empat orang, SMAN 3 satu orang, SMAN 4 dua orang, SMAN 5 satu orang, dan di SMK Negeri 2 satu orang. "Semuanya siswa," kata dia, Selasa (8/2).

Sejumlah ini, menurut Rudianto, belum ada guru yang dilaporkan terpapar Covid-19. Ia mengatakan, belasan siswa yang positif Covid-19 itu kon-

disinya tak bergejala dan mereka menjalani isolasi mandiri. "Pihak sekolah sudah melapor ke puskesmas setempat untuk g1 (testing, tracing, treatment)," ujar dia.

Rudianto mengatakan, Satgas Covid-19 di sekolah masing-masing langsung melakukan sterilisasi ruang kelas. Menurut dia, ruang kelas siswa yang terpapar Covid-19 ditutup sementara dan kegiatan belajar kembali menjadi daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Keputusan itu akan diberlakukan hingga satu pekan sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid-19.

Kepala KCD Pendidikan Wilayah X Jabar Peter Mori Dewandari mengatakan, hingga awal pekan ini, kebijakan pembelajaran tetap muka (PTM) 100 persen masih diberlakukan di Kota Cirebon. Melihat kondisi terkini, termasuk Kota Cirebon yang kembali

masuk kriteria Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kepala daerah dan Satgas Covid-19 setempat untuk membahas soal kebijakan kegiatan pembelajaran. "Besok juga kami akan melakukan rapat evaluasi dengan pengawas dan kepala sekolah SMA/SMK se-Kota Cirebon," katanya.

Di Kota Sukabumi pun ada sejumlah siswa yang dilaporkan positif Covid-19. Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi Rita Fitrianiingsih, awalnya dilakukan tes antigen secara acak terhadap 99 pelajar di delapan sekolah. Pada pekan ini, hasil tesnya positif kemudian menjalani PCR. "Dari hasil tes PCR menyebutkan 13 orang yang positif Covid-19," kata dia, Selasa.

Kasus siswa yang terpapar Covid-19 juga dilaporkan di Kabupaten Indramayu. Menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Indramayu Dede Setiawan, dari hasil skrining di sekolah, tiga hari lalu ditemukan satu siswa di SMAN 1

Indramayu yang terpapar Covid-19. Kemudian dilakukan penelusuran kontak erat dan pengetesan kembali. Hasilnya ada dua siswa lagi yang terpapar. "Kondisi mereka tidak bergejala dan saat ini menjalani isolasi mandiri," ujar dia.

Dede mengatakan, upaya penelusuran kontak erat dan pengetesan dari kasus positif itu masih terus dilakukan. Tak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di lingkungan rumah mereka. "Kami sarankan agar sekolah meliburkan sementara sampai hasil tracing dan testing keluar," kata Dede.

Kebijakan kegiatan belajar siswa akan menjadi bahan evaluasi menyusul perubahan kriteria PPKM Kabupaten Indramayu dari Level 1 ke Level 2. Menurut Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Dinas Pendidikan (Disdik) Indramayu Pendi Susanto, hal itu masih dibahas dengan Satgas Covid-19. "Untuk kelanjutan PTMT atau PJJ, sampai hari ini belum diputuskan, kami masih berkoordinasi," kata dia, saat dikonfirmasi, Selasa.

■ rita nurul imanedi | rita fitri

RS dan Tempat Isolasi Terpusat Disiapkan

■ BAYU ADJI P

GARUT — Pemerintah Kabupaten (pemkab) Garut meminta seluruh rumah sakit (RS) bersiaga melakukan penanganan kasus Covid-19, yang belakangan ini kembali meningkat. Pemkab pun mempersiapkan kembali tempat isolasi terpusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana mengatakan, pemerintah daerah berupaya mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Terkait hal itu, kata dia, Pemkab memastikan kesiapan pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk ruang isolasi. "Kami hari ini sudah minta seluruh rumah sakit yang ada untuk membantu penanganan Covid-19," kata dia kepada *Republika*, Selasa (8/2).

Selain itu, menurut Nurdin, Pemkab juga mengaktifkan kembali tempat isolasi terpusat untuk menampung pasien Covid-19 dengan kondisi tanpa gejala atau bergejala ringan. Tempat isolasi terpusat ini disiapkan di Islamic Center dan rusunawa. Ia menjelaskan, awalnya sejumlah pasien menjalani isolasi di Islamic Center. Namun, kata dia, agar penanganannya efektif, pasien tersebut dialihkan ke rusunawa yang memiliki kapasitas lebih besar. "Sementara untuk isolasi terpusat kami fokuskan ke rusunawa. Nanti kalau rusunawa penuh, baru Islamic Center dibuka lagi," ujarnya.

Nurdin mengatakan, Pemkab juga menyiapkan sebuah hotel di wilayah selatan Garut untuk dijadikan tempat isolasi terpusat. Menurut dia, hotel itu memiliki 17 kamar dan dapat menampung sekitar 34 orang. "Sekarang belum digunakan. Di saat kami masih fokuskan (penanganan pasien Covid-19) di RSUD Pameungpeuk," kata dia.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Garut, per 7 Februari 2022, terdapat 107 kasus positif Covid-19. Sebanyak 140 orang di antaranya dilaporkan menjalani isolasi mandiri dan 57 orang isolasi di rumah sakit.

Per 8 Februari, dilaporkan tingkat keterisian tempat tidur (*bed occupancy rate*) di rumah sakit wilayah Garut mencapai 38,11 persen. Di mana dari 307 unit yang tersedia, 117 unit sudah digunakan, termasuk oleh pasien status suspek. Sementara BOR tempat isolasi terpusat disamping mencapai 79,93 persen, di mana dari total 164 tempat tidur yang tersedia, 13 unit digunakan.

Penanganan zona merah

Berdasarkan data satu pekan terakhir, dilaporkan ada tiga daerah di Kabupaten Garut yang dinilai zona merah Covid-19. Daerah itu adalah Desa Tanjung Kamuning di Kecamatan Tarogong Kaler, Kelurahan Sukagalih di Kecamatan Tarogong Kidul, dan Desa Bayongbang di Kecamatan Bayongbang. Menurut Nurdin, tiga daerah itu masuk kategori zona merah karena dalam satu pekan terakhir tercatat lima atau lebih kasus positif Covid-19.

Soal penanganan zona merah ini, Nurdin mengatakan, akan dikaji lebih lanjut. "Kami akan lihat persebaran kasusnya di mana. Ketika konsentrasi di satu titik, kami akan lakukan *lockdown*. Namun, kalau menyebar, kami lakukan *tracing* (penelusuran) seperti biasa," kata dia.

Camat Tarogong Kidul, Doni Rukmana, membenarkan satu daerah di wilayahnya masuk kategori zona merah Covid-19, yaitu Kelurahan Sukagalih. Kini, kata dia, di Kelurahan tersebut ada enam kasus Covid-19. Dua orang menjalani isolasi mandiri dan sisanya di tempat isolasi terpusat. Menurut dia, upaya penelusuran kontak erat pasien positif itu terus dilakukan. ■ adi | rita fitri

Pelaku UMKM Dibantu Urus Sertifikasi Halal dan Hak Merek

■ ARIE LUKIHARDIANTI

BANDUNG — Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Provinsi Jawa Barat kembali akan memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengurus sertifikasi halal. Selain itu, ada juga pelaku usaha yang akan dibantu mendapatkan hak merek.

Kepala Diskuk Provinsi Jawa Barat (Jabar) Kusnana Hartadi menjelaskan, pada 2021 dinasnya memfasilitasi sepuluh pelaku UMKM yang siap ekspor. Selain mengurus sertifikasi halal, Pelaku usaha yang dibantu ini berasal dari berbagai daerah, antara lain dari Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, dan Kota Sukabumi. Ada juga dari Kabupaten Ciamis dan Kuningan.

Tahun ini, menurut Kusnana, dinasnya kembali akan membantu sertifikasi halal untuk sepuluh pelaku UMKM siap ekspor. Menurut dia, pelaku usaha yang akan difasilitasi ini berdasarkan usulan dari dinas terkait di kabupaten/kota, yang kemudian dikursi oleh Diskuk Provinsi Jabar.

Selain sertifikasi halal, dalam upaya meningkatkan daya saing dan mendorong UMKM naik kelas, Diskuk Jabar akan membantu pengurusan hak merek. Menurut Kusnana, pada 2021 ada 300 UMKM yang dibantu mendapatkan hak merek. Adapun tahun ini direncanakan 200 pelaku UMKM. "Jumlahnya memang menurun dibanding 2021. Namun, kita akan merekomendasikan pelaku UMKM untuk mendapatkan hak merek," kata dia, awal pekan ini.

Dengan adanya rekomendasi

itu, Kusnana mengatakan, pelaku UMKM akan mendapatkan keringanan biaya untuk mengurus hak merek. "Jadi, semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan hak merek," ujar dia.

Diskuk Provinsi Jabar pun terus melanjutkan program UMKM Juara. Kusnana mengatakan, tahun ini programnya lebih difokuskan pada penguatan aspek legal, akses pembiayaan, dan akses pasar. Menurut dia, kegiatannya meliputi pendampingan, pelatihan, perizinan, penyediaan infrastruktur, fasilitas pembiayaan, promosi, kemitraan, dan standarisasi. "Kami juga akan mengembangkan aplikasi Kabayan," kata dia.

Kabayan merupakan akronim dari "Konsultasi Online Akses Pembiayaan". Kusnana mengatakan, aplikasi itu menjadi basis data dan media komunikasi antara pelaku UMKM, dinas, juga *stakeholder*. Menurut dia, adanya aplikasi tersebut nantinya dapat membantu pelaku UMKM untuk mengambil keputusan dan memanfaatkan pembiayaan yang tepat bagi usahanya.

Kusnana mengatakan, dengan program UMKM Juara ini, diharapkan pelaku UMKM dapat melakukan manajemen usaha dengan baik, meningkatkan diri, serta siap bersaing di lokasi kejadian. Saat ini, pihaknya telah melakukan tergeletak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, menurut Kepala Polisi (Kapolsek) Cobleng Kompol Nanang Sukmajaya, korban ditusuk dengan pisau, di mana ke dalam tusukannya sekitar sembilan sentimeter. "Kita tidak dapat menolong korban dibawa ke rumah sakit karena sudah meninggal dunia," kata dia di Markas Polresta Bandung, Selasa (8/2).



Polisi Dalam Dugaan Pembunuhan Berencana

BANDUNG — Polisi masih mendalami kasus penusukan guru AR oleh mantan suaminya, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ada dugaan penusukan terhadap guru perempuan itu sudah direncanakan.

Kasus penusukan itu terjadi di area gerbang SDN 032 Tili, Jalan Puyuh, Kecamatan Cobleng, Kota Bandung, yang merupakan tempat bertugas AR. Senin (7/2) pagi, saat polisi datang ke lokasi kejadian, korban sudah dalam keadaan tergeletak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, menurut Kepala Polisi (Kapolsek) Cobleng Kompol Nanang Sukmajaya, korban ditusuk dengan pisau, di mana ke dalam tusukannya sekitar sembilan sentimeter. "Kita tidak dapat menolong korban dibawa ke rumah

sakit karena sudah meninggal dunia," kata dia di Markas Polresta Bandung, Selasa (8/2).

Selanjutnya, penusukan, tersangka berinisial N (56 tahun) dilaporkan tetap berada di sekitar lokasi kejadian. Tersangka kemudian ditangkap. Menurut Kapolsek, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara ini, ada dugaan tersangka sudah merencanakan aksinya. "Kalau berdasarkan fakta yang ada dan saksi, dugaan kuat direncanakan," katanya.

Beberapa hari sebelum kejadian, menurut Kapolsek, N dan korban sempat dimediasi oleh pihak sekolah. Namun, pada Senin terakhir peristiwa penusukan, ia mengatakan, tersangka sudah menunggu korban di sekitar se-

kolah. Saat korban datang, tersangka menghampirinya dan sempat terjadi percekungan. Ketika korban akan masuk ke area sekolah, kata dia, tersangka meneggar, kemudian memiringkan pisau dan menusuknya dengan pisau. Polisi masih menelusuri asal pisau yang digunakan tersangka.

Soal motifnya, polisi juga masih melakukan pendalaman. "Berdasarkan keterangan saksi, yang bersangkutan (tersangka) itu ingin rujuk, namun ditolak. Ada juga yang mengatakan tersangka ingin ikut bergabung ke acara pernikahan anak (yang akan berlangsung 12 Februari 2022), tapi tidak diperkenankan," kata Kapolsek.

N dan AR dikabarkan bercerai sejak 2007. Tersangka N mengu-

da niatan untuk rujuk dengan mantan istrinya itu. "Saya sudah cerai, mau bersuam lagi," kata dia.

Tersangka menuding korban dulu berselingkuh. Saat ada niatan untuk rujuk, ia mengaku mendapat kabar soal mantan istrinya itu yang diduga bersama orang lain di hotel. "Kemarin dari kakaknya bilang sama anak saya, saya di hotel sama ibunya. Saya merasa enggak di hotel," kata dia.

Merasa curiga, tersangka mengaku sempat menanyakan hal itu kepada korban, namun tidak dijawab. Pada Senin, terjadi kejadian penusukan terhadap AR. Soal pisau yang digunakan untuk menusuk korban, tersangka mengaku menemukan. "Saya nemu pisau dari gerbok," kata tersangka. ■ lazi | ridwan ed | rita fitri



BAN BEKAS UNTUK PENGAMAN JALAN Tumpukan ban bekas untuk dinding pengaman di lokasi kecelakaan bus pariwisata, Bukit Bego, Imogiri, Bantul, Yogyakarta, Selasa (8/2). Komunitas Trail Yogyakarta menggalang pengumpulan ribuan ban bekas secara swadaya untuk dinding pengaman di tanjakan Bukit Bego. Jalan ini memang dikenal rawan kecelakaan. Nantinya, ban ini akan diikat dengan sling baja agar kuat. Untuk teknis pemasangan akan berkoordinasi dengan dinas perhubungan dan kepolisan.

Bus Dilarang Lewati Jalur Imogiri-Mangunan

Salah satu jalur yang harus diwaspadai yakni jalur di tanjakan Cinomati.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

BANTUL — Bus pariwisata yang berkapasitas besar dilarang untuk melintas di jalur Imogiri-Mangunan, Kabupaten Bantul. Larangan ini dikeluarkan terutama di akhir pekan yakni Sabtu dan Ahad menyusul terjadinya kecelakaan bus pariwisata di jalur tersebut atau tepatnya di sekitar Bukit Bego beberapa hari lalu.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul, Aris Suharyanto mengatakan, pihaknya sudah mengimbau agar bus-bus besar tidak melewati jalur tersebut sejak lama. Namun, dikarenakan kawasan tersebut merupakan kawasan wisata, masih banyak bus pariwisata yang melewati jalur itu.

"Terkait dengan larangan tersebut, imbauan (untuk tidak melewati jalur Imogiri-Mangunan) itu kita sudah sejak dua tahun yang lalu kita mengimbau dengan membuat spanduk dan larangan juga," kata Aris kepada *Republika* melalui sambungan telepon, Selasa (8/2).

Aris menuturkan, pihaknya akan kembali memasang spanduk larangan agar bus-bus besar tidak melewati jalur Imogiri-Mangunan. Hal ini dikarenakan spanduk yang

sudah dipasang sebelumnya sudah rusak. "Di situ tidak diizinkan bus besar naik lewat Imogiri dan Mangunan. Dulu sudah ada spanduk, tapi sudah lama jadi sudah hilang, lepas dan ada yang rusak. Kita rencana mau pasang lagi yang baru," ujarnya.

Selain jalur Imogiri-Mangunan, Aris juga meminta agar bus-bus besar tidak melewati jalur lain yang juga berbahaya. Terlebih, Bantul sendiri juga memiliki banyak wisata alam yang menyebabkan beberapa jalur menuju destinasi wisata tidak mudah dilalui oleh bus dengan kapasitas besar. Salah satu jalur yang harus diwaspadai dan dihindari oleh bus besar, kata Aris, yakni jalur di tanjakan Cinomati. Jalur Cinomati ini bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan jalur Imogiri-Mangunan.

"Kita tidak merekomendasikan bus itu naik lewat Imogiri kemudian juga Cinomati. Tapi pemasalahannya di sini kalau orang (dari luar) kota mau ke Bantul ke wilayah Mangunan itu dengan google maps jalur yang muncul itu jalur Cinomati, itu juga lebih mengerikan sebetulnya," jelas Aris.

Pihaknya pun menyarankan agar bus pariwisata untuk melewati jalur lain seperti jalur Piyungan-Wonosari. Untuk itu, pihaknya akan memasang spanduk agar bus-bus pariwisata tidak melewati jalur Imogiri-Mangunan maupun Cinomati.

Sementara itu, Kapolres Bantul, AKBP Ihsan juga sudah meminta sebetulnya agar bus pariwisata tidak melewati jalur Imogiri. Pasalnya, sudah ada beberapa kali kecelakaan yang

menewaskan banyak orang di jalur tersebut.

"Kami imbu kepada pemilik kendaraan pariwisata, terutama bus untuk sementara tidak melewati tempat itu karena sudah dua kejadian sampai menunggu hasil evaluasi bersama," kata Ihsan.

Seperti diketahui, sebuah bus pariwisata yang datang dari Sukoharjo mengalami kecelakaan di sekitar Bukit Bego, Imogiri, Bantul, Ahad (6/2). Setidaknya, 13 orang dilaporkan tewas akibat kecelakaan itu. "Ini (kecelakaan) yang menewaskan banyak orang" sudah dua kali kejadian, (sebelumnya) itu sudah lama 2017 lalu," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Jasa Raharja, Agus Doto Witono menjelaskan Jasa Raharja sebagai wujud negara hadir untuk melindungi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Hal ini sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2017 yang memberikan kepastian jaminan berupa santunan sebesar Rp 50 juta kepada korban yang meninggal dunia dan santunan maksimal Rp 20 juta kepada korban yang mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit.

"Alhamdulillah Direksi Jasa Raharja Jakarta telah memberikan santunan kepada ahli waris korban kecelakaan. Dari 13 korban meninggal dunia telah diserahkan santunannya kepada sebanyak 11 orang ahli waris yang berhak. Adapun dua lainnya belum diserahkan karena masih ada persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi," kata Agus. ■ *edy/medy1 ed: ferman rahadi*



SYARIAH

■ OLEH SYAFARUDDIN ALWI

Memastikan Kepatuhan Digitalisasi Bank Syariah

Digitalisasi memberi manfaat penting bagi perbankan syariah. Kesempatan meraih peluang yang lebih besar dalam penetrasi pasar, efisiensi operasional, memudahkan proses-proses transaksi (pembayaran, pembiayaan/penghimpunan dana) yang tersedia di perbankan syariah. Melalui fasilitas layanan digital bank dapat memperluas layanan penghimpunan dan penyaluran dana-dana sosial Islam (Ziswaf).

Pada suatu kesempatan seorang peserta Ijtima' Sanawi 2021 yang lalu bertanya tentang di mana letak kesyariahan suatu penerapan teknologi digital karena teknologi digital hanyalah suatu alat. Pertanyaan ini sekaligus sederhana tetapi penting menjadi perhatian Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Sebagai contoh, Fatwa DSN MUI No 117/DSN-MUI/II/2018. Ketentuan hukumnya, Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan digitalisasi pada bank syariah tidak serta merta dapat diadopsi dan diterapkan oleh suatu bank syariah. Masih memerlukan "waktu" kajian baik kajian oleh pihak manajemen maupun kajian/opini oleh DPS.

Kajian dari aspek kesyariahan oleh DPS terkait pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah apakah telah mengikutsertakan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa tersebut. DPS merupakan organ atau perwakilan dari DSN-MUI, maka menurut fatwa DSN-MUI wajib mengikuti dan melaksanakan fatwa DSN-MUI. Bank syariah saat ini semakin dituntut untuk menyediakan produk dan layanan yang lebih kompetitif, dibandingkan dengan bank konvensional. Digitalisasi sistem pelayanan perbankan syariah merupakan keniscayaan yang penting dalam upaya menawarkan produk/inovasi produk yang melalui layanan yang lebih efisien, efektif, dan aman serta mampu bersaing dengan perbankan konvensional.

Digitalisasi pelayanan bank syariah memang masih menimbulkan masalah karena perkembangan infrastruktur teknologi informasi semakin pesat. Sedangkan lembaga bank (SDM dan fasilitas) untuk menerapkan hasil inovasi teknologi keuangan memerlukan waktu. Digitalisasi merupakan kebutuhan bisnis yang harus dikembangkan terus menerus untuk menunjang kemampuan ekspansi jaringan dan pemasaran produk dan jasa bank.

Tidak bisa dipungkiri, perkembangan teknologi informasi menimbulkan implikasi kebutuhan inovasi produk dan sistem layanan bank syariah. Konsekuensinya, peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah teraspek kompetensi DPS merupakan keniscayaan yang penting.

DPS harus mengawal dengan baik mengenai siklus-beluk digitalisasi ekonomi terutama digitalisasi perbankan. Peringatan tahunan Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah se-Indonesia tahun 2021 mengangkat tema: "Penguatan peran DPS dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah melalui digitalisasi dan integrasi dana komersial dan dana sosial Islam." Tema ini relevan dengan kondisi saat ini.

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah sangat vital sehingga dituntut harus mampu mengikuti perkembangan fenomena ekonomi saat ini yang bergerak cepat ke ranah ekonomi digital. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip Syariah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah termasuk bank syariah. Penguatan pengawasan DPS adalah fatwa dan pedoman implementasi fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI juga harus dapat mengikuti arah perkembangan ekonomi digital ini.

Tantangan bagi DPS sebagai mediator antara industri yang diawasi dengan DSN-MUI adalah terus-menerus (*continuous learning*) melakukan peningkatan kapasitas diri, wawasan dan pengetahuan dibidang industri keuangan syariah. Dalam perspektif Human Capital Development, salah satu metode yang dapat digunakan adalah pengembangan kompetensi diri secara mandiri (*self managed development*) dengan dukungan manajemen bank syariah dimana DPS bertugas.

Salah satu tantangan yang dihadapi DPS adalah mengawasi seluruh fatwa DSN-MUI khususnya fatwa-fatwa yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai DPS di bidang yang diawasinya. Peningkatan kompetensi diri bagi DPS adalah bagian dari upaya terus menerus menjaga mutu dan integritas DPS itu sendiri agar tetap istiqamah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. *Wallahuallah.* ■

Semarang Mulai Berlakukan PTM 50 Persen

■ BOWO PRIBADI

UNGARAN — Menyusul ditemukannya sejumlah kasus Covid-19 di lingkungan pendidikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang mengeluarkan kebijakan baru terkait pelayanan pendidikan di daerahnya.

Mulai kemarin, Rabu (9/2), Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha menginstruksikan pembelajaran tatap muka (PTM) di setiap satuan pendidikan dibatasi hanya diikuti 50 persen peserta didik.

Langkah ini diambil Pemkab guna meminimalkan risiko penyebaran Covid-19 sekaligus varian omikron dari kegiatan PTM di lingkungan belajar, yang ada di wilayah Kabupaten Semarang.

"Kebijakan PTM 50 persen berlaku mulai hari ini, menyusul ditemukannya indikasi kasus positif Covid-19 di salah satu SMP

Negeri di wilayah Kecamatan Bandungan," jelas Bupati Semarang, di Ungaran.

Ngesti meminta kepada para orang tua siswa untuk dapat memahami kondisi ini, terlebih penambahan kasus aktif masih berlanjut di Kabupaten Semarang. "Termasuk dengan ancaman penularan varian omikron," katanya.

Untuk itu, bupati mengajak seluruh komponen masyarakat di daerahnya untuk terus memperkuat penerapan protokol kesehatan dan prosedur pencegahan di lingkungan masing-masing.

Warga Kabupaten Semarang juga diminta untuk segera melengkapi vaksinasi Covid-19 guna menciptakan kekebalan kelompok. "Apalagi lonjakan kasus aktif Covid-19 terus berlanjut di bulan Februari," ujar Ngesti.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga (Dis-

kidbudpora) Kabupaten Semarang, Sukaton Purtono mengimani perihal adanya evaluasi terhadap layanan pendidikan ini.

Menindaklanjuti situasi terkini kasus Covid-19, Disdikbudpora Kabupaten Semarang telah mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan PTM 50 persen di seluruh sekolah di bawah pengawasan Disdikbudpora Kabupaten Semarang.

Khusus untuk PTM di SMP di Bandungan disetop selama satu minggu. "Kami sudah berkoordinasi dengan Puskesmas setempat untuk melakukan *tracking* dan *tracing* 600 peserta didik di sana," jelasnya.

Sementara itu Camat Bandungan, Anang Sukoco menambahkan, penemuan indikasi kasus positif Covid-19 di SMPN 1 Bandungan berawal pada hari Sabtu (5/2) saat ada seorang siswa yang sakit.

■ *edy/fernan rahadi*



Slap Bantu Skripsi, Tesis & Disertasi! semua jur.Era Jl.Janti Gedongkuning Blk STTL 1.551461/08182 77603

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
Jl. Bugeha Harsono No 1 Wonorejo, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta
Telp: 0274-384124 | Email: humas@gunungkidul.go.id

SELAMAT HARI PERS NASIONAL 2022

Bupati H. SUNARYANTA | Wakil Bupati **HERI SUSANTO, S.Kom, M.Si**

PIMPINAN & ANGGOTA DPRD KABUPATEN SLEMAN

MENGUCAPKAN
SELAMAT HARI PERS NASIONAL
9 FEBRUARI 2022

Ketua : **Haris Sugiharta, S.I.P.**
Wakil Ketua : **Arif Kurniawan, S.Ag, M.H.**
Wakil Ketua : **HR. Sukaptana, S.H.**
Wakil Ketua : **Tri Nugroho, S.E.**

UMY UNIVERSITAS YOGYAKARTA
www.uy.ac.id

2022 HARI PERS NASIONAL

Selamat HARI PERS NASIONAL
9 FEBRUARI 2022

Puskesmas Diminta Buka Pelayanan 24 Jam

Kekuatan tenaga kesehatan di Surabaya dinilai aman dan mencukupi.

DADANG KURNIA
WILDA FIZRIYANI

SURABAYA — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Puskesmas buka 24 jam seiring kembali melonjaknya Covid-19 varian omikron. Hal itu dilakukan agar pasien yang terpapar Covid-19 dapat diketahui dan cepat tertangani.

Eri juga meminta jajaran mengalokasikan kembali *swab hunter*, serta melakukan *testing*, *tracing*, dan *treatment* (3T) secara masif.

"Kalau kita memasifkan kembali *swab hunter* dan 3T, kita akan lebih tahu kluster-klusternya, minimal *tracing* itu 1 berbanding 20. Jangan sampai menjadi bom waktu seperti varian delta di tahun 2021," kata Eri, Senin (8/2).

Eri pun menjelaskan alasan memperpanjang pelayanan di Puskesmas menjadi 24 jam *non stop*. Eri ingin pasien yang ada di tingkat kelurahan dan kecamatan cepat teratasi setelah dinyatakan positif atau RSLT untuk dirawat," ujar Eri.

Eri kembali menekankan pentingnya menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bukan hanya itu, jika ada warga Surabaya yang terkonfirmasi positif Covid-19, diharapkan segera melapor ke Puskesmas terdekat atau datang ke tempat isolasi terpusat yang disediakan oleh Pemkot Surabaya.

Saat disinggung soal kekuatan tenaga kesehatan (nakes) di Surabaya, ia memastikan aman dan tercukupi. Eri kemudian mengimbau bagi pasien Covid-19 yang bergejala ringan tidak melakukan perawatan di RS, melainkan cukup di tempat isolasi terpusat.

"Kecuali, kalau sudah parah dan menengah, baru langsung ke RS. Masalahnya itu bisa menambah kapasitas *bed* di RS. Kedua, kasihan dengan pasien lainnya yang benar-benar butuh pelayanan serius. Insya Allah, nakes kita aman," kata Eri.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christianto mengatakan, pihaknya tengah melakukan berbagai langkah dalam mengantisipasi lonjakan Covid-19. Di antaranya dengan mengalokasikan aplikasi PeduliLindungi di tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU), pengaturan jam buka tutup warung kopi, swa-

layan, kafe, dan sebagainya. Eddy mengaku telah bersurat ke kelurahan dan kecamatan untuk melakukan giat rutin penertiban terkait antisipasi dan pencegahan Covid-19. Utamanya terkait penerapan proses dan QR code PeduliLindungi. "Kemarin saya temukan pelanggaran, berdasarkan laporan warga, di Empire Palace itu hanya ada tiga orang dari 3.000 peserta yang memakai aplikasi," kata Eddy.

Dari Malang, kasus Covid-19 di Malang Raya mengalami lonjakan selama beberapa waktu terakhir. Hal ini menyebabkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengaktifkan kembali Rumah Sakit Lapangan Jlen Boulevard (RSLJB).

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keberadaan RSLJB penting sebagai pendukung tempat isolasi terpusat (isoter). Hal ini terutama untuk melayani pasien Covid-19 tanpa gejala maupun gejala ringan di Malang Raya.

"Semoga semuanya lancar, nakes (tenaga kesehatan) dan pasiennya sehat dan cepat sembuh dan bahagia selama berada di sini (RSLJB)," ungkap Khofifah, Selasa (8/2).

Untuk diketahui, RSLJB memiliki 320 tempat tidur. Kemudian dilengkapi fasilitas berupa sarana hiburan seperti ruang karaoke, dan sarana olahraga berupa tempat gym dan *jogging track*. ■ edd fernan rahadi



RILIS PENGUNGKAPAN KASUS NARKOBA DI MADIUN. Polisi memperlihatkan barang bukti saat merilis pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Mapolres Madiun Kota, Selasa (8/2). Polres Madiun Kota mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba dengan menangkap 10 orang tersangka terdiri pengedar dan pengguna serta mengamankan barang bukti.

Gubernur: Perketat Penerapan Aplikasi PeduliLindungi

MALANG — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta jajaran pemerintah daerah memperketat pengawasan penerapan aplikasi PeduliLindungi pada berbagai fasilitas umum termasuk tempat-tempat wisata. Khofifah mengatakan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, memang ditemukan adanya pelanggaran pengawasan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di Indonesia.

"Di beberapa tempat, hasil evaluasi kemarin sore dengan Menko Marvest, rupanya ada pelanggaran dalam pengawasan penggunaan aplikasi PeduliLindungi," kata Khofifah di Kota Malang, Selasa (8/2).

Khofifah menjelaskan dengan informasi tersebut, maka pengawasan penggunaan apli-

kasi PeduliLindungi di fasilitas umum, tempat rekreasi, hotel dan restoran di seluruh wilayah di Jawa Timur harus diperketat oleh pemerintah daerah. Penguatan penggunaan aplikasi PeduliLindungi tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk meminimalkan risiko penyebaran Covid-19 yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami lonjakan cukup tinggi, termasuk di Jawa Timur.

"Mohon pemerintah daerah terus melakukan monitoring pengawasan bersama jajaran polres dan kodim di masing-masing daerah," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, berdasarkan evaluasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memang terjadi pelanggaran pengawasan penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada titik-titik

strategis. Ia menambahkan, pengawasan penggunaan aplikasi PeduliLindungi tersebut, tidak bertujuan untuk menutup tempat-tempat strategis seperti restoran, destinasi wisata dan lainnya.

Namun, pengawasan perlu ditingkatkan dalam upaya untuk memperkuat disiplin proses masyarakat. "Tidak pada posisi untuk menutup tempat-tempat seperti restoran dan wisata, tidak. Tapi, PeduliLindungi hasil ada pengawasannya, supaya disiplin dari mereka yang aktivitasnya meningkat," katanya. Di Jawa Timur, secara keseluruhan ada 412.987 kasus konfirmasi positif Covid-19, dengan total kasus aktif sebanyak 6.052 kasus. Dari total kasus konfirmasi itu, sebanyak 377.138 sembuh dan 29.797 meninggal dunia. ■ antara edd fernan rahadi



SEGENAP PIMPINAN & ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA Mengucapkan



Selamat HARI PERS NASIONAL

9 FEBRUARI 2022



ADI SUTAWIDJONO, S.P
Ketua

HJ. LAILA MUFIDAH, S.AG
Wakil Ketua

DRS. A.H. THONY, M.SI
Wakil Ketua

RENI ASTUTI, S.SI
Wakil Ketua

ASN Penghuni Rusun Diminta Keluar

OLEH DADANG KURNIA

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ternyata mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pendataan ulang penghuni rumah susun (Rusun) di Kota Pahlawan. Bahkan sebelum ditemukannya ada aparat sipil negara (ASN) yang menghuni Rusun.

Eri pun meminta ASN yang menghuni Rusun tersebut segera dikeluarkan, karena Rusun hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Ternyata hasil pengecekan ada ASN yang menghuni Rusun, ya harus dikeluarkan lah. Wong ASN itu bukan MBR kok masuk ke situ. Saya sebenarnya yang memerintahkan pengecekan itu," kata Eri di Surabaya, Selasa (8/2).

Eri mengaku, pendataan ulang dilakukan di 20 Rusunawa di Kota Surabaya sejak Januari 2022. Dari hasil sensus, kata Eri, diketahui ada 87 ASN yang menghuni Rusun. Terdiri dari 65 ASN aktif dan 22 di antaranya pensiunan ASN. Ia pun meminta para ASN yang masih menghuni rusun itu untuk segera pindah.

"Namun kita beri waktu sebulan untuk pindah. Jadi, tidak langsung kami suruh untuk pindah, karena mungkin dia tidak punya tempat," ujar Eri.

Eri menegaskan, Rusun hanya di peruntukkan untuk MBR. MBR, kata Eri, adalah warga yang belum mempunyai pekerjaan atau yang penghasilan dari kerjanya itu tidak bisa menggerakkan ekonomi keluarganya. Artinya, penghasilan yang diperolehnya hanya cukup untuk makan dan mungkin untuk sekolah anaknya.

"Nah, kalau ada MBR tapi nyicil mobil, nyicil sepeda motor, kira-kira itu masuk MBR apa tidak? Nah, seperti ini yang harus kita atur," kata Eri.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad menyatakan akan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki manajemen pengelolaan hingga pendataan penghuni Rusun. Salah satunya dengan menciptakan aplikasi e-Rusun. Aplikasi ini akan terkoneksi dengan data Dinsos MBR dan data Dispendukcapil.

"Dalam aplikasi ini juga akan ada data piutang atau tunggakan penghuni yang belum bayar sewa. Bahkan, kami juga siapkan pembayaran digital atau e-Payment untuk memudahkan," kata dia.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mendesak Pemkot Surabaya mendata ulang penghuni rumah susun sewa (Rusunawa) di Kota Pahlawan. Pasalnya, ada beberapa temuan beberapa Rusun dihuni orang yang mampu. Ia mengungkapkan adanya penghuni Rusun yang memiliki mobil dan bahkan ada ASN.

"Kalau ada ASN yang masih menempati Rusun, tentu itu tidak tepat karena peruntukannya rusun itu digunakan untuk MBR. Jadi, penghuni rusun itu harus benar-benar MBR," kata Arif.

Ia pun berharap penghuni Rusun yang sudah naik kelas secara ekonominya, untuk sadar dan keluar. Apalagi, kata dia, saat ini antrean menghuni Rusun sudah sangat banyak.

"Mbok yo jangan menempati Rusun, itu zalim, karena di sisi yang lain banyak saudara-saudara kita yang sudah antre ingin menempati Rusun, yang mana secara ekonomi mereka benar-benar tidak mampu," ujarnya. ■ edd fernan rahadi